

A 3D-rendered smartphone with a green screen is the central focus. It stands on a futuristic, multi-layered circular platform with blue and white rings. The background is a dark, high-tech environment with various components like a keyboard, a mouse, and other electronic parts. The text on the screen is white and bold.

**STATUS
LITERASI
DIGITAL
DI
INDONESIA
2022**

Ringkasan Eksekutif

Status Literasi Digital di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,54 dibandingkan tahun sebelumnya. Pengukuran dengan Kerangka Indeks Literasi Digital tahun 2022 ini menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (*Digital Ethics*), Keamanan Digital (*Digital Safety*), dan Budaya Digital (*Digital Culture*).

Survei ini menunjukkan bahwa laki-laki, kelompok pekerja di sektor pemerintah/TNI/Polri, berpendidikan tinggi, dan tinggal di wilayah urban memiliki indeks lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Dari 34 Provinsi di Indonesia, DI Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan Indeks Literasi Digital tertinggi selama dua tahun berturut-turut, dengan skor indeks tahun ini sebesar 3,64.

Secara umum, terlihat juga adanya perubahan kebiasaan dalam penggunaan internet masyarakat. Intensitas penggunaan internet cenderung menurun, namun biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet cenderung naik. Salah satu faktor yang diduga turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah adanya peningkatan pada penggunaan aplikasi digital berbasis video yang cenderung menghabiskan lebih banyak kuota. Indikasi terkait hal ini juga dikuatkan dengan adanya kecenderungan kenaikan yang signifikan pada penggunaan sosial media berbasis video yaitu TikTok.

Penelitian ini juga melihat isu-isu khusus, seperti kesiapan Kalimantan Timur menjadi provinsi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Status Literasi Digital di atas rata-rata nasional, permasalahan perlindungan data pribadi menjadi permasalahan yang kembali muncul di tahun ini, dan Indeks Literasi Digital wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memiliki gap yang rendah dengan wilayah non-3T.

Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Penentuan sampel survei menggunakan *multistage random sampling* dengan pendekatan home visit di area survei. Total responden pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun ini berjumlah 10.000 orang dengan *Margin of Error* (MoE) +/- 0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang diikuti dalam penentuan sampel adalah anggota rumah tangga berusia 13-70 tahun, serta mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Daftar Isi

01	PENDAHULUAN	4
	1.1. Pendahuluan	5
	1.2. Tujuan dan Sasaran	6
	1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	6
02	METODOLOGI	8
	2.1. Kerangka Penelitian	9
	2.2. Metode Penelitian	12
03	PERILAKU DALAM PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL	16
	3.1. Demografi Responden	17
	3.2. Akses dan Penggunaan Internet	19
	3.3. Kebiasaan Bermedia Sosial dan Mencerna Berita Daring	25
	3.4. Kebiasaan Menghadapi Isu Hoaks	30
04	INDEKS LITERASI DIGITAL	38
	4.1. Indeks Literasi Digital Nasional	39
	4.1.1. <i>Digital Skill</i>	39
	4.1.2. <i>Digital Ethic</i>	41
	4.1.3. <i>Digital Safety</i>	42
	4.1.4. <i>Digital Culture</i>	42
	4.2. Indeks Literasi Digital Berdasarkan Wilayah	43
	4.3. Indeks Literasi Digital Berdasarkan Jenis Kelamin	45
	4.4. Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat	45
	4.5. Indeks Berdasarkan Program Literasi Digital	50
05	ANALISIS KHUSUS	52
	5.1. Kesiapan Masyarakat Menghadapi UU PDP: Berbagi Data dan Keamanan Pribadi	53
	5.2. Status Literasi Digital Kalimantan Timur sebagai Lokasi Ibu Kota Baru	58
	5.3. Kondisi Wilayah 3T	64
	5.4. Pengeluaran dalam Aktivitas Digital	72
06	PENUTUP DAN REKOMENDASI	76

Status Literasi Digital di Indonesia 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Direktur Jendral Aplikasi Informatika,
Semuel Abrijani Pangerapan

Penanggung Jawab:

Direktur Pemberdayaan Informatika,
Bonifasius Wahyu Pudjianto

Panel Ahli:

Mulya Amri
Adek Media Roza

Analisis:

Teguh Surya
Mahendra Pratama Putra
Wisma Aji Pribadi

Penulis Utama:

Rizki Ameliah
Rangga Adi Negara
Bahtiar Minarto
Tonggo Marito Manurung
Maulana Akbar

Editor:

Vivi Zabkie
Padjar Iswara
Windarti

Periset Kuantitatif:

Siti Zahra Mulianti Natsir
Euodia Josephine Boyfala
Aishya Fazahra
Novandro Zakaria Pratama
Rizky Anggia
Roy Imanudin
Lulu Mahdiyah Sandjadirja
Risanti Delphia
Fatiya Rumi Humaira
Ade Supriatna

Desain Grafis:

Muhammad Yana
Aris Luhur Setiawan
Wahyu Risyanto
Ajeng Ayu

01 Pendahuluan



1.1.

Pendahuluan

Indonesia kini memiliki jumlah pengguna internet setidaknya sebanyak 62,1% dari jumlah penduduk (BPS, 2021). Bahkan, jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet terutama dari perangkat telepon genggam terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kemampuan masyarakat Indonesia dan kesempatan akses dalam media digital membawa pengaruh pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi digital dengan adanya peningkatan jumlah pengguna loka pasar di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia dan akan terus naik hingga 221 juta pengguna di tahun 2024 (Statista, 2022).

Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebab fenomena tersebut yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital (UNESCO, 2018b).

Oleh karena itu, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan tingkat literasi digital penduduk Indonesia, diperlukan satu studi mendalam agar bisa mengukur kemampuan literasi digital Indonesia dari berbagai sudut pandang. Survei ini merupakan salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan tersebut yang diharapkan menjadi rujukan utama dalam penentuan status literasi digital di Tanah Air.

Survei ini merupakan dilakukan secara tahunan dan sudah memasuki tahun ketiga. Pada survei tahun 2022, dilakukan pada rentang waktu 1 Agustus-31 September 2022. Metode yang digunakan adalah *multistage random sampling* kepada 10.000 responden di seluruh Indonesia yang menggunakan internet selama 3 bulan terakhir dan berusia 13-70 tahun.

1.2.

Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan dan saran survei ini adalah untuk memperoleh gambaran terhadap situasi literasi digital di Indonesia. Secara khusus survei ini memiliki tujuan dan saran sebagai berikut:

- Menyesuaikan kerangka (*framework*) agar lebih sejalan dengan Roadmap Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020).
- Memberikan gambaran umum tentang pola penggunaan teknologi dan media digital berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
- Memahami kemampuan masyarakat untuk mengenali hoaks (informasi bohong) dan membantu perumusan strategi pengendalian hoaks.
- Memahami pola masyarakat Indonesia dalam menjaga data pribadi dan kesiapan menghadapi berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
- Memberikan gambaran bahwa literasi digital dapat membantu meningkatkan produktivitas bekerja dan belajar.
- Mendapatkan informasi tingkat literasi digital Kalimantan Timur dalam menghadapi beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Mendapatkan status literasi digital di Kawasan 3T.

1.3.

Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan riset kuantitatif dengan cara survei tatap muka di 34 provinsi di Indonesia dan analisis data status literasi digital serta memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital di Tanah Air. Survei dilakukan dengan ketentuan:

- Masyarakat Indonesia yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir dan berumur antara 13-70 tahun.
- Pemilihan acak dengan mempertimbangkan jumlah wilayah kota dan perdesaan.



02 Metodologi



2.1.

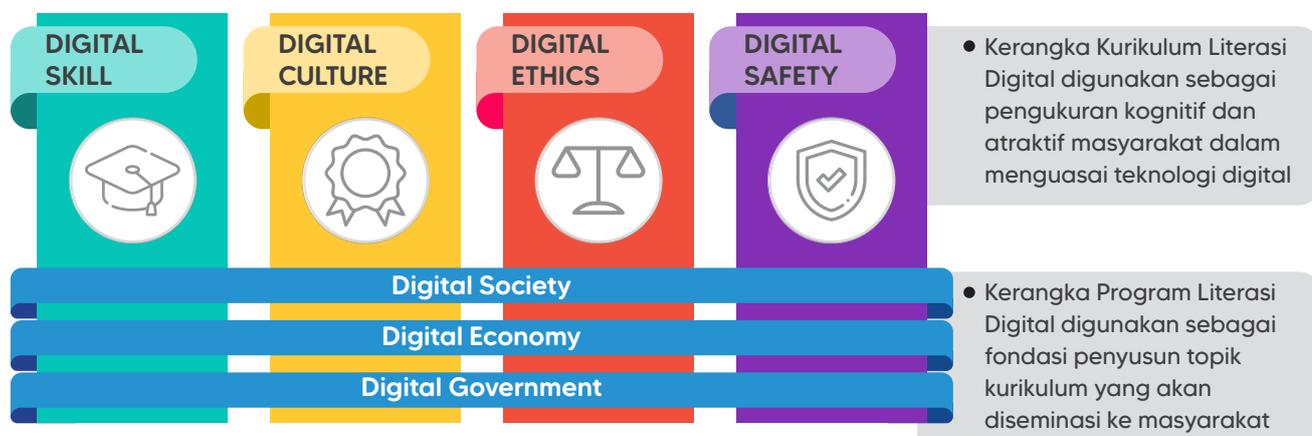
Kerangka Penelitian

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam *Road Map* Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020). Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*:

- ***Digital Skill*** atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
- ***Digital Ethics*** atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.
- ***Digital Safety*** atau keamanan digital adalah kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
- ***Digital Culture*** atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Seperti terlihat pada gambar di atas, keempat pilar dan kurikulum literasi digital menjadi basis dalam pengembangan program literasi digital nasional yang mencakup *digital society*, *digital economy*, dan *digital government*.

Tabel. 1. Pilar G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: Framework and Approach (CSIS,2022)

Pilar	1. Infrastructure & ecosystem	2. Literacy	3. Empowerment	4. Jobs
Elemen	a) Adopsi dan akses Sektor TIK b) Pembelajaran dan Inovasi	a) Komplementaritas b) Kedekatan c) Keamanan	a) Pengguna/ Konsumen b) Penyedia/Penjual	a) Kebutuhan <i>Digital Skill</i> b) Kesiadaan <i>Digital Skill</i>
Jumlah Indikator	6	6	9	11

Selain itu, penelitian ini menyesuaikan dengan *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and digital Literacy: Framework and Approach* (CSIS, 2022) dalam pengukuran berikut:

- Pilar *Empowerment* yang mengukur kemampuan masyarakat dalam penggunaan *digital finance* dan *marketplace* melalui pilar *Digital Skill* dalam survei Indeks Literasi Digital 2022.
- Pilar *Literacy* yang diukur berdasarkan elemen *komplementaritas* (komunikasi dan pemikiran kritis), kedekatan (kebiasaan responden dalam menggunakan data dan perangkat TIK), dan keamanan (kebiasaan responden dalam melindungi perangkat dan informasi personal) merupakan representasi dari pilar *Digital Skill*, *Digital Culture*, dan *Digital Safety* dalam Survei Literasi Digital 2022.

Dari informasi di atas, keempat pilar utama diturunkan menjadi 30 (tiga puluh) indikator yang merepresentasikan masing-masing pilar (Tabel 2). Dalam perkembangannya, pilar yang digunakan pada tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, berupa perubahan minor dalam penyusunan pertanyaan indikatornya.

Tabel 2. Pilar dan Indikator dalam Pengukuran Status Literasi Digital Indonesia 2022

Pilar	Indikator
<i>Digital Skill</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya bisa menghubungkan perangkat saya ke jaringan internet 2. Saya bisa mengunduh file/aplikasi 3. Saya bisa mengunggah file 4. Saya bisa mencari dan mengakses data, informasi dan konten di media digital. 5. Saya memiliki kemampuan menyimpan data, informasi, dan konten dalam media digital 6. Saya terbiasa mencari tahu apakah informasi yang saya temukan di situs web benar atau salah. 7. Saya terbiasa membandingkan berbagai sumber informasi untuk memutuskan apakah informasi itu benar 8. Saya mampu berinteraksi melalui berbagai perangkat komunikasi teknologi digital. 9. Saya terbiasa belanja melalui loka pasar.
<i>Digital Ethics</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya <i>tidak</i> mengunggah foto bersama anak orang lain 2. Saya <i>tidak</i> menandai teman saat mengunggah konten tanpa perlu memberi tahu teman saya tersebut 3. Saya <i>tidak</i> akan berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif di unggahan saya. 4. Saya <i>tidak</i> membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin 5. Saya tidak akan langsung membagikan informasi kecelakaan 6. Saya <i>tidak</i> akan mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif. 7. Saya <i>tidak</i> akan membagikan tangkapan layar percakapan ke media sosial
<i>Digital Safety</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di akun media sosial, saya bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat lini masa saya 2. Saya mengetahui cara melaporkan penyalahgunaan di jejaring sosial. 3. Saya dapat menonaktifkan opsi untuk menunjukkan posisi geografis. 4. Saya <i>tidak</i> mengunggah data pribadi di media sosial. 5. Saya menggunakan aplikasi untuk menemukan dan menghapus virus di perangkat saya 6. Saya bisa membedakan e-mail yang berisi spam/virus/malware. 7. Saya terbiasa membuat <i>password</i> yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. 8. Saya melakukan <i>back up</i> data di beberapa tempat.

Pilar	Indikator
Digital Culture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya menyesuaikan cara berkomunikasi agar pihak kedua tidak merasa tersinggung. 2. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang berasal dari agama lain. 3. Saya mencantumkan nama penulis saat <i>repost</i> 4. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang berasal dari suku lain. 5. Saya berbagi seni budaya tradisional dan kontemporer Indonesia secara digital 6. Saya mempertimbangkan perasaan pembaca yang memiliki pandangan politik berbeda. 7. Saya selalu mempertimbangkan dan menyadari keragaman budaya di media sosial saat membagikan pesan.

2.2.

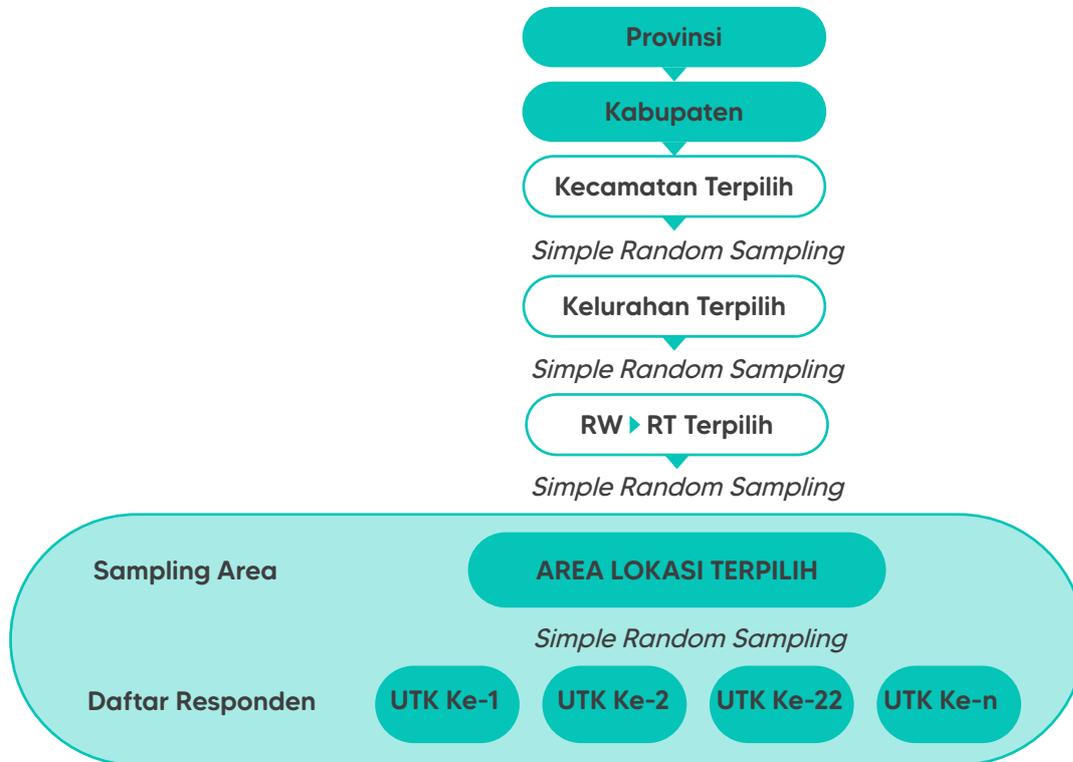
Metode Penelitian

Survei Status Literasi Digital Indonesia melibatkan 10.000 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota responden dengan metode *multistage random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (*face to face interview*) dengan populasi target adalah warga negara Indonesia yang berusia 13 hingga 70 tahun dan mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Metode multistage random sampling atau acak bertingkat dilakukan di setiap provinsi mulai dari pemilihan kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT hingga Unit Tempat Kediaman (UTK) (Gambar 2). Sementara responden pada UTK dipilih secara acak menggunakan *kish grid*.

Metode *kish grid* adalah metode pemilihan responden yang ditentukan dengan tabel bilangan. Metode ini ditemukan oleh Kish (1949) untuk menentukan sampel melalui tabel bilangan yang biasa digunakan dalam pengacakan sampel rumah tangga.

Gambar 2. Proses Penentuan Sampel melalui Pengacakan



Penentuan kerangka sampel yang berasal dari 10.000 responden dengan *Margin of Error* sebesar $\pm 0,98\%$ dibagi pada jumlah provinsi sesuai dengan proporsi jumlah penduduk. Adapun pembagian di setiap kota berada pada rentang 5-200 sampel, bergantung pada jumlah penduduk pada wilayah tersebut.

Penentuan sampel di level kecamatan ditentukan pada rentang 5-20 kecamatan. Setiap kota/kabupaten yang memiliki sampel di atas 20 responden akan memiliki jumlah kecamatan terpilih lebih dari satu sesuai dengan kelipatan 20. Jumlah tersebut cukup untuk menjangkau responden seluas mungkin dengan jangkauan hingga jumlah kecamatan yang besar.

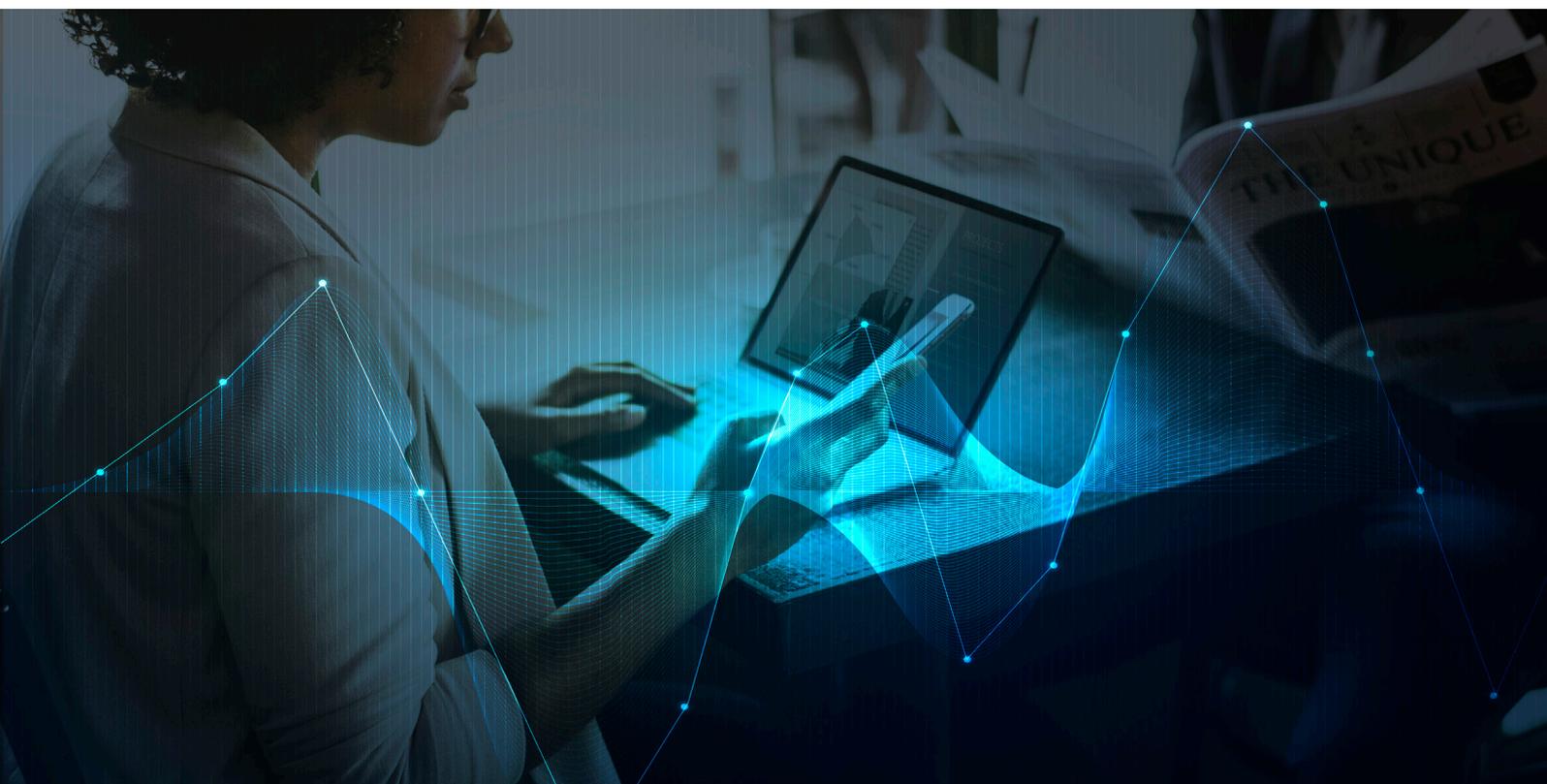
Sementara untuk mengukur proporsi data dari kecamatan yang dipilih, penentuan kecamatan dengan kondisi kesesuaian proporsi perdesaan dan perkotaan di provinsi tersebut berdasarkan klasifikasi perdesaan dan perkotaan Badan Pusat Statistik (Peraturan Kepala 120/2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020).

Tabel 3. Jumlah Responden berdasarkan Proporsi Perdesaan dan Perkotaan.

Provinsi	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Proporsi Pedesaan	Proporsi Perkotaan	Jumlah Responden
Aceh	5.388,1	68%	32%	225
Bali	4.414,4	44%	56%	135
Banten	12.895,3	36%	64%	435
Bengkulu	1.994,3	80%	20%	90
DI Yogyakarta	3.919,2	26%	74%	110
DKI Jakarta	10.576,4	0%	100%	395
Gorontalo	1.186,3	66%	34%	50
Jambi	3.604,2	74%	26%	145
Jawa Barat	49.565,2	28%	72%	1790
Jawa Tengah	34.738,2	38%	62%	1235
Jawa Timur	39.955,9	38%	62%	1410
Kalimantan Barat	5.104,9	85%	15%	185
Kalimantan Selatan	4.268,6	75%	25%	160
Kalimantan Tengah	2.686,3	86%	14%	115
Kalimantan Timur	3.664,7	68%	32%	130
Kalimantan Utara	708,4	83%	17%	35
Kepulauan Bangka Belitung	1.469,8	60%	40%	70
Kepulauan Riau	2.309,5	69%	31%	85
Lampung	8.534,8	68%	32%	320
Maluku	1.787,1	88%	13%	80
Maluku Utara	1.252,3	81%	19%	65
Nusa Tenggara Barat	5.225,9	49%	51%	190
Nusa Tenggara Timur	5.513,4	92%	8%	225
Papua	3.393,1	94%	6%	215
Papua Barat	986,0	94%	6%	75
Riau	6.951,2	77%	23%	190
Sulawesi Barat	1.378,1	86%	14%	60
Sulawesi Selatan	8.888,8	73%	27%	345
Sulawesi Tengah	3.081,7	83%	17%	130
Sulawesi Tenggara	2.703,5	83%	17%	125
Sulawesi Utara	2.512,9	66%	34%	115
Sumatera Barat	5.545,7	56%	44%	205
Sumatera Selatan	8.600,8	81%	19%	285
Sumatera Utara	14.798,4	74%	26%	575
Total	269.603,3	67%	33%	10.000

Pengumpulan data selama periode tersebut telah melalui beragam proses kontrol kualitas untuk dapat memastikan bahwa data telah diambil dengan cara yang tepat dan menghasilkan data yang representatif dengan kondisi sebenarnya. Proses tersebut di antaranya:

1. *Pilot survey* dilakukan selama dua minggu pada 1-16 Juni 2022 untuk menguji instrumen kuesioner. Pengujian ini terdiri atas pengujian statistik berupa reliabilitas dan validitas. Sedangkan pengujian non-statistik berupa nilai kesesuaian dan kemudahan oleh responden untuk dapat memaknai dan mencerna setiap pertanyaan. Pada tahapan ini penulisan dan struktur pertanyaan-pertanyaan telah dimutakhirkan untuk mendapatkan instrumen yang sempurna.
2. Proses *witness* dilakukan selama dua minggu oleh tim peneliti dari Katadata Insight Center, Kementerian Kominfo, dan ahli lainnya pada periode 1 Agustus-9 September 2022 untuk melihat dan mengawasi langsung proses pengumpulan data di 10 provinsi yang mewakili keseluruhan wilayah di Indonesia.
3. Proses *Callback* atau mengkonfirmasi kembali isi responden melalui *telesurvey* terhadap 15% dari total responden untuk memastikan bahwa responden telah melakukan pengumpulan data dengan metode yang sesuai.
4. Proses pengujian statistik pada hasil survei berupa reliabilitas dan validitas, beserta proses *cleaning* untuk melihat kualitas hasil pengumpulan data.



03

Perilaku dalam Penggunaan Platform Digital

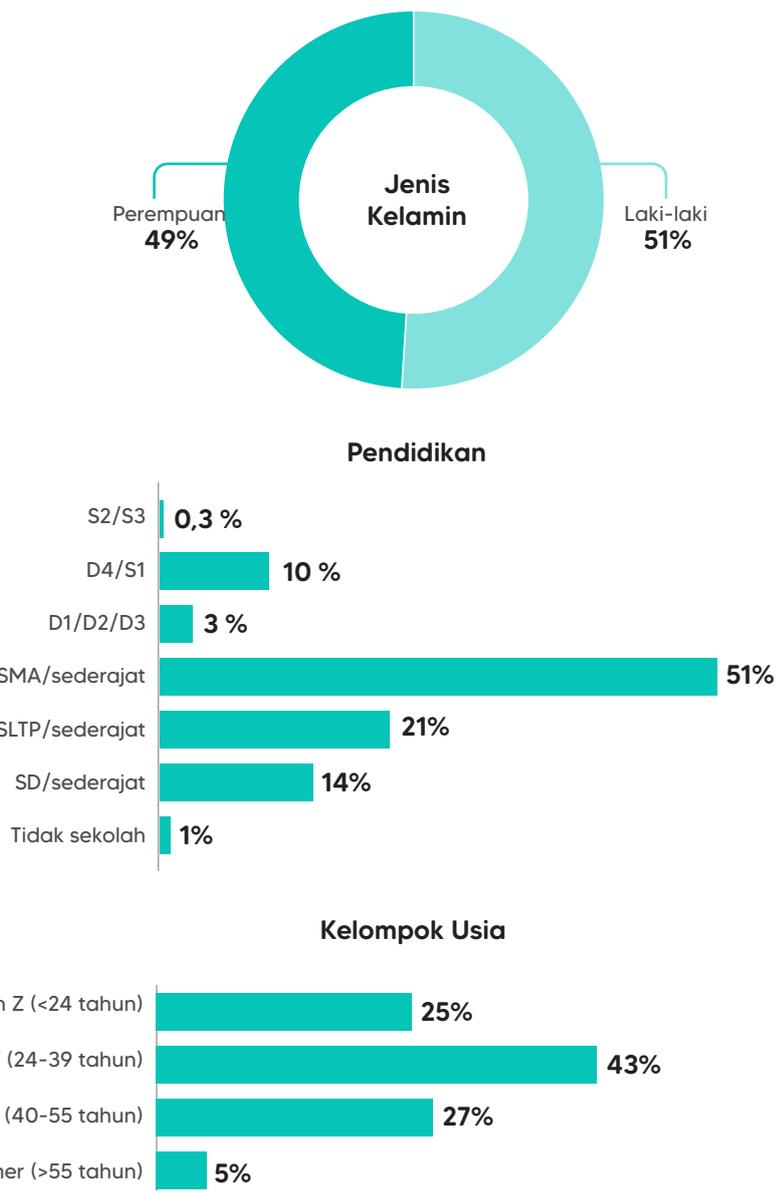


3.1.

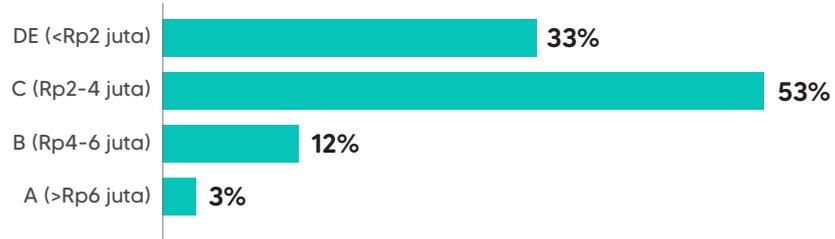
Demografi Responden

Profil responden Survei Status Literasi Digital Indonesia didominasi oleh Generasi Y, berpendidikan SMA dan sederajat, serta kelompok sosial ekonomi C. Generasi Z dan X yang menjadi responden sebenarnya juga cukup banyak, masing-masing sebanyak 25% dan 27% responden. Jumlah responden pria dan wanita juga tidak jauh berbeda, dengan profil pekerjaan yang beragam. Hal ini menunjukkan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat yang tergolong baik pada survei ini.

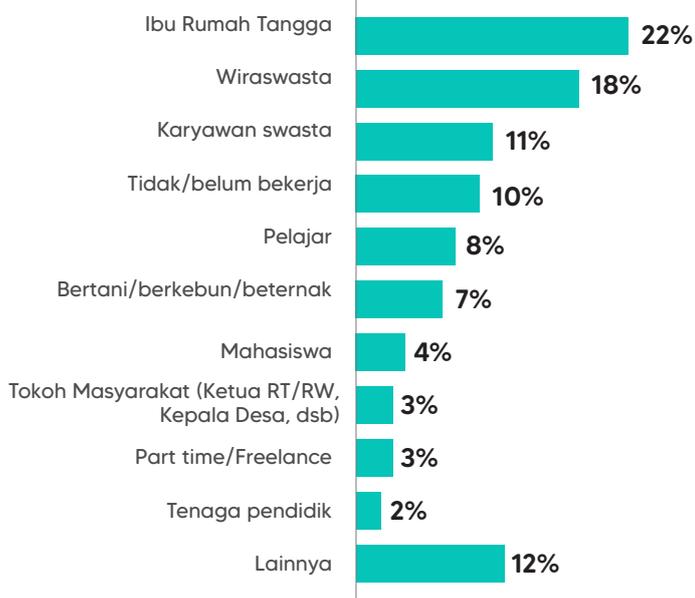
Gambar 3. Demografi Responden



SES (berdasarkan pengeluaran rata-rata per bulan)



Pekerjaan



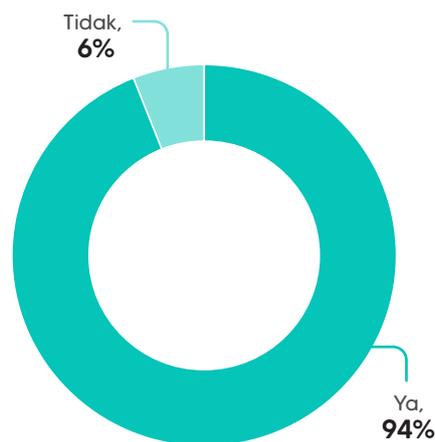
3.2.

Akses dan Penggunaan Internet

Kebanyakan responden (85%) mengakses internet melalui kuota *handphone*, sehingga mereka bisa mengakses internet di mana saja. Terkait hal ini, 94% responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan sinyal seluler di sekitar rumah, dengan yang terbanyak adalah sinyal dari Telkomsel, disusul Indosat dan XL.

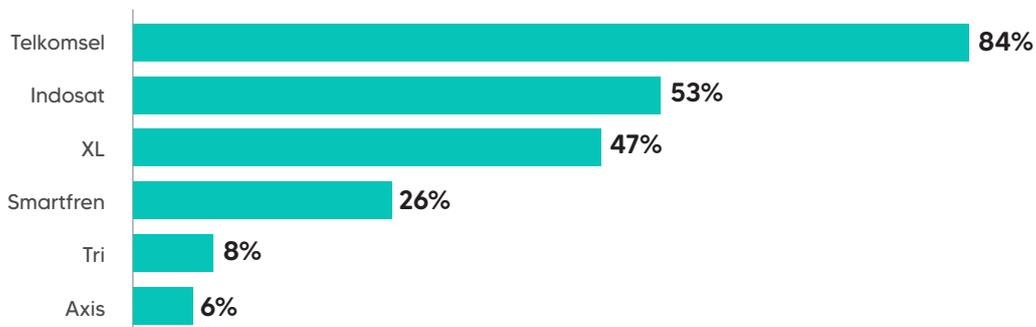
Gambar 4. Akses Sinyal Telepon Seluler

“Apakah di sekitar lokasi rumah Bapak/Ibu/Saudara terdapat sinyal telepon seluler?” [SA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



Sinyal Provider

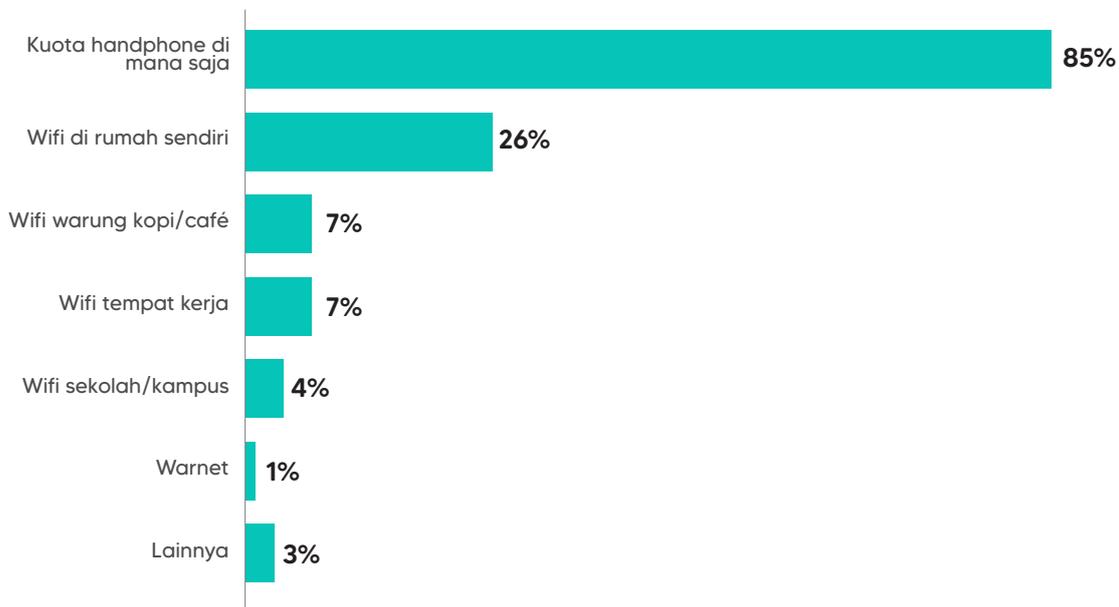
“Sinyal provider apa yang ada di sekitar lokasi rumah Bapak/Ibu/Saudara?” [MA]
Basis: Responden yang di sekitar rumahnya terdapat sinyal seluler (n=9.361)



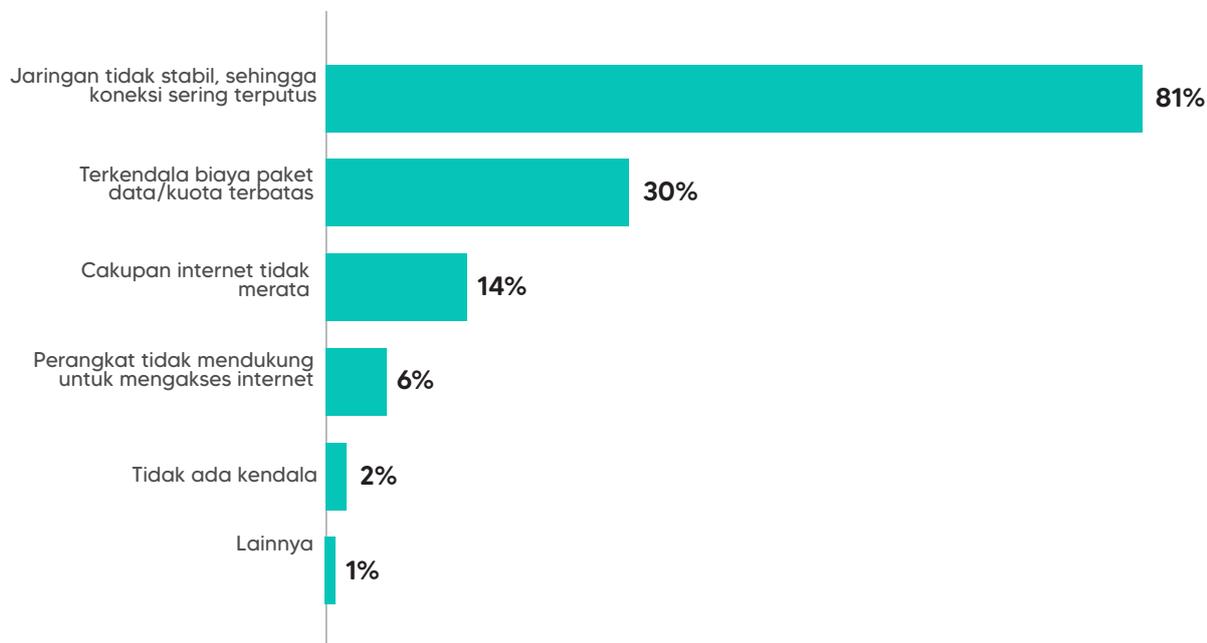
Namun, hampir seluruh responden masih menemui kendala saat mengakses internet, terutama terkait kualitas jaringan yang menyebabkan koneksi tidak stabil dan sering terputus.

Gambar 5. Tempat dan Kendala Mengakses Internet

“Di mana lokasi/tempat biasanya Anda mengakses internet?” [MA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



“Kendala apa saja yang biasanya Anda alami ketika mengakses internet?” [MA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



Mengakses internet melalui kuota *handphone* merupakan cara yang paling banyak dilakukan sehingga membuat responden bisa mengakses internet di mana saja. Namun, hampir seluruh responden masih menemui kendala pada mengakses internet, hanya 2% responden mengaku tidak menemukan kendala. Kendala yang paling banyak disebutkan ialah jaringan yang tidak stabil sehingga koneksi sering terputus.

Responden paling sering mengakses internet pada waktu petang di pukul 19.01-21.00 waktu setempat setelah mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, intensitas penggunaan internet cenderung menurun, khususnya setelah pukul 07.00. Penurunan intensitas penggunaan internet tahun ini sejalan dengan telah pulihnya sebagian besar aktivitas masyarakat pasca pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.

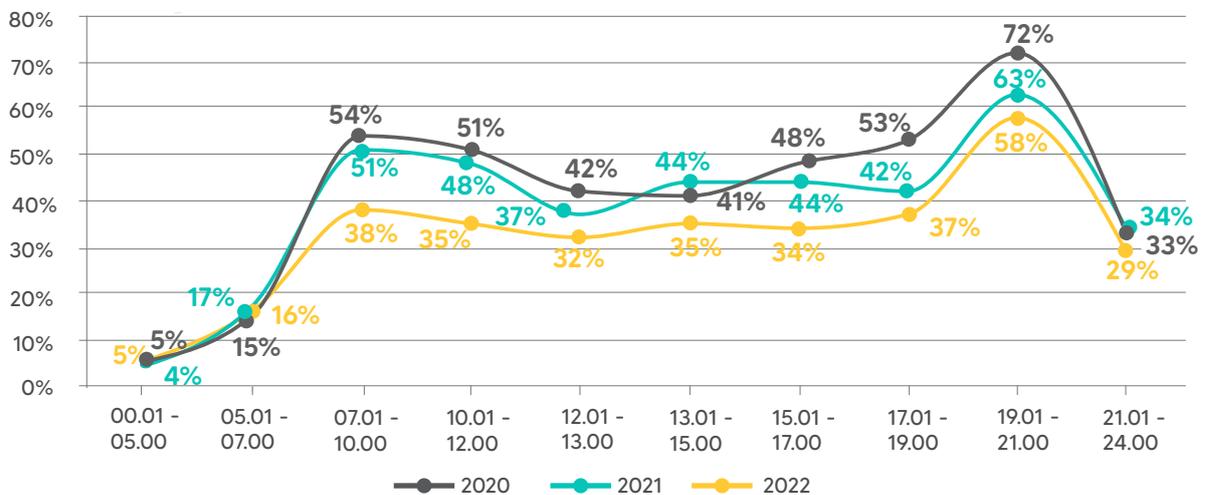
Intensitas penggunaan internet di wilayah barat Indonesia terpantau cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal yang menarik tampak pada pola waktu penggunaan internet di wilayah Timur yang sedikit berbeda. Di wilayah ini, puncak akses penggunaan internet terjadi pada pagi hari, yaitu di rentang waktu pukul 10.00 hingga 12 siang. Sementara di wilayah Barat dan Tengah, puncak waktu penggunaan internet terjadi pada malam hari, terutama pada pukul 19.00 hingga 21.00.

Gambar 6. Waktu Penggunaan Internet

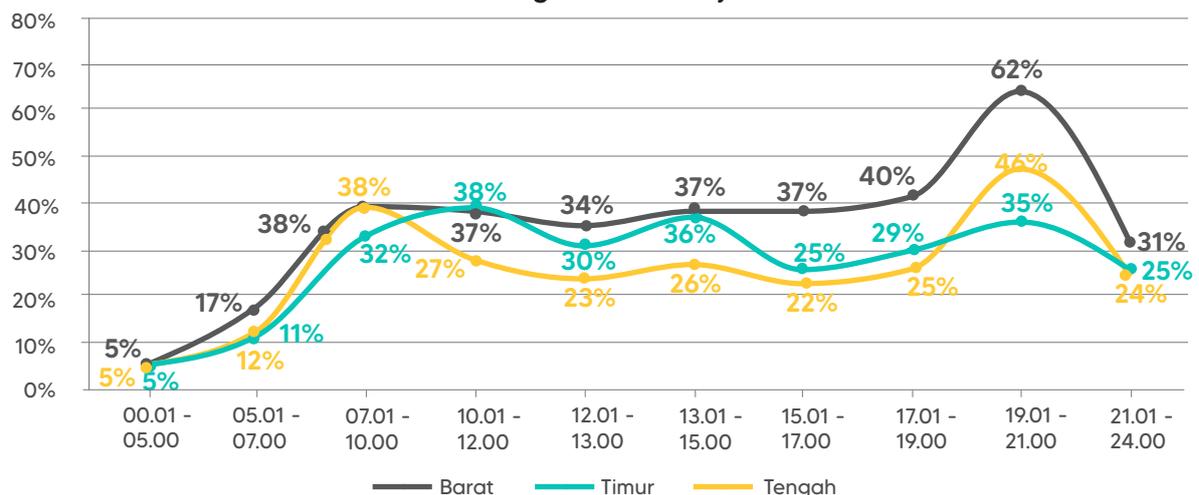
“Jam berapa Anda biasanya mengakses internet?” [MA]

Basis: Seluruh responden (n=10.000)

Perbandingan antar tahun survei



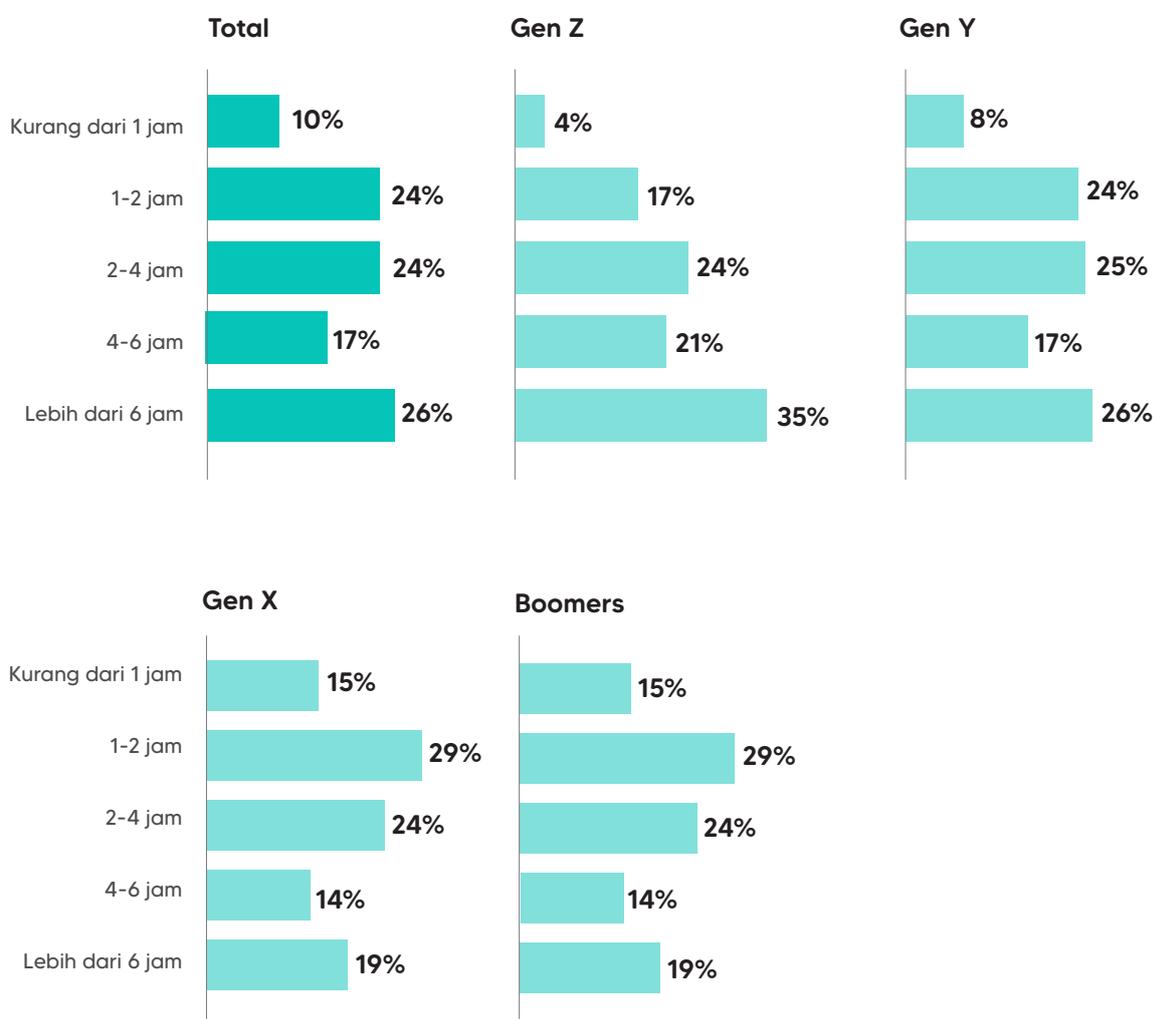
Perbandingan antar wilayah



Temuan lain pada survei ini juga mengkonfirmasi profil antar generasi terkait penggunaan internet. Generasi Z dan Y cenderung mengakses internet lebih lama dibandingkan kohort lainnya. Pada kelompok muda ini, lebih banyak responden yang mengakses internet lebih dari 6 jam per harinya, sedangkan kebanyakan Generasi X dan Boomers mengakses selama 1 hingga maksimal 4 jam.

Gambar 7. Durasi Mengakses Internet

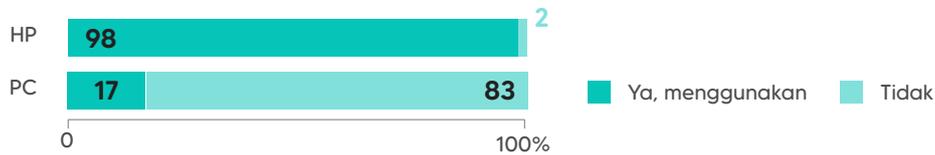
“Berapa lama atau durasi rata-rata menggunakan internet per hari?” [SA]
 Basis: Seluruh responden



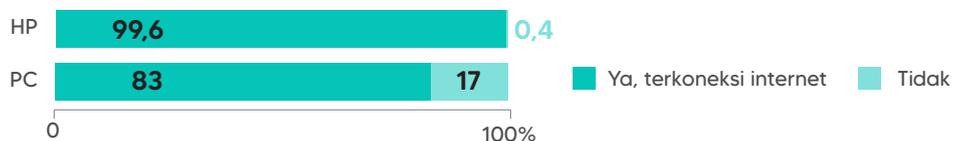
Hampir seluruh responden memiliki *handphone*/tablet yang terkoneksi dengan internet dan bisa mengakses Facebook, Whatsapp, YouTube dan Google. Sedikit sekali responden yang perangkatnya tidak bisa mengakses internet termasuk aplikasi-aplikasi tersebut.

Gambar 8. Perangkat dalam Mengakses Internet

“Apakah Anda memiliki/menggunakan perangkat berikut ini?” [SA]
Basis: Seluruh responden



“Apa perangkat tersebut digunakan/terkoneksi internet (termasuk FB, WA, Youtube dan Google)?” [SA]
Basis: Responden yang memiliki perangkat tersebut



Dilihat dari pola kegiatan yang dilakukan oleh responden saat terkoneksi dengan internet, tampak bahwa internet menjadi media yang sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sangat sedikit responden yang tidak memanfaatkan internet untuk menjalin interaksi, baik melalui pesan singkat maupun fitur-fitur lain yang ada di berbagai aplikasi media sosial.

Pemanfaatan internet untuk bersosialisasi ini secara signifikan terlihat berbeda dengan tujuan penggunaan lainnya. Sebagian responden cenderung belum menggunakan internet untuk bermain game *online*, keperluan pekerjaan, maupun mengakses layanan publik.



Gambar 9. Kegiatan Berinternet

“Seberapa sering Anda mengakses/menggunakan internet untuk kegiatan berikut ini:” [SA]

Basis: Seluruh responden (n=10.000)



*Jarang merupakan akumulasi dari skala ‘Sangat Jarang’ dan ‘Jarang’
 Sering merupakan akumulasi dari skala ‘Sering’ dan ‘Sangat sering’

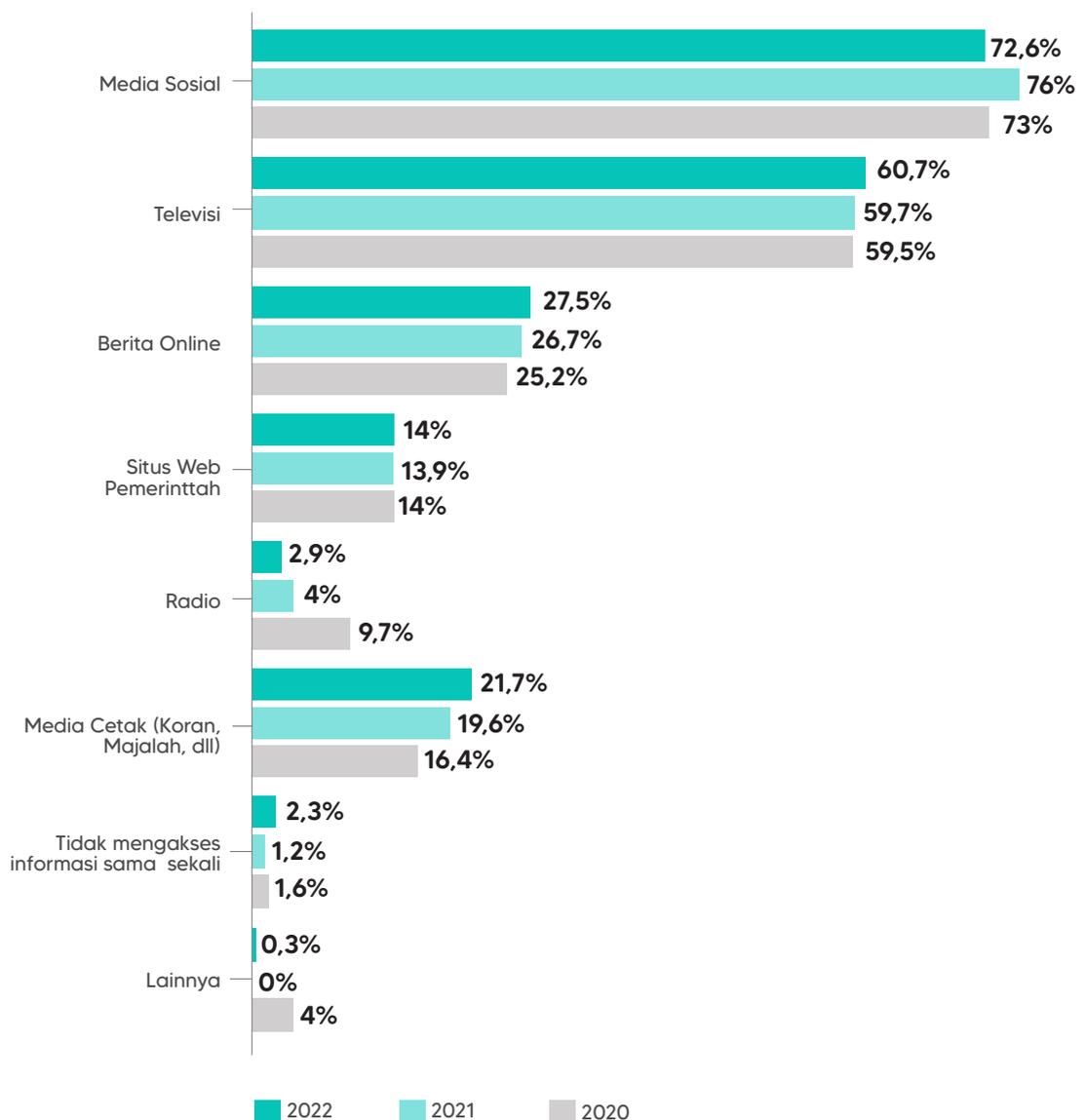
3.3.

Kebiasaan Bermedia Sosial dan Mencerna Berita Daring

Sumber yang biasa diakses untuk mendapatkan informasi dalam tiga tahun terakhir cenderung masih sama. Media sosial merupakan sumber informasi terbesar bagi 72,6% responden. Begitu juga dengan televisi dan berita *online* yang secara konsisten menempati posisi sumber informasi kedua dan ketiga, dengan persentase 60% dan 27,5% di tahun ini.

Gambar 10. Sumber untuk Mendapatkan Informasi

”Manakah dari sumber berikut yang biasanya Anda akses untuk mendapatkan informasi?”
Basis: Semua Responden

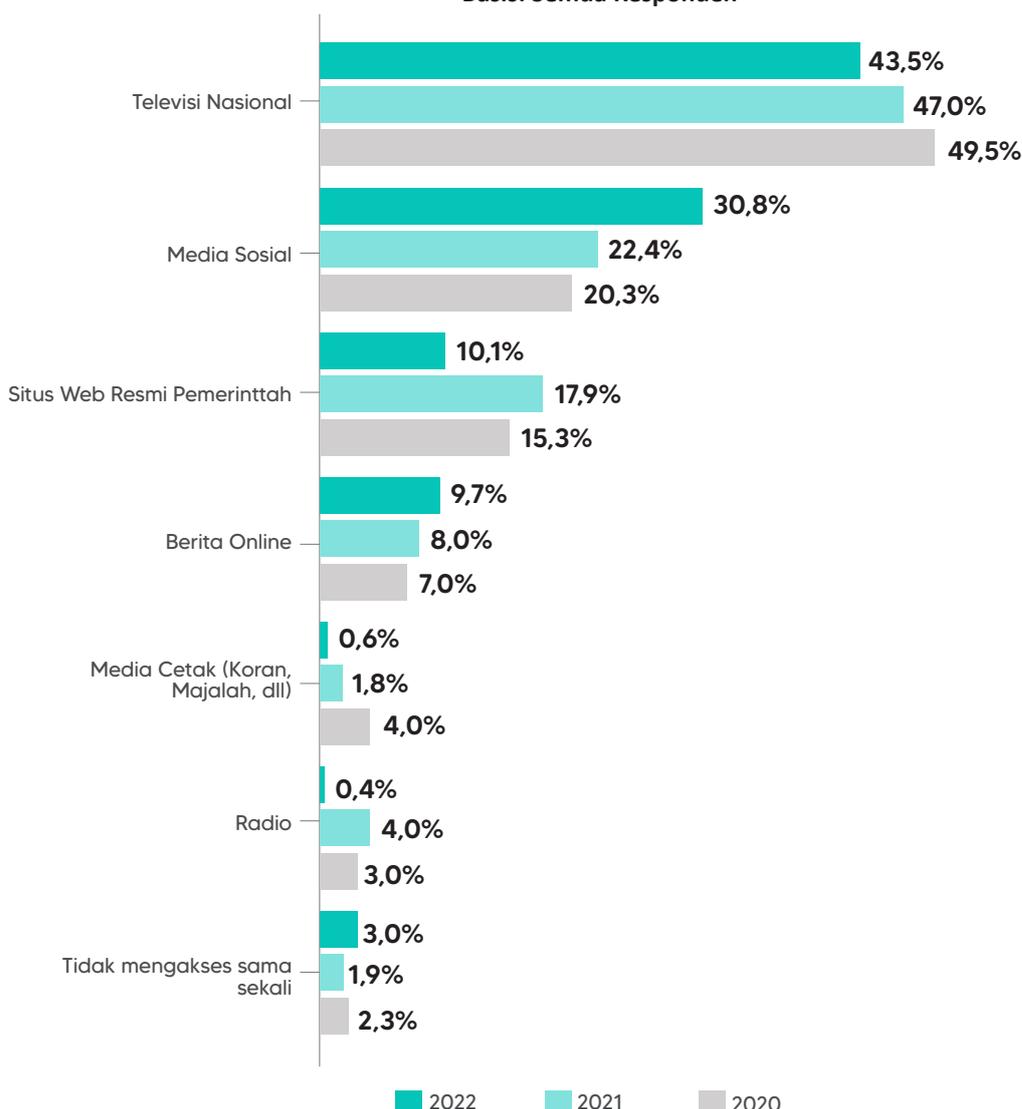


Dalam 3 tahun terakhir, terdapat kecenderungan sumber informasi *online* mengalami kenaikan kepercayaan (media sosial dan berita *online*). Sedangkan, media konvensional mengalami penurunan kepercayaan oleh responden (televisi nasional, media cetak, dan radio).

Meskipun ada kecenderungan penurunan jumlah responden yang mempercayai televisi sebagai sumber informasi di tahun 2022, namun media ini masih menjadi media yang paling banyak diakses oleh 43% responden. Media sosial secara konsisten menjadi sumber informasi terpercaya kedua selama tiga tahun terakhir. Persentase responden yang mempercayai media ini secara signifikan meningkat, dari 20,3% pada tahun 2020 menjadi 3,8% pada tahun 2022.

Gambar 11. Sumber Berita yang Paling Dipercayai

” Sebutkan sumber media yang paling Anda percaya untuk mendapatkan informasi? [SA] “
 Basis: Semua Responden

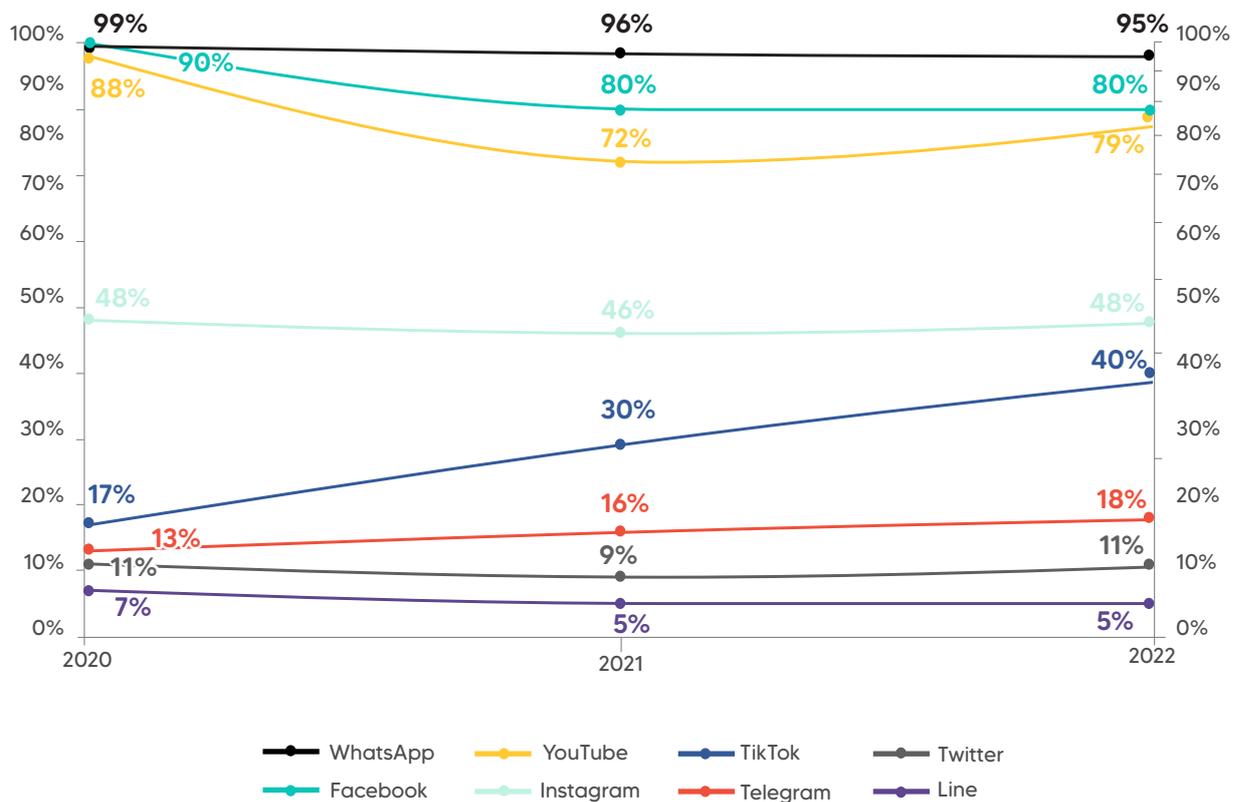


WhatsApp, Facebook, dan YouTube adalah tiga media sosial yang digunakan oleh lebih dari 70% responden selama tiga tahun terakhir. Bahkan, WhatsApp digunakan oleh hampir seluruh responden. Meski demikian, tampak adanya temuan menarik terkait TikTok. Pengamatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan persentase pengguna TikTok secara konsisten dan signifikan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya masih 17%. Angka ini naik menjadi 30% pada 2021 dan melonjak menjadi 40% di tahun 2022 ini.

Gambar 12. Akses Media Sosial

“Media sosial apa yang Anda akses/gunakan?” [SA]

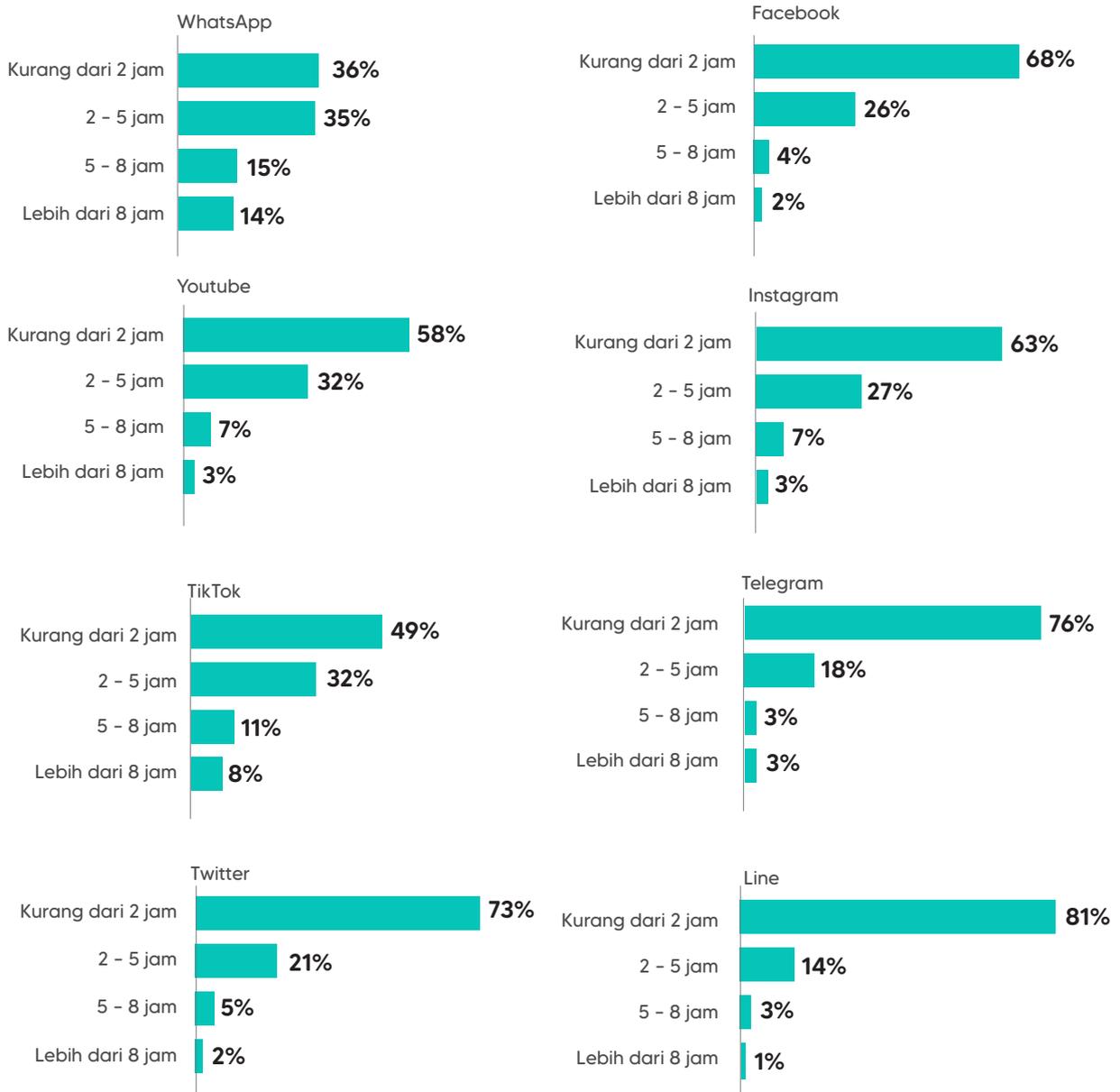
Basis: Seluruh responden



Intensitas penggunaan WhatsApp dalam sehari pun cenderung lebih tinggi dibandingkan media sosial lainnya. Pengguna WhatsApp yang mengakses selama 5 jam hingga lebih dari 8 jam per hari tampak lebih banyak dibandingkan penggunaan media sosial lainnya. TikTok berada di urutan kedua terkait persentase jumlah pengguna yang mengakses aplikasi ini selama 5 jam hingga lebih dari 8 jam.

Gambar 13. Durasi Akses Media Sosial

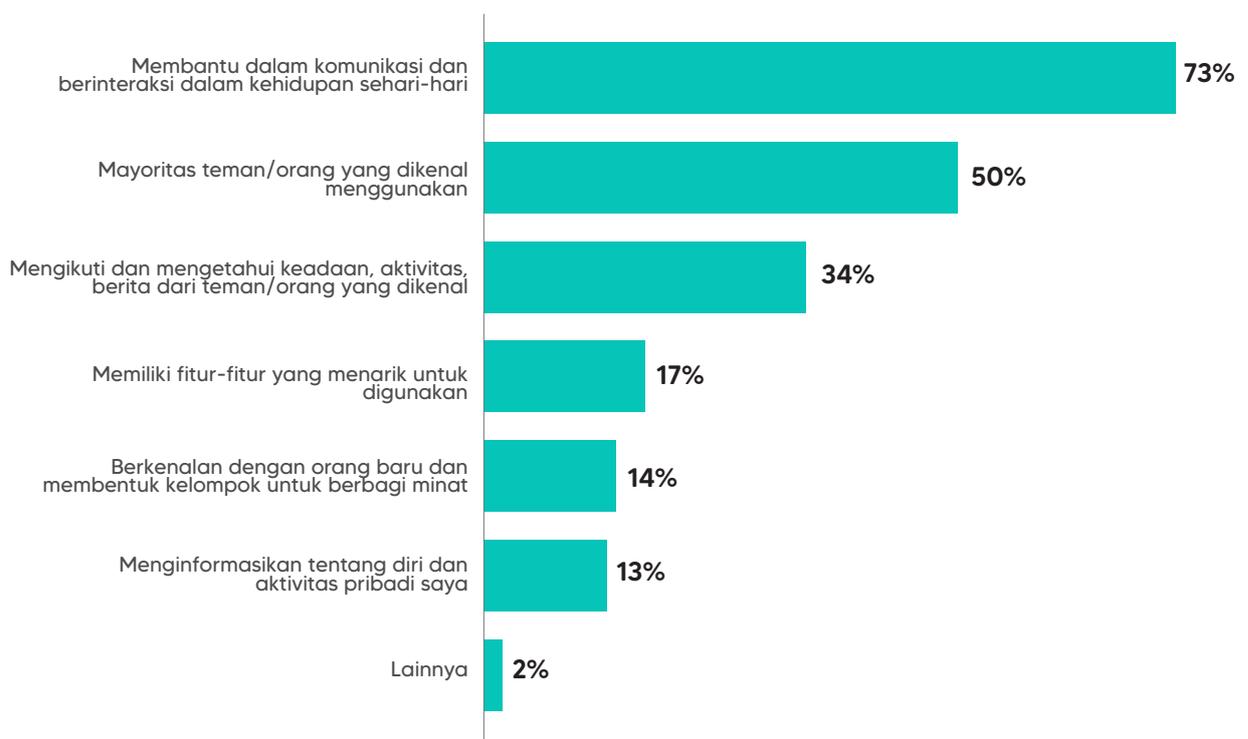
“Seberapa sering Anda mengakses media sosial tersebut dalam sehari?” [SA]
Basis: Responden yang memiliki media sosial



Bagi mayoritas responden, penggunaan media sosial membantu komunikasi dan interaksi sehari-hari. Mayoritas teman atau orang dikenal menggunakan media sosial merupakan alasan yang cukup banyak disebut oleh responden (50%) untuk menggunakan media sosial.

Gambar 14. Alasan Menggunakan Media Sosial

“Apa saja alasan Anda menggunakan media sosial?” [MA]
Basis: Responden yang memiliki media sosial

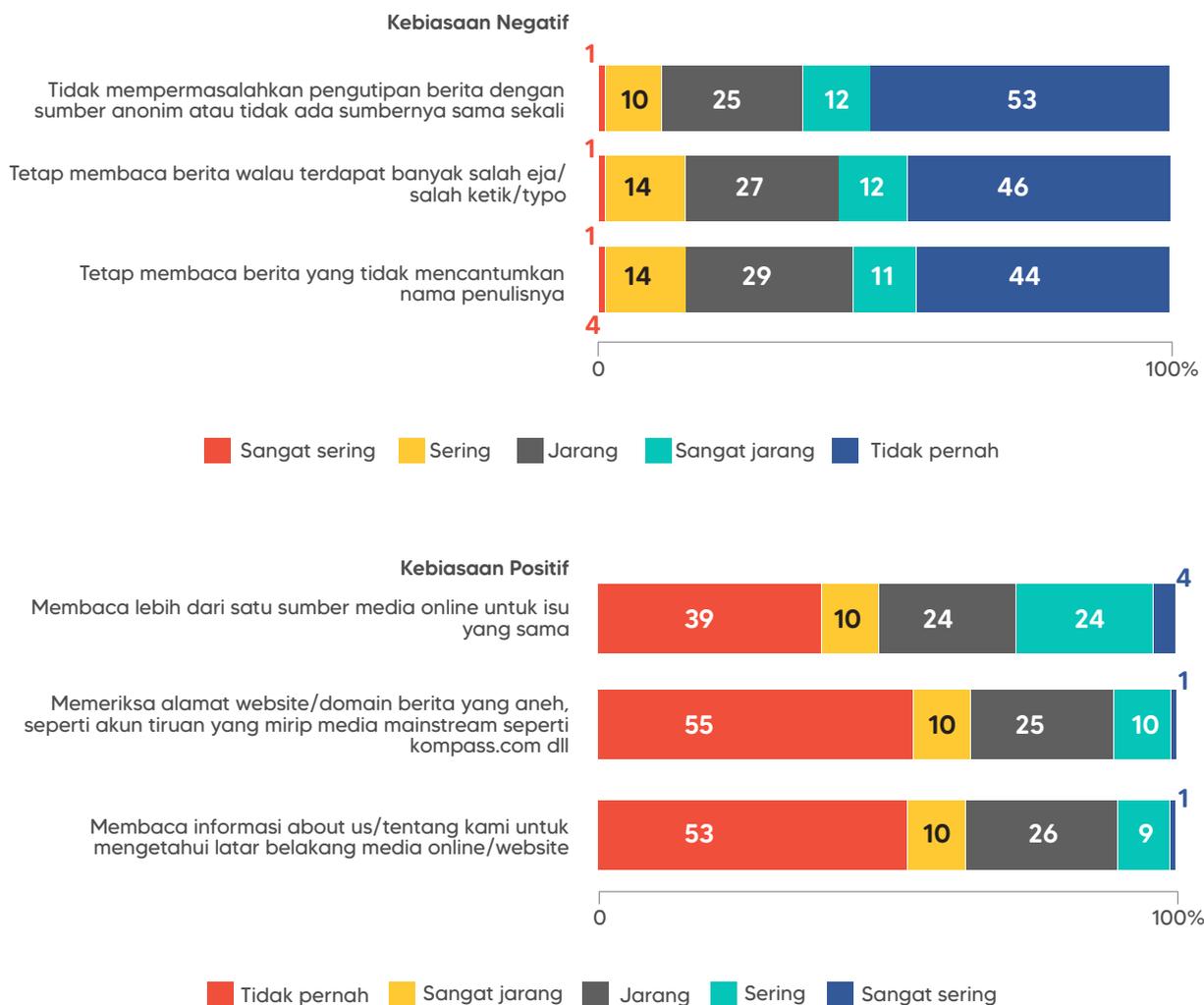


Dalam membaca berita *online*, responden lebih banyak melakukan kegiatan positif yaitu sebanyak 60%. Sisanya sering melakukan kegiatan negatif seperti tetap membaca berita yang tidak mencantumkan penulis, tetap membaca berita yang salah ejaan, dan tidak mempermasalahkan sumber anonim. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa mayoritas responden akan mempermasalahkan berita yang mengutip sumber anonim. Kebanyakan responden juga enggan membaca berita yang terlalu banyak salah ketik (*typo*) atau abai mencantumkan nama penulis.

Sebaliknya, tidak lebih dari 30% responden yang sering melakukan kebiasaan positif dalam membaca berita *online*, seperti membaca lebih dari satu sumber media *online* untuk isu yang sama, memeriksa domain yang aneh, serta membaca ‘*about us*’ untuk mengetahui latar belakang media.

Gambar 15. Kebiasaan Membaca Berita Online

“Apakah anda pernah melakukan hal di bawah ini saat membaca berita online?” [MA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



3.4.

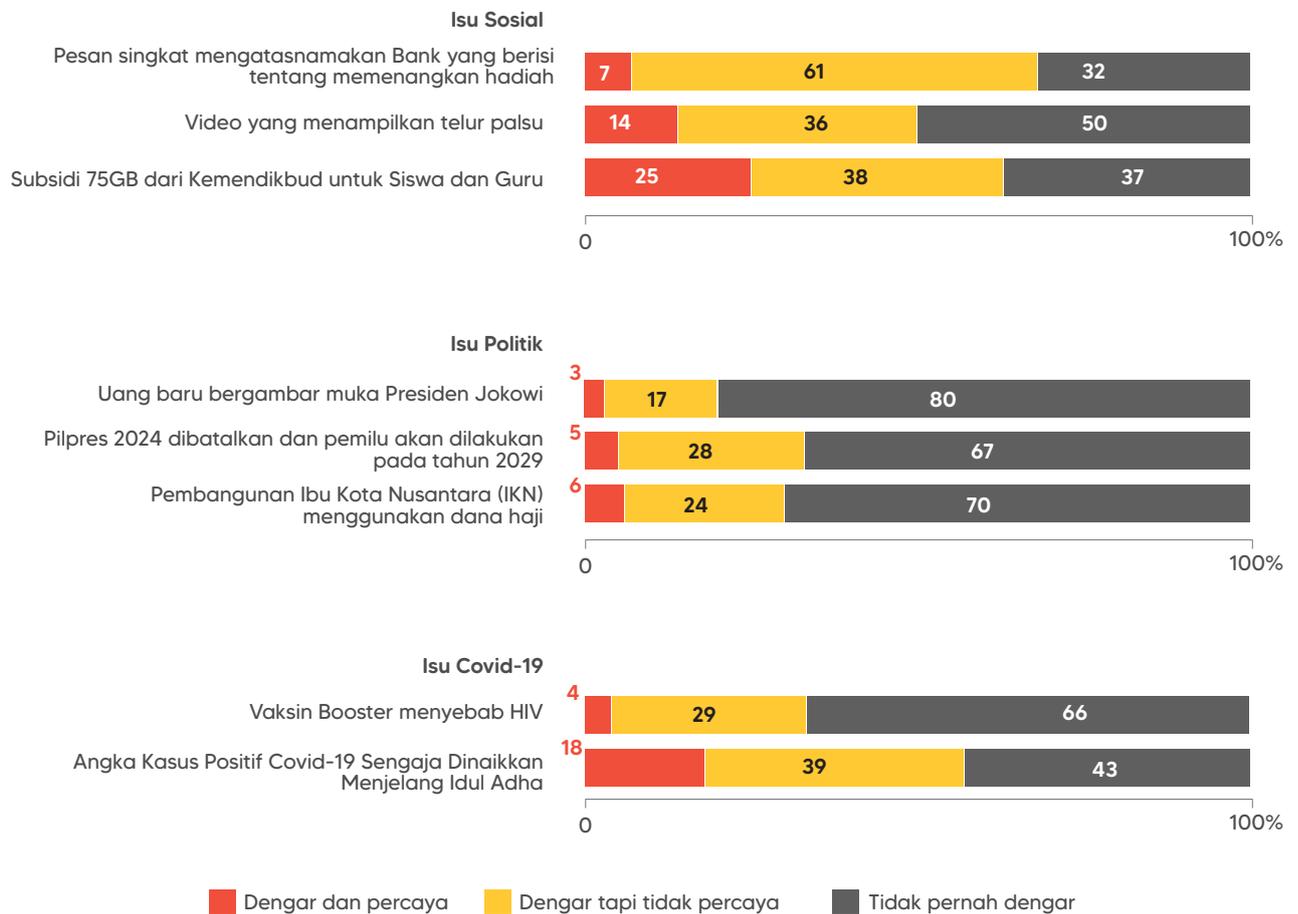
Kebiasaan Menghadapi Isu Hoaks

Di antara isu sosial, politik, dan Covid-19, responden di wilayah barat paling rentan mempercayai isu sosial. Sekitar 7%-25% responden di wilayah barat pernah mendengar dan percaya isu-isu sosial yang ditanyakan seperti tercantum pada grafik di bawah.

Pada isu-isu Covid-19, sekitar 4%-18% responden pernah mendengar dan percaya terhadap isu tersebut. Sementara pada isu politik, hanya sekitar 3%- 6% responden yang pernah mendengar dan percaya.

Gambar 16. Paparan Berita Hoaks

“Pernahkah Bapak/Ibu dengar dan percaya isu berikut:” [MA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



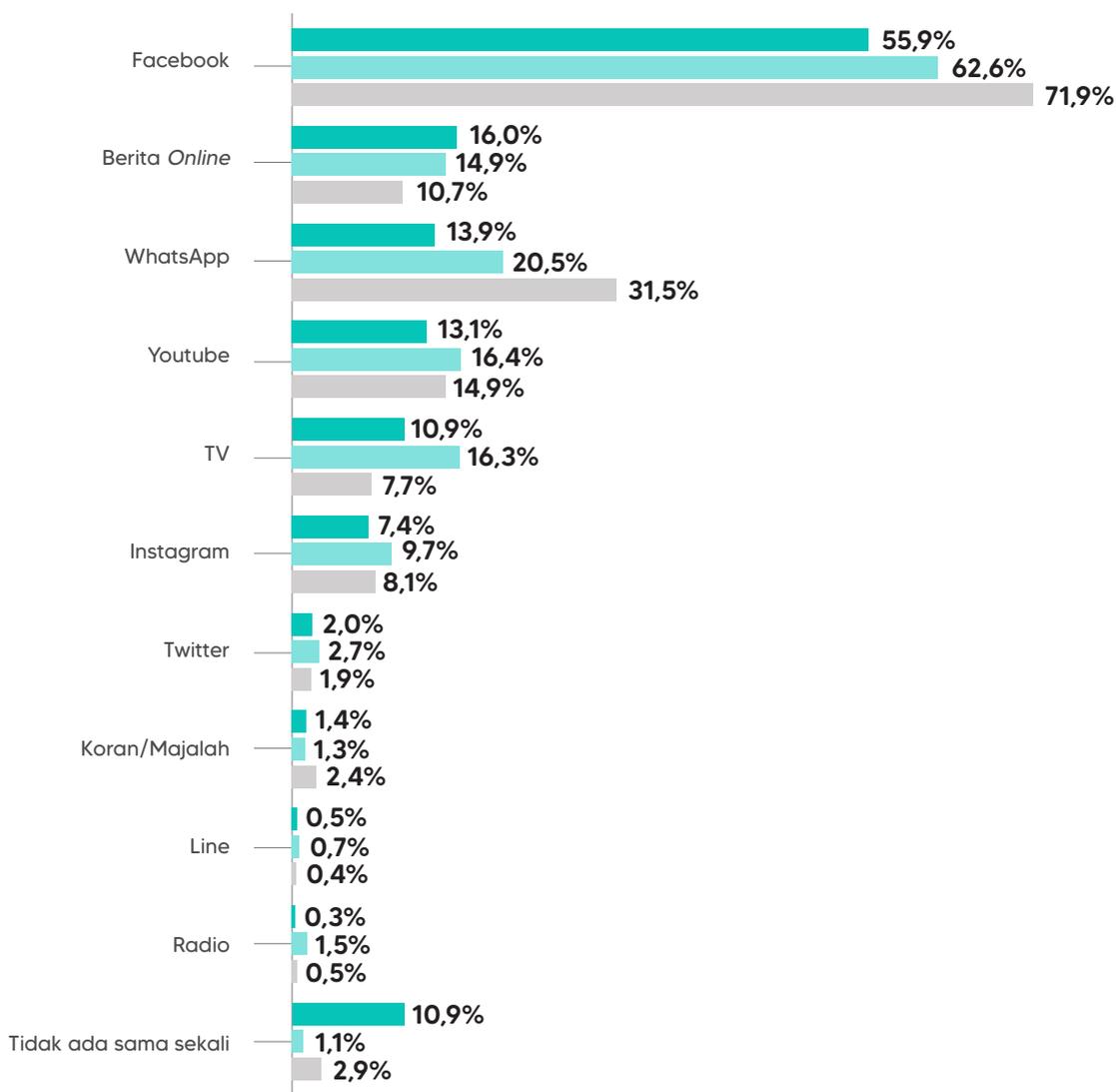
Sumber informasi yang sering menyajikan informasi hoaks dalam tiga tahun terakhir masih memiliki pola yang sama. Facebook merupakan media sosial yang dominan dalam menyajikan informasi hoaks. Proporsi Facebook turun secara signifikan dari 71,9% pada tahun 2020 menjadi 55,9% pada tahun 2022.

Begitu juga dengan WhatsApp yang mengalami penurunan signifikan dalam menyajikan berita hoaks. Angka tersebut turun tiga kali lipat dari 31,5% pada tahun 2020 menjadi 13,9 % pada tahun 2022.

Di sisi lain, berita *online* mengalami kenaikan persepsi dalam menyajikan isu hoaks. Pada tahun 2020 terdapat 10,7% responden menganggap sumber tersebut menyajikan berita hoaks, naik menjadi 16% pada tahun 2022.

Gambar 17. Sumber Informasi yang Sering Menyajikan Isu Hoaks

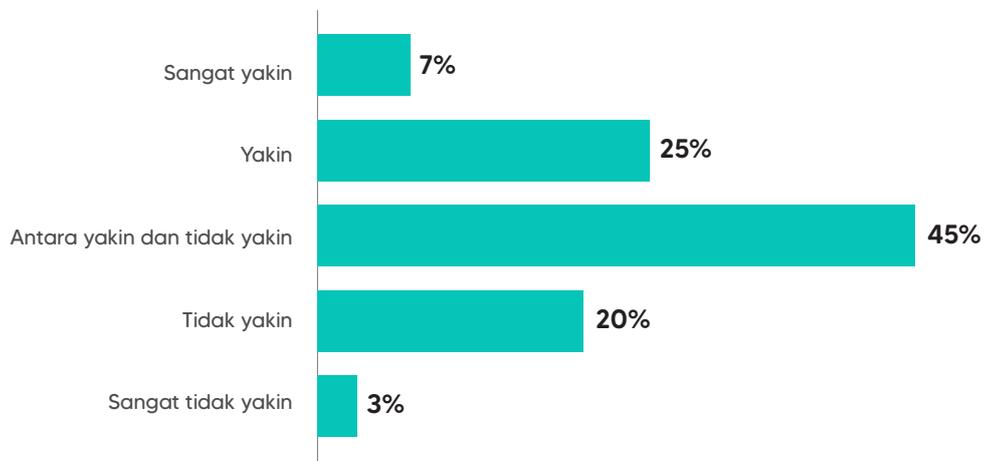
“Media manakah yang sering Anda temui menyajikan isu hoaks/informasi bohong?:” [SA]
 Basis: Seluruh responden (n=10.000)



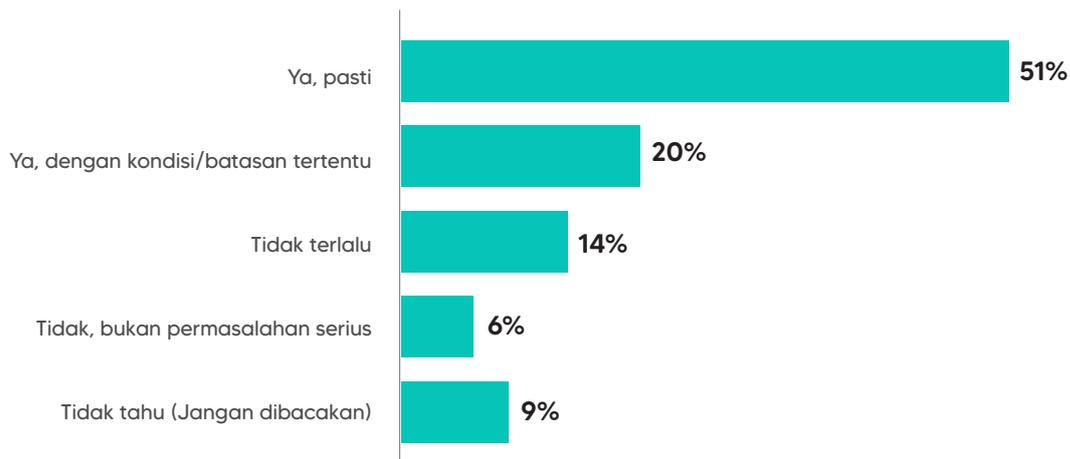
Sebagian besar responden masih ragu terhadap kemampuan mereka mengidentifikasi hoaks. Hanya 32% yang merasa yakin atau pun sangat yakin dapat mengidentifikasi hoaks. Mayoritas menganggap bahwa keberadaan berita atau informasi yang salah/tidak sesuai fakta/hoaks merupakan permasalahan serius.

Gambar 18. Kemampuan Identifikasi Berita Hoaks

“Seberapa yakin Anda dapat mengidentifikasi/mengenali berita atau informasi yang salah/tidak sesuai fakta bahkan berita bohong/hoaks?” [SA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



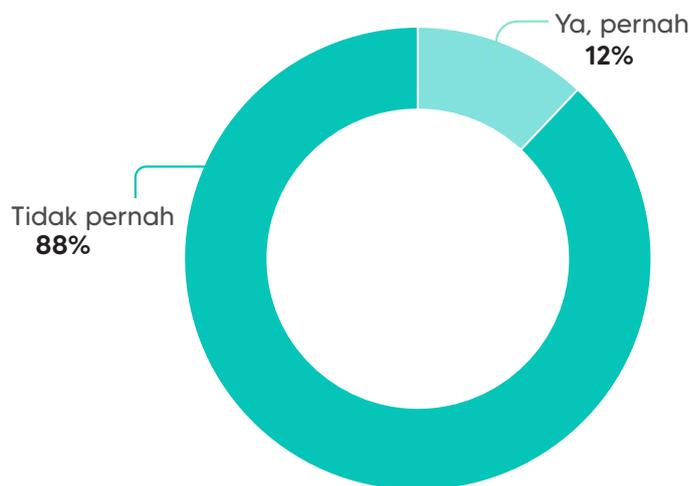
“Menurut Anda apakah keberadaan berita atau informasi yang salah/tidak sesuai fakta/hoaks adalah merupakan permasalahan serius?” [SA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



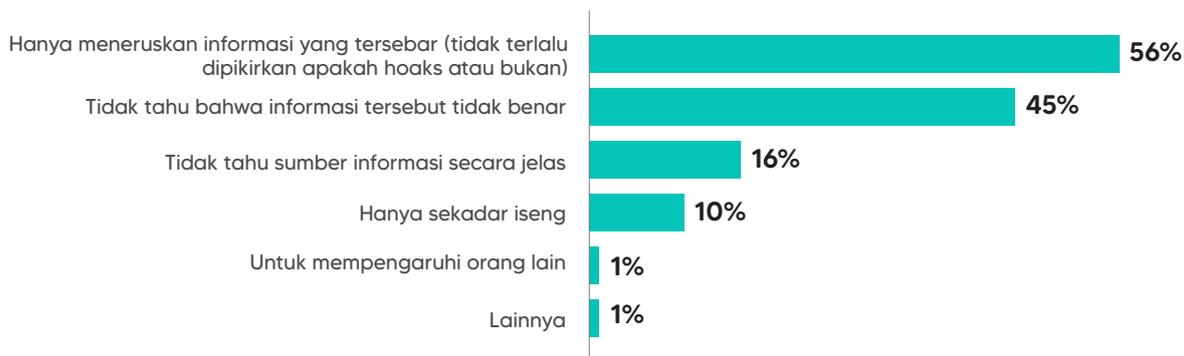
Setidaknya 12% responden mengaku pernah menyebarkan berita hoaks. Mereka mayoritas beralasan hanya meneruskan berita yang sudah tersebar (tanpa memikirkan hoaks atau bukan). Sebagian besar responden (45%) juga tidak tahu bahwa berita tersebut ternyata hoaks.

Gambar 19. Pengalaman Menyebarkan Hoaks

“Apakah Anda pernah menyebarkan berita atau informasi yang di kemudian hari ternyata memiliki isu hoaks/berita bohong?” [SA]
Basis: Seluruh responden (n=10.000)



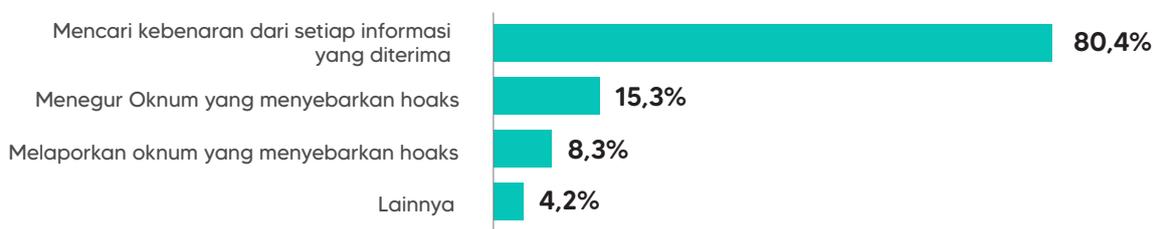
“Apakah alasan Anda menyebarkan berita atau informasi tersebut?” [MA]
Basis: Responden yang pernah menyebarkan hoaks



Dalam upaya untuk mencegah penyebaran berita hoaks, 80,4% responden akan melakukan pencarian kebenaran informasi yang diterima. Apabila ternyata terdapat berita hoaks yang diterima oleh responden maka 15,3% responden akan menegur dan 8,3% akan melaporkan pada platform media tersebut.

Gambar 20. Upaya Pencegahan Penyebaran Hoaks

“Apa yang Anda lakukan demi mencegah penyebaran hoaks/informasi bohong?”
Basis: Seluruh responden (n=10.000)

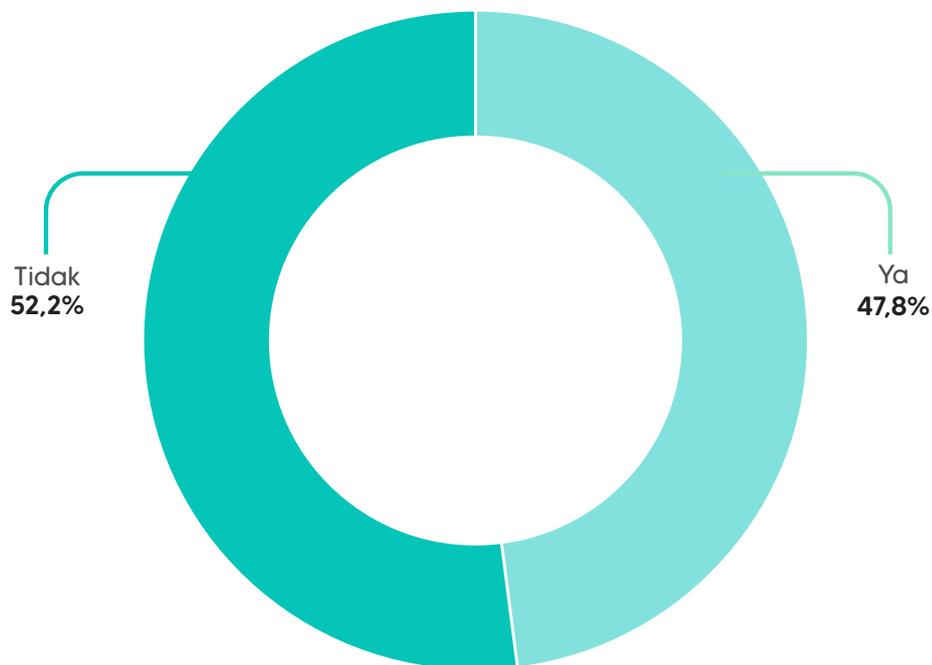


Di sisi lain, walaupun responden merasa penting untuk dapat mencari kebenaran informasi yang diterima, namun belum jadi kebiasaan dalam mencerna informasi yang diterima. Hanya sekitar 48% responden akan mengecek pada tiap gambar, video, berita, situs, dan *post* di sosial media.

Gambar 21. Pengecekan Informasi yang Diterima

“Apakah anda mengecek informasi (gambar,video, berita, situs, dan post sosial media) yang Anda terima:”

Basis: Seluruh responden (n=10.000)



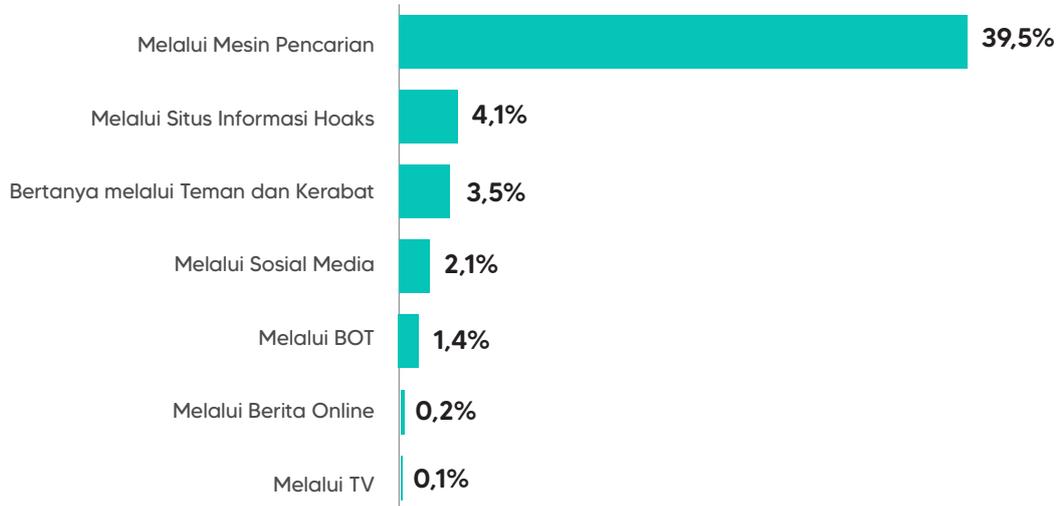
Bagi mereka yang selalu mengecek informasi yang diterima, sebagian besar yakni sebesar 39,5% akan mengkonfirmasi kebenaran berita melalui mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan Yandex. Sedangkan media lain seperti situs pencarian hoaks memiliki proporsi sebesar 4,1% seperti Turnbackhoax.id, Cekfakta.com, dan Trustpositif.kominfo.go.id.

Selain media tersebut, bertanya melalui teman dan kerabat seperti keluarga, guru, tetangga, dan tokoh yang dipercayai memiliki proporsi 3,5% yang merupakan lebih besar dari bagi mereka yang mengecek melalui media sosial (2,1%), BOT WA Mafindo, BUyaya menghentikan penyebaran hoaks dilakukan oleh berbagai macam aktor. Sebagian responden menganggap lembaga negara punya peran penting dalam upaya penyebaran hoaks seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (52%), TNI/Polri (23%), Presiden (14%), dan BIN (3%)

Gambar 22. Cara Mengecek Berita dan Informasi

“Bagaimana Anda mengecek informasi tersebut (pilihan jawaban tidak usah diberikan pada responden [SA])

Basis: Responden yang selalu mengecek informasi



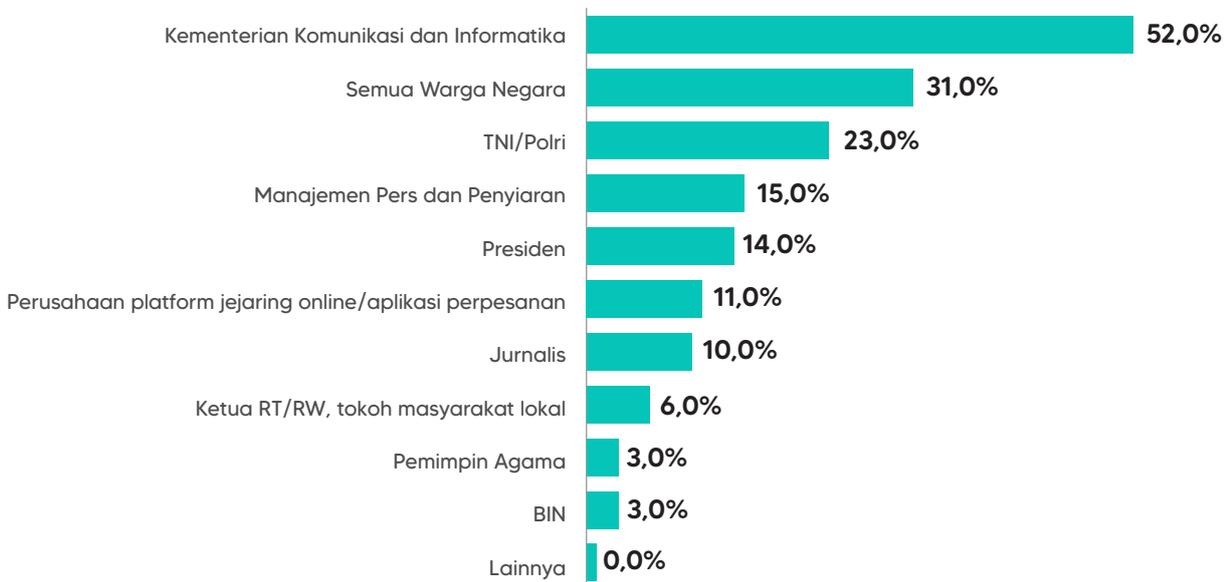
Upaya menghentikan penyebaran hoaks dilakukan oleh berbagai macam aktor. Sebagian responden menganggap lembaga negara punya peran penting dalam upaya penyebaran hoaks seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (52%), TNI/Polri (23%), Presiden (14%), dan BIN (3%)

Namun, sebagian responden juga menanggapi bahwa pada tiap lapisan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memberantas penyebaran informasi hoaks, seperti semua warga negara (31%), tokoh masyarakat (6%), dan pemimpin agama (3%).

Gambar 23. Pihak yang Paling Bertanggung Jawab dalam Memberantas Informasi Hoaks

“Manakah dari lembaga dan aktor media berikut yang harus bertindak untuk menghentikan penyebaran hoaks?”

Basis: Responden yang selalu mengecek informasi





04

Indeks Literasi Digital

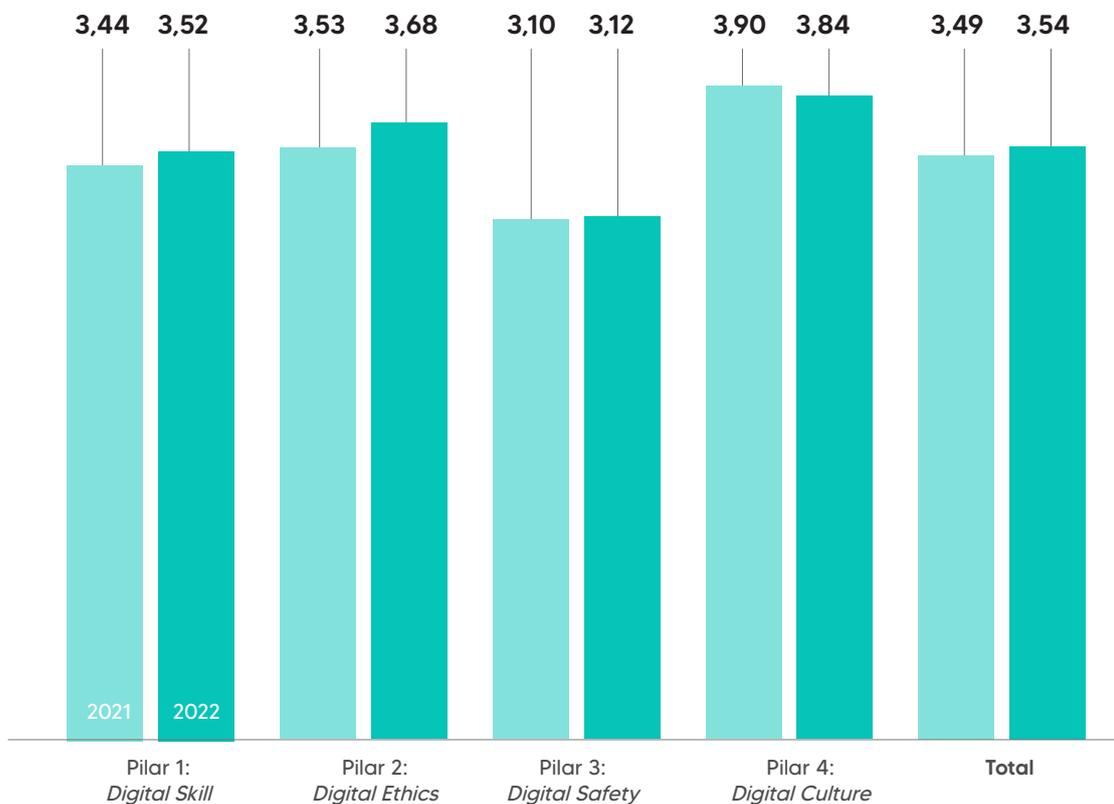


4.1

Indeks Literasi Digital Nasional

Indeks Literasi Digital Nasional pada 2022 naik sebesar 0,05 poin menjadi 3,54 dari capaian indeks di tahun 2021. Ada tiga pilar yang meningkat, yaitu Pilar 1 (*Digital Skill*) naik sebesar 0,08 poin, Pilar 2 (*Digital Ethics*) naik sebesar 0,15 poin, dan Pilar 3 (*Digital Safety*) naik 0,02 poin. Namun Pilar 4 (*Digital Culture*) menurun sebesar 0,06 poin.

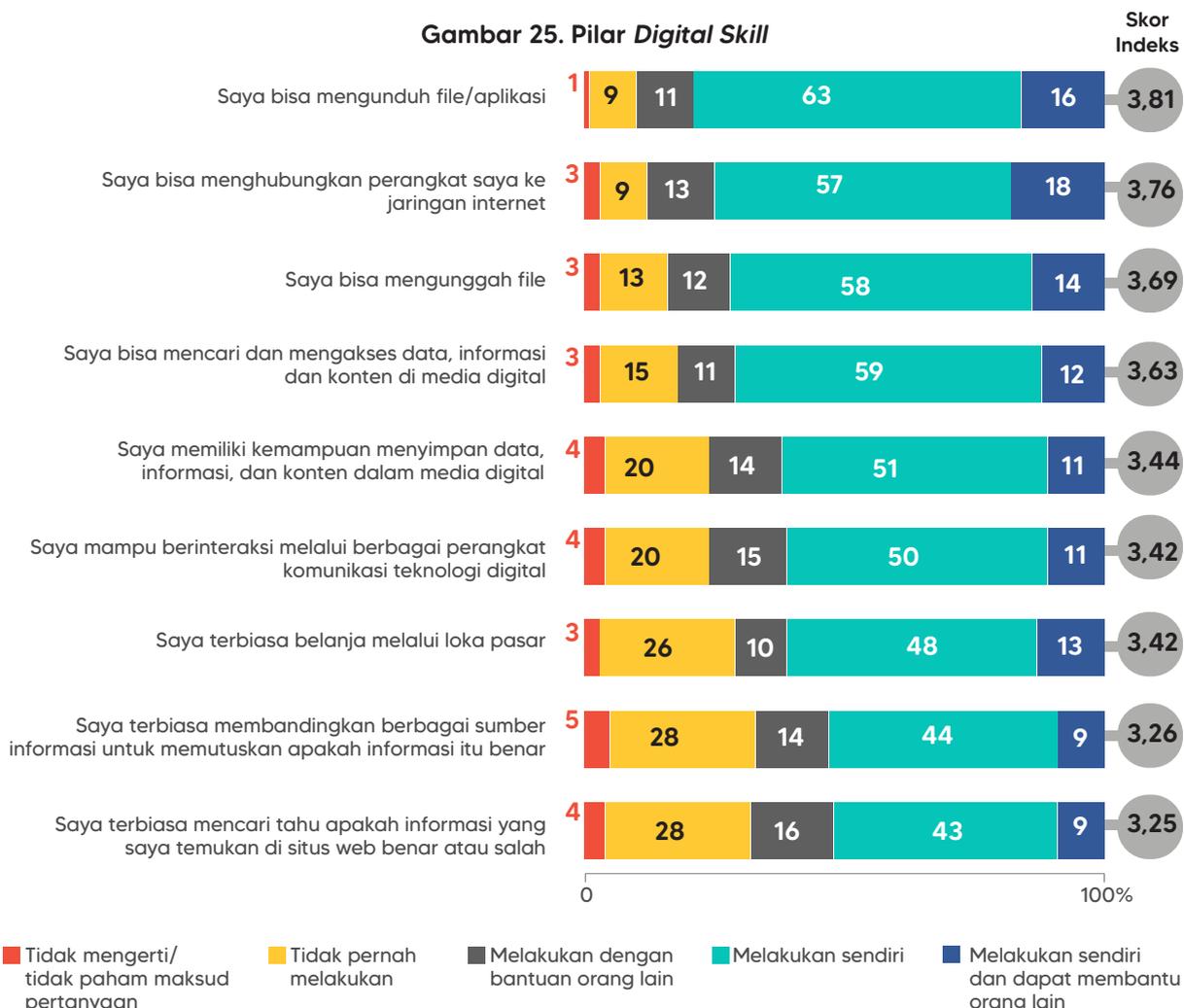
Gambar 24. Indeks Literasi Digital 2021-2022



4.1.1.

Digital Skill

Digital Skill merupakan salah satu pilar pada Indeks Literasi Digital 2022 yang meningkat. Salah satu indikator yang paling tinggi dalam pilar ini adalah kemampuan untuk mengunduh file. Adapun indikator yang paling rendah adalah kemampuan untuk mencari informasi yang ditemukan apakah benar atau salah



Pola pada pilar ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Secara umum urutan pada tiap indikator memiliki urutan yang sama walaupun terdapat kecenderungan penurunan pada tiap indikator pada indikator teratas. Seperti penyesuaian cara berkomunikasi agar kedua pihak tidak tersinggung mengalami penurunan dari 3,82 (tahun 2021) menjadi 3,81 (tahun 2022).

Sedangkan indikator dengan nilai indeks terendah cenderung mengalami kenaikan. Seperti keterbiasaan mencari tahu apakah informasi yang ditemukan di website benar atau salah naik dari 3,05 (tahun 2021) menjadi 3,25 (pada 2022).

Walaupun secara umum terdapat kenaikan indikator, namun pengetahuan responden mengenai perangkat keras dan lunak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pengetahuan perangkat keras mengalami sedikit penurunan dari 49% menjawab benar, menjadi 42% menjawab benar. Begitu juga pengetahuan tentang perangkat lunak yang mengalami penurunan dari 48% menjawab benar, menjadi 45% menjawab benar.

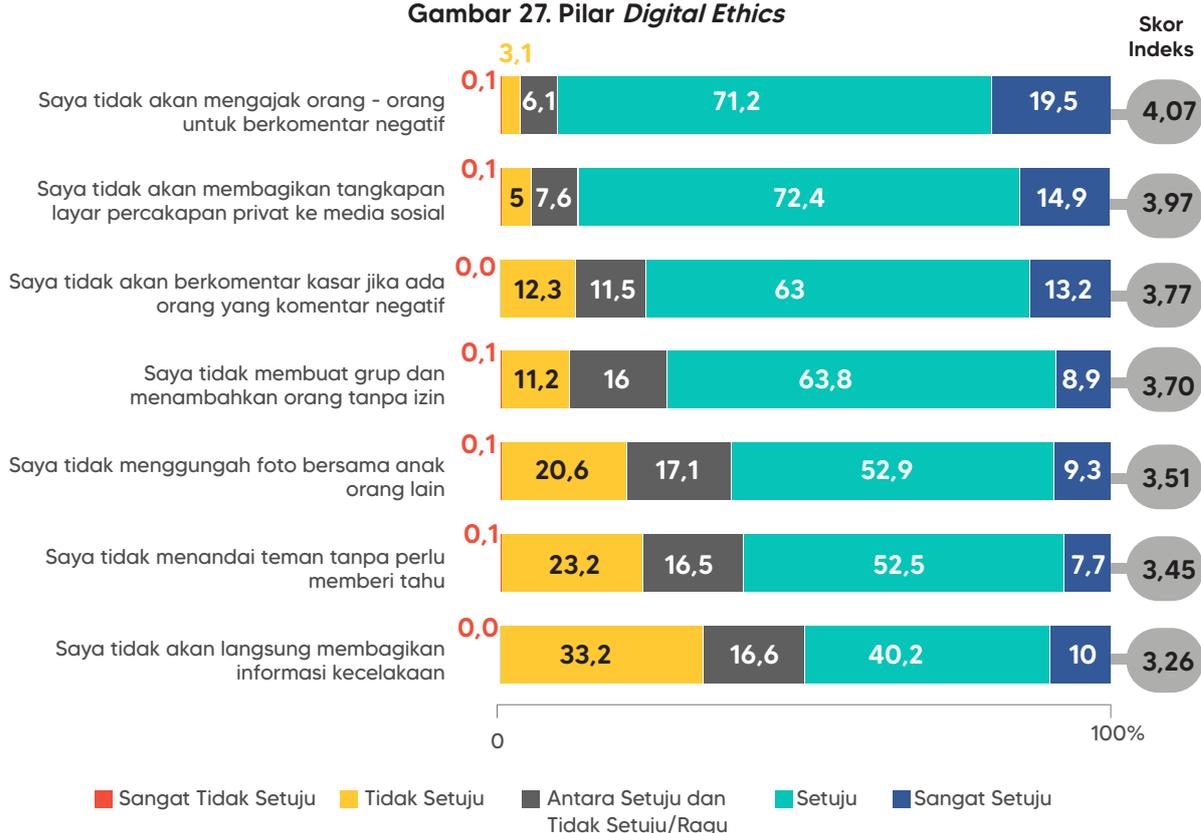
Gambar 26. Pengetahuan tentang Perangkat Digital



4.1.2.

Digital Ethics

Digital Ethics menjadi pilar yang skornya naik signifikan dan paling besar di antara pilar lain. Kontribusi kenaikan pilar ini berasal dari beberapa indikator yang memiliki nilai tinggi, seperti mengajak orang untuk tidak berkomentar negatif (indeks 4,07) dan tidak membagikan tangkapan layar di media sosial (indeks 3,97). Adapun indikator dengan indeks terendah adalah responden yang tidak akan membagikan langsung informasi kecelakaan.

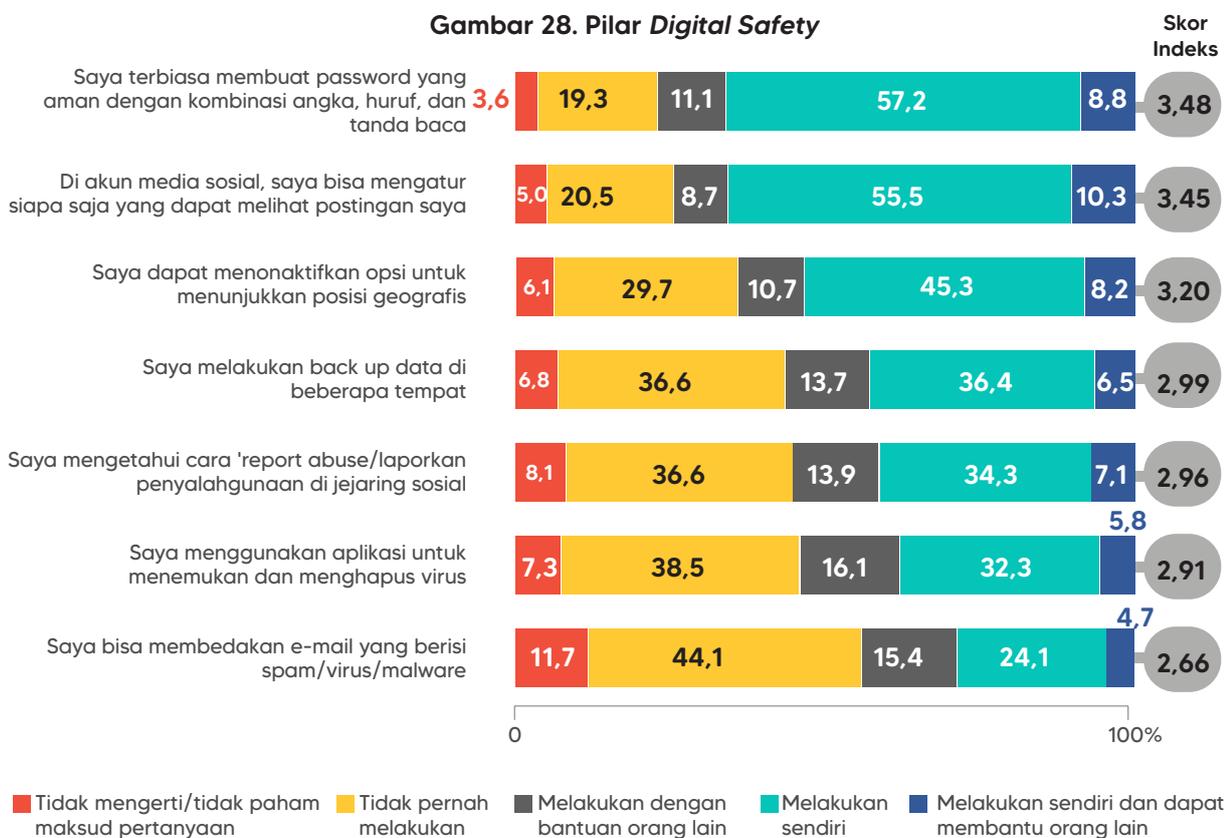
Gambar 27. Pilar *Digital Ethics*

4.1.3.

Digital Safety

Digital Safety merupakan salah satu pilar yang mengalami kenaikan paling sedikit. Pada pilar ini, sebagian besar dikontribusikan pada indikator terbiasa membuat password yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. Sedangkan indikator kemampuan membedakan e-mail berisi spam/virus/malware berkontribusi paling kecil.

Gambar 28. Pilar Digital Safety

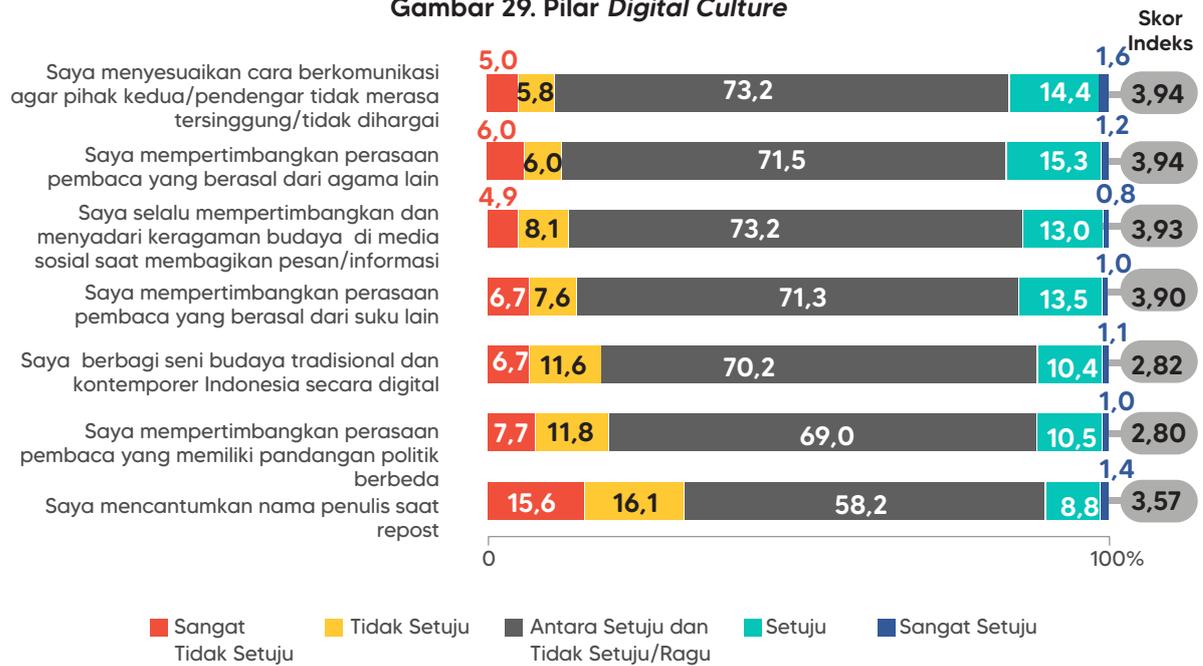


4.1.4.

Digital Culture

Digital Culture merupakan satu-satunya pilar yang indeksnya menurun dari tahun sebelumnya walaupun secara umum masih menjadi pilar dengan nilai tertinggi. Pada pilar ini, sebagian besar memiliki indeks di antara 3,8-3,9. Hanya satu indeks yang memiliki nilai di bawah rentang tersebut, yaitu mencantumkan nama penulis saat *reply*, yaitu pada skor 3,57.

Gambar 29. Pilar Digital Culture

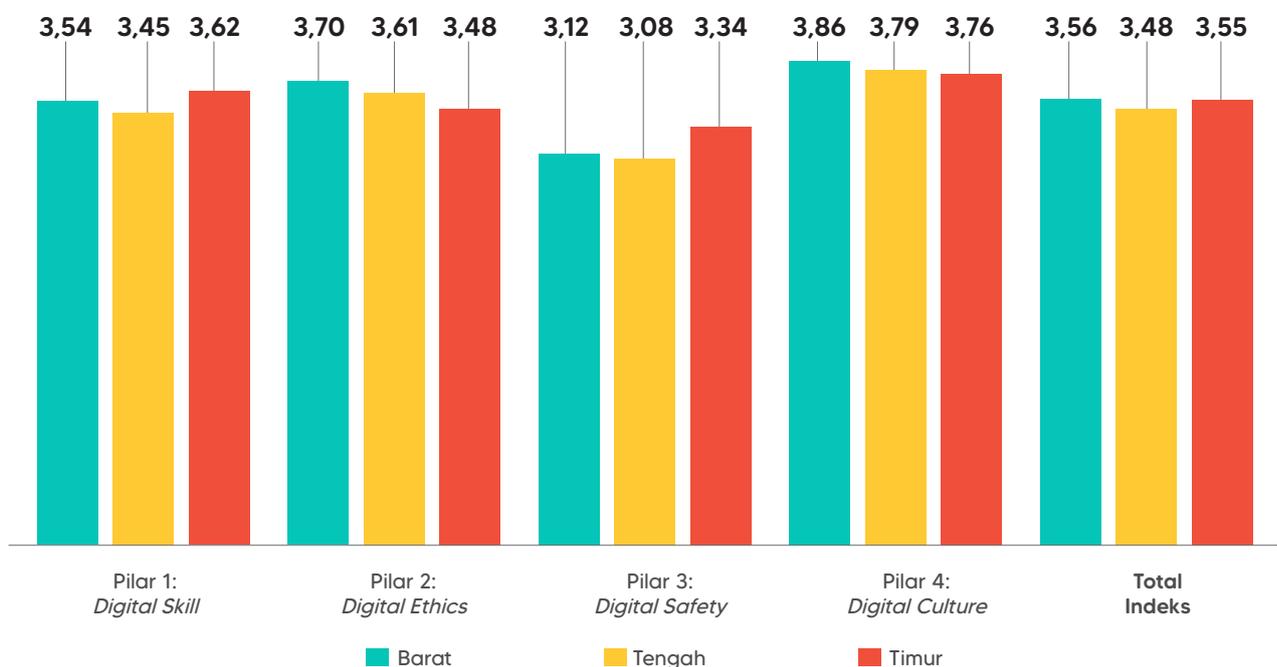


4.2.

Indeks Literasi Digital Berdasarkan Wilayah

Indeks Literasi Digital yang dibagi berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa secara umum Indonesia Barat unggul dibandingkan wilayah lainnya. Adapun Indonesia Tengah merupakan daerah yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Indonesia Barat unggul pada *Digital Ethics* dan *Digital Culture*, sedangkan Indonesia Timur Unggul pada *Digital Skill* dan *Digital Safety*.

Gambar 30. Pilar berdasarkan Wilayah



Di sisi lain, indeks berdasarkan provinsi menunjukkan bahwa D.I Yogyakarta memiliki nilai Indeks Literasi Digital paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Nilai ini serupa dengan tahun sebelumnya, yakni menduduki peringkat pertama.

Beberapa provinsi masih berada di 10 besar daerah dengan indeks terbesar, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Namun juga terjadi pergeseran provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Empat wilayah di Pulau Jawa menunjukkan perubahan signifikan pada tahun ini dengan berada pada posisi 10 besar provinsi yang memiliki nilai indeks terbesar di Tanah Air.

Table 4. 15 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2022	3,54	Skor Indeks 2021	3,49

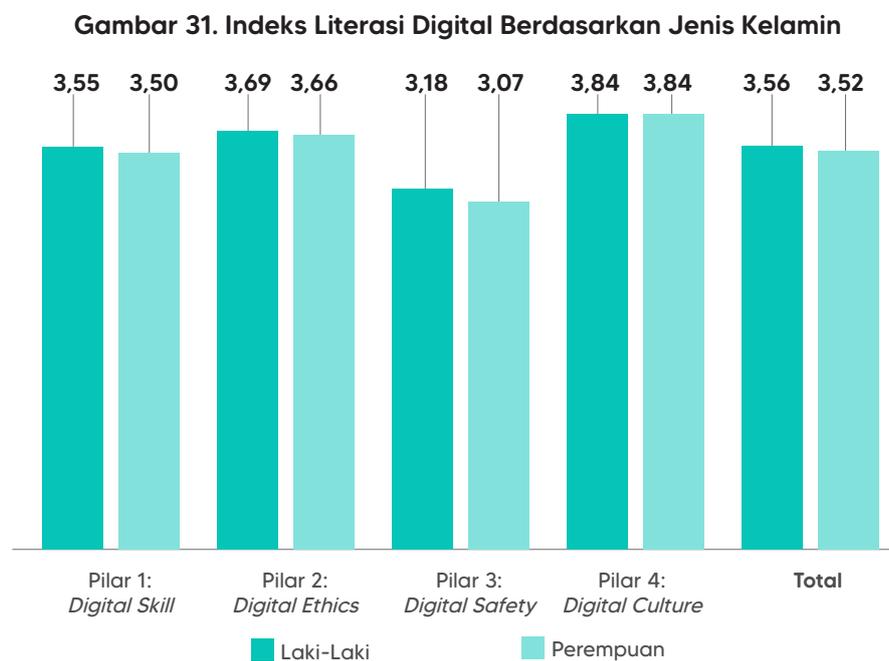
Selama periode 2021 dan 2022, tampak terlihat bahwa terdapat kenaikan peringkat semua provinsi di Pulau Jawa (kecuali DI Yogyakarta). Begitu juga semua provinsi di Indonesia Timur (kecuali Papua Barat) mengalami kenaikan.

Kenaikan dengan skor tertinggi dialami oleh Maluku Utara (kenaikan 0,31), Papua (kenaikan 0,18), dan Jawa Tengah (kenaikan 0,15). Sedangkan daerah dengan penurunan tertinggi berada pada provinsi Kalimantan Utara (-0,35), Gorontalo (-0,26), dan Sulawesi Barat (-0,25).

4.3.

Indeks Literasi Digital Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik di bawah ini, diketahui bahwa laki-laki memiliki Indeks Literasi Digital tertinggi di semua pilar. Akan tetapi, pada pilar *Digital Culture*, laki - laki dan perempuan memiliki nilai indeks literasi digital yang sama.



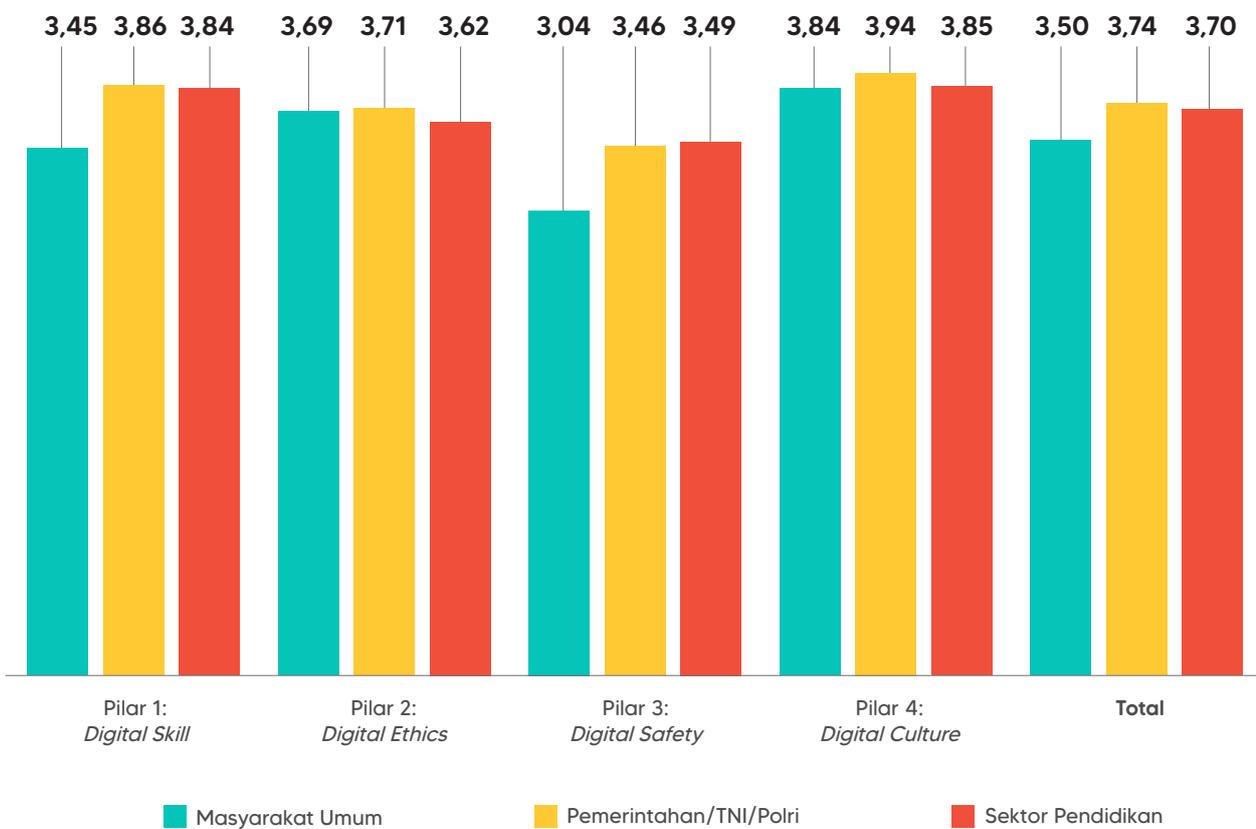
4.4.

Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat

Pada sub-bab ini akan dilihat bagaimana status literasi digital berdasarkan segmentasi. Pertama, segmen pendidikan terdiri dari tenaga pendidik (dosen dan guru) dan siswa dan mahasiswa. Kedua, segmen pemerintah/TNI/Polri terdiri dari tenaga kerja ASN non tenaga pendidik, TNI, dan Polri. Ketiga, segmen masyarakat umum terdiri dari kelompok masyarakat di luar sektor pendidikan dan Pemerintah/TNI/Polri.

Hasil survei menunjukkan segmen pemerintahan/TNI/Polri memiliki skor indeks tinggi sebesar 3,74. Sementara pekerja dan pelajar di segmen pendidikan memiliki skor indeks 3,70 dan segmen masyarakat umum memiliki skor indeks 3,5.

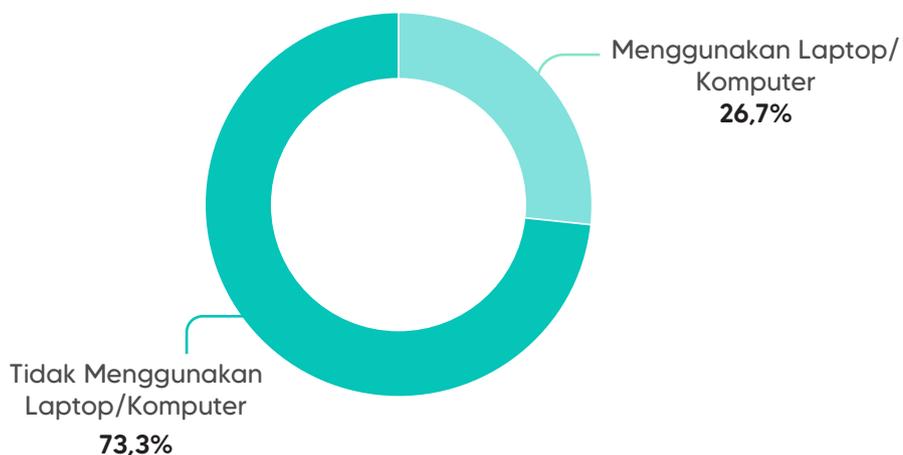
Gambar 32. Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat



Penggunaan komputer dan laptop belum menjadi bagian dari pekerjaan sebagian besar responden. Mereka yang bekerja dan menggunakan komputer/laptop hanya sebesar 26,67 %. Sebanyak 73,33% di antaranya belum menggunakan perangkat tersebut.

Gambar 33. Penggunaan Perangkat Digital untuk Bekerja

“Apakah Anda menggunakan komputer/laptop Anda untuk pekerjaan/sekolah Anda? [SA]”
 Basis: responden yang bekerja (n=5.065)

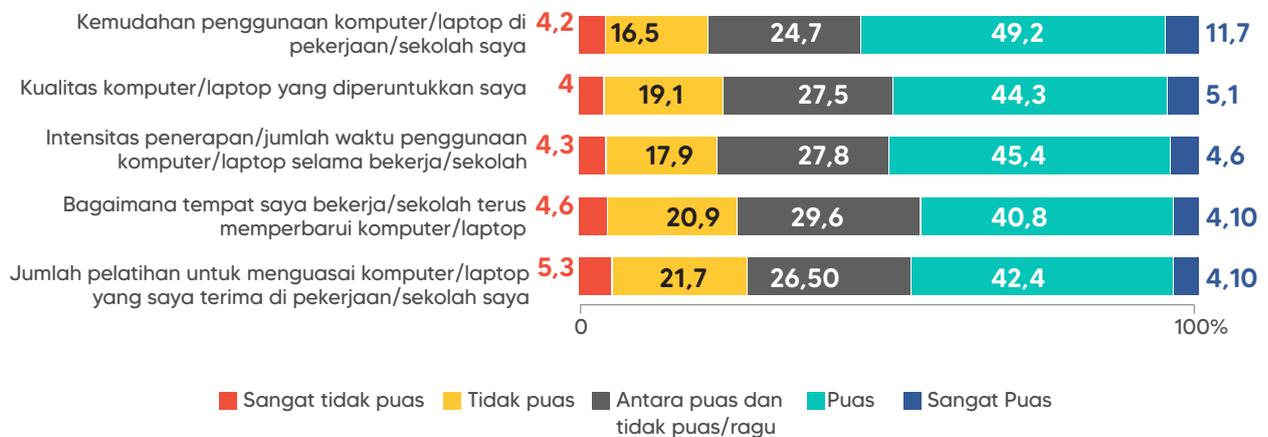


Sedangkan bagi mereka yang menggunakan laptop untuk bekerja, kurang dari 30% dari responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas. Hal ini terlihat dari data di bawah ini menunjukkan bahwa hampir separuh respons merasa puas dan sangat puas. Nilai kepuasan tertinggi secara umum adalah kemudahan penggunaan komputer/laptop di pekerjaan/sekolah. Sedangkan nilai terendah berada pada indikator jumlah pelatihan untuk menguasai komputer/laptop yang dirasa kurang.

Gambar 34. Kepuasan Perangkat Digital untuk Bekerja

“Bagaimana penilaian Anda mengenai penggunaan [MA]”

Basis: responden yang bekerja (n=1.368)

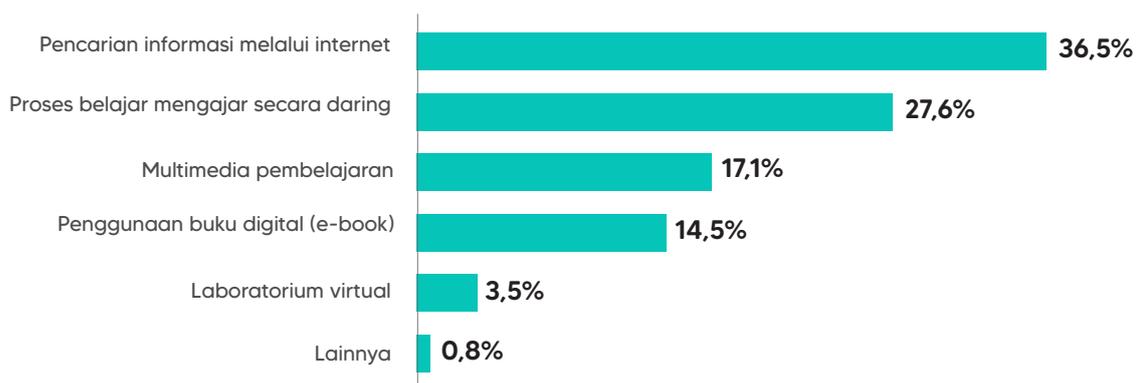


Penggunaan internet pada pekerja sektor pendidikan sebagian besar pada penggalian informasi melalui internet, yaitu sebesar 36,5 %. Aktivitas lainnya seperti proses belajar dan mengajar secara daring dan multimedia pembelajaran sebesar masing-masing 27,6% dan 17,1%. Sedangkan penggunaan laboratorium virtual masih sangat rendah yakni sebesar 3.5%.

Gambar 35. Penggunaan Perangkat Digital untuk Bekerja

“Apa saja penggunaan teknologi digital yang sudah diterapkan dalam pekerjaan anda? [MA]”

Basis: responden tenaga pengajar

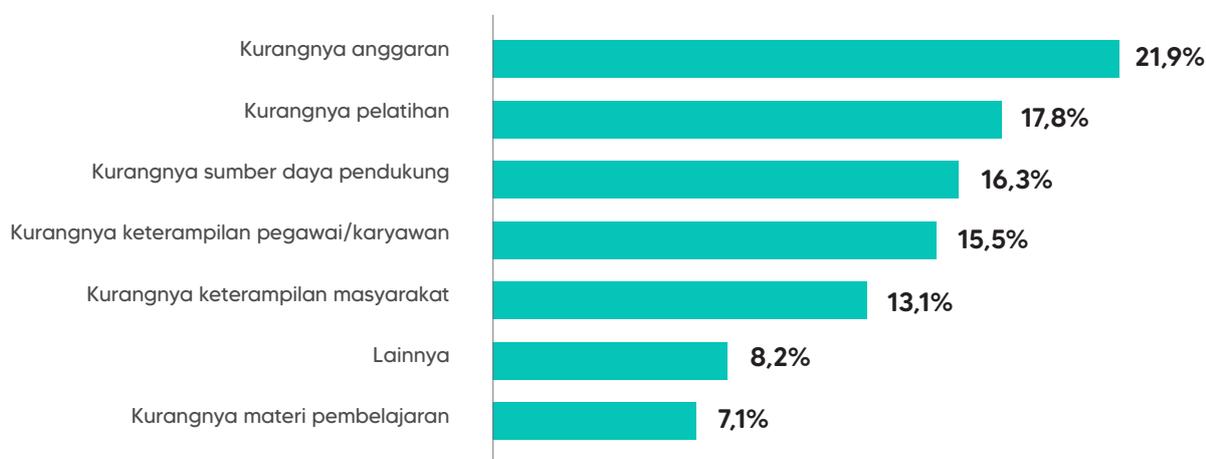


Namun kepuasan yang besar bagi para pekerja yang menggunakan perangkat digital masih dapat hal-hal yang dianggap sebagai faktor penghambat. Lebih dari separuh responden menganggap kurangnya anggaran (21,9%), kurangnya pelatihan (17,6%), dan kurangnya sumber daya pendukung (16,3%) menjadi faktor-faktor dominan dalam menghambat pekerjaan dengan menggunakan perangkat digital.

Gambar 36. Hambatan Terhadap Penggunaan Komputer di Pekerjaan

“Menurut Anda apa saja faktor yang menghambat penggunaan teknologi digital untuk pekerjaan/sekolah Anda? [MA]”

Basis: responden yang bekerja (n=1.368)

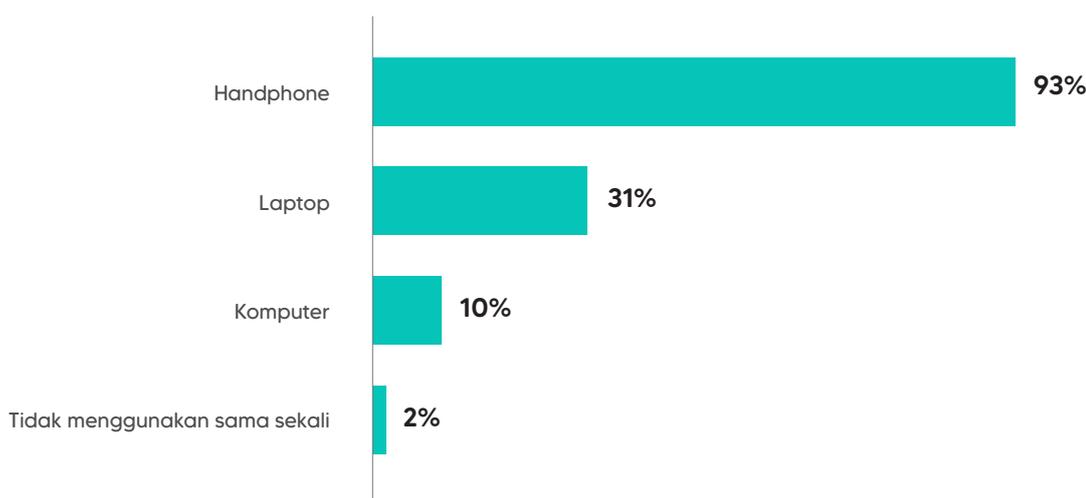


Sedangkan bagi pelajar, penggunaan *handphone* menjadi perangkat digital yang paling sering digunakan dibandingkan dengan laptop/komputer. Sebagian besar siswa, yaitu 93%, menggunakan *handphone* untuk belajar. Hanya sedikit yakni 2% responden yang tidak menggunakan perangkat digital sama sekali.

Gambar 37. Penggunaan Perangkat Digital untuk Pembelajaran

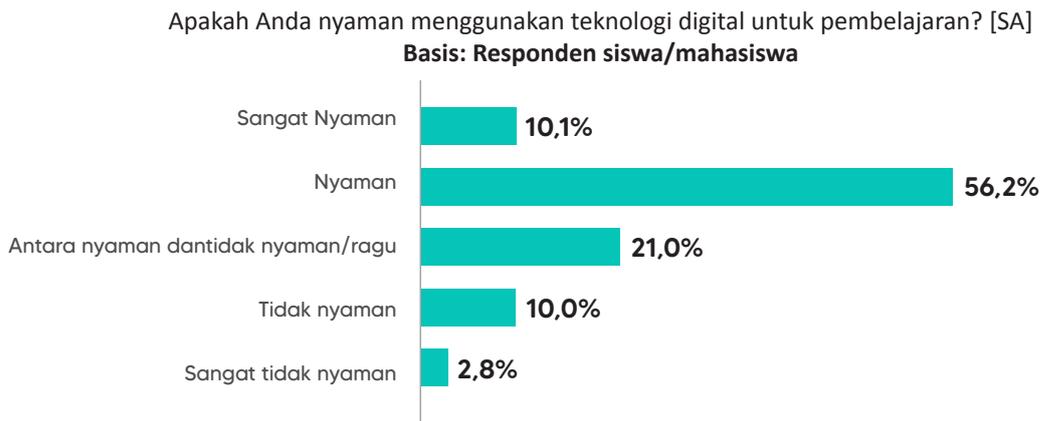
“Teknologi digital apa yang sering Anda gunakan untuk belajar? [MA]”

Basis: responden siswa/mahasiswa



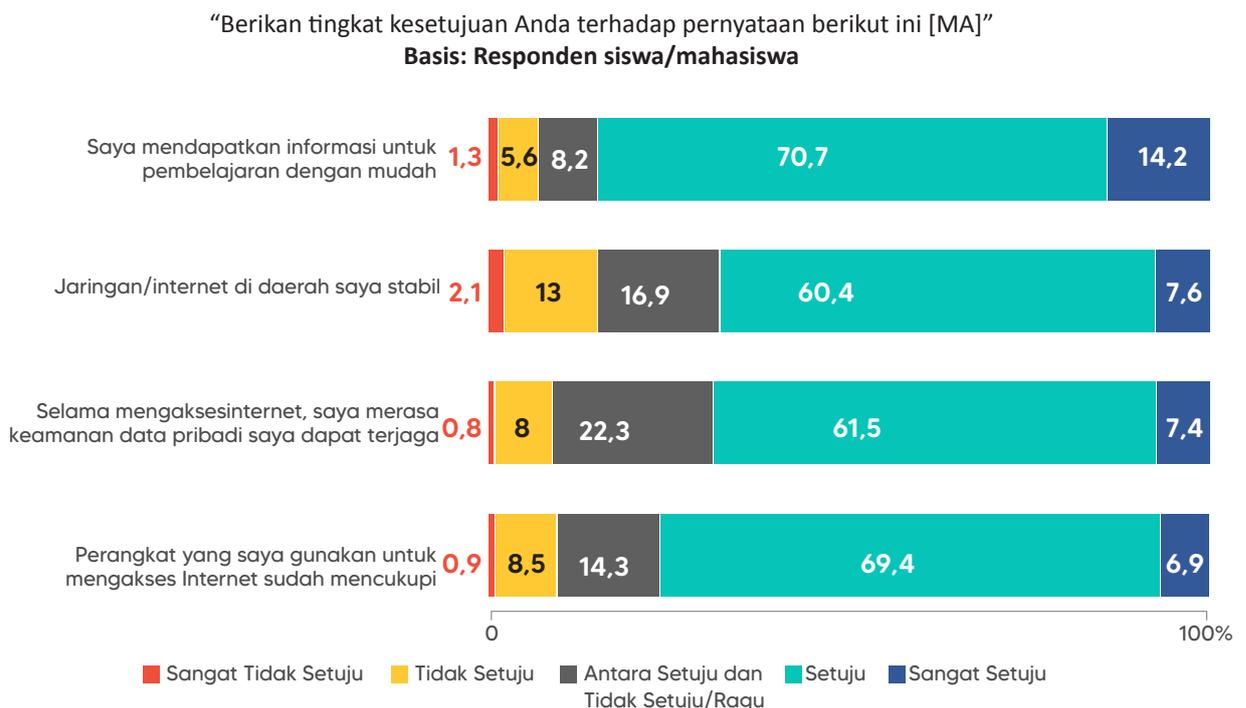
Sebagian siswa/mahasiswa merasa nyaman dengan penggunaan teknologi di sekolah mereka. Lebih dari 65% responden merasa nyaman dan sangat nyaman dengan penggunaan teknologi digital, dan hanya sekitar 13% responden yang merasa tidak nyaman dan sangat tidak nyaman

Gambar 38. Kenyaman Menggunakan Teknologi Digital untuk Pembelajaran



Sedangkan untuk melihat karakter dalam tiap aktivitas pembelajaran melalui perangkat digital mendapatkan nilai dengan level yang baik. Seperti mendapatkan informasi dengan mudah memiliki proporsi hampir 85% setuju dan sangat setuju. Begitu juga jaringan internet yang stabil, keamanan data pribadi yang terjamin, dan kecukupan perangkat digital memiliki proporsi kesetujuan di atas 75%.

Gambar 39. Kondisi Pembelajaran melalui Perangkat Digital

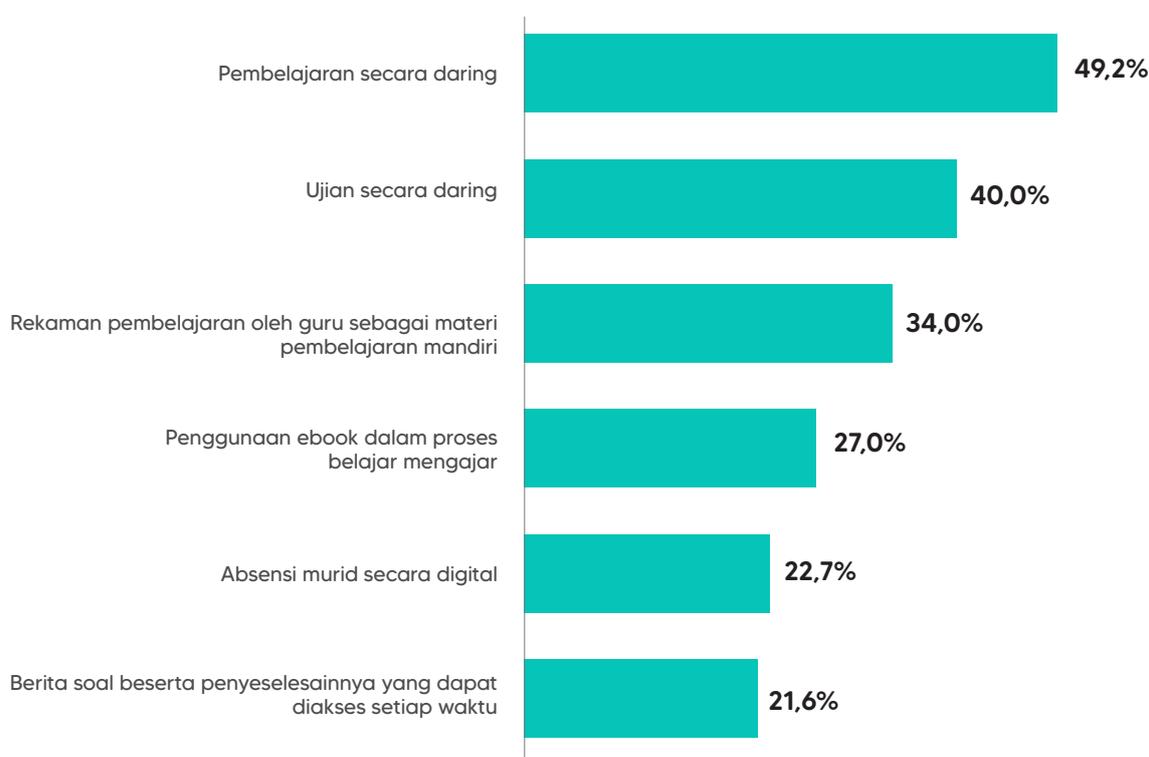


Berdasarkan dengan perspektif responden mengenai penggunaan teknologi digital seperti apa yang dapat menunjang pembelajaran yang efektif menunjukkan proporsi yang menarik. Sebagian besar responden menganggap pembelajaran secara daring (49,2%) dan ujian secara daring (40,0 %) dianggap menjadi kegiatan penunjang pembelajaran yang lebih efektif. Sedangkan tersedianya bank *online* yang dapat diakses tiap waktu (21,6%) dan absensi secara digital (22,7%) dianggap kegiatan yang tidak begitu menunjang pembelajaran yang efektif.

Gambar 40. Penggunaan Teknologi untuk Menunjang Pembelajaran

“Apa saja penggunaan teknologi digital yang menurut Anda dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif? [MA]”

Basis: Responden siswa/mahasiswa



4.5.

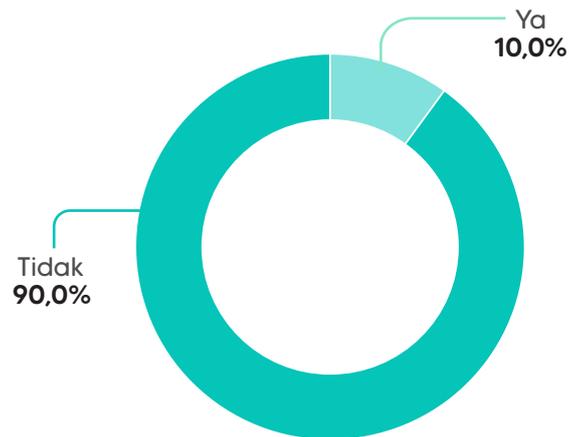
Indeks Berdasarkan Program Literasi Digital

Dari keseluruhan responden, sebanyak 9,98% responden pernah mengikuti program Literasi Digital. Dari jumlah tersebut, sebagian besar informasi dari sosial media, teman/saudara, dan Kemkominfo. Hanya sedikit informasi didapat dari media konvensional, seperti baliho atau sosialisasi tatap muka seperti di pemda atau kelurahan setempat.

Gambar 41. Keikutsertaan Program Literasi Digital

Apakah Anda mengikuti program Literasi Digital yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baik berupa webinar maupun pelatihan terkait dengan penggunaan teknologi digital dan pemanfaatannya? [SA]

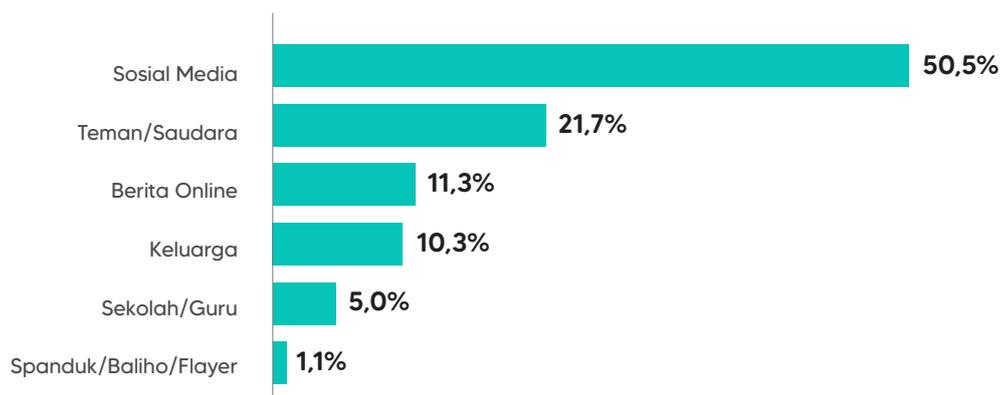
Basis: seluruh responden (1.000)



Sedangkan sumber informasi program literasi digital sebagian besar responden mendapatkan informasi tersebut dari sosial media (50,5%), teman/saudara (21,7%), dan berita online (11,3%). Sedangkan aktivitas lain yang lebih konvensional seperti spanduk/Baliho/Flyer (1,1%) dan dan guru/sekolah (5,05%) merupakan sumber informasi dengan proporsi yang paling rendah.

Gambar 42. Sumber Informasi Program Literasi Digital

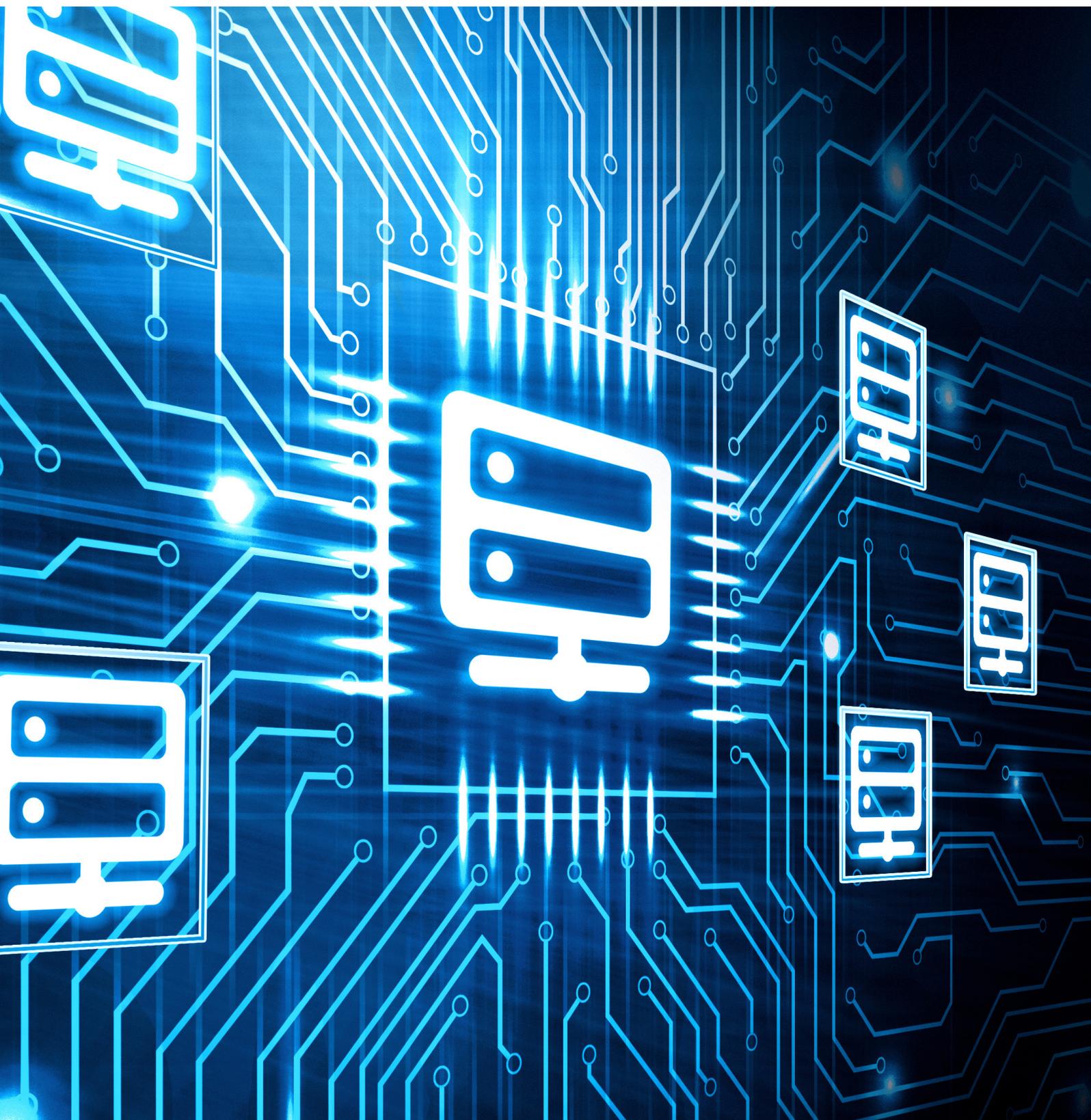
Darimana saja Anda mengetahui program Literasi Digital? [MA]



Tampak jelas bahwa Indeks Literasi Digital bagi mereka yang mengikuti program jauh lebih besar daripada mereka yang tidak mengikuti program Literasi Digital. Bagi mereka yang mengikuti program Literasi Digital memiliki indeks 3,64 dibandingkan hanya 3,53 bagi mereka yang tidak mengikuti program tersebut.

05

Analisis Khusus



5.1.

Kesiapan Masyarakat Menghadapi UU PDP: Berbagi Data dan Keamanan Pribadi

Digitalisasi telah menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang massif, memudahkan masyarakat berinteraksi, bertransaksi dan berbagi informasi dihadapkan dengan tantangan soal keamanan digital.

Masyarakat sangat khawatir terhadap maraknya kasus kebocoran data-data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran regulasi yang menjamin perlindungan data-data pribadi sudah sangat mendesak.

UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada Oktober 2022 diharapkan dapat memberikan pelindungan kepada masyarakat dari kebocoran dan penyalahgunaan data dan risiko kejahatan siber lainnya.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap data pribadi diproses sesuai dengan kepentingan pihak pengumpul data dan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Kebijakan tersebut juga diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi data pribadi. Pengguna internet dan berbagai aplikasi digital perlu memahami ketentuan privasi dan cara-cara untuk meminimalisir kebocoran data pribadi.

Hasil survei Status Literasi Digital 2022 yang dilakukan oleh Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan perilaku masyarakat dalam menjaga dan mengelola data pribadinya. Nantinya akan tergambar kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan UU PDP.

Secara keseluruhan dari pernyataan-pernyataan yang menilai keamanan digital, baru separuh dari responden memiliki kebiasaan baik terhadap pelindungan data pribadi. Sebagian besar responden telah melakukan beberapa sikap positif tanpa bantuan orang lain.

Misalnya, sebanyak 66% responden terbiasa membuat *password* yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. Lalu sebanyak 65,8% responden terbiasa mengatur orang-orang yang dapat melihat linimasa (postingan) dan 53,5% responden menonaktifkan posisi geografis/GPS seperti di Facebook.

Sebaliknya, sebagian responden belum memiliki kesadaran dan kemampuan yang baik untuk melakukan aktivitas-aktivitas penting lainnya dalam melindungi data pribadi. Terungkap bahwa sebanyak 71,2% responden belum terbiasa membedakan e-mail yang berisi *spam/virus/malware* atau e-mail biasa. Padahal *spam* dapat menjadi salah satu cara penyebaran *malware* sehingga dapat melemahkan sistem keamanan di perangkat digital dan memicu kebocoran data.

Di samping itu, masih relatif banyak responden yang cenderung belum terbiasa menggunakan fitur-fitur yang membantu perlindungan data pribadi. Hasil survei menunjukkan 62% responden tidak terbiasa menggunakan aplikasi/software untuk menemukan dan menghapus virus di handphone/komputer.

Lalu sebanyak 58,6% responden tidak terbiasa dengan cara *report abuse*/melaporkan penyalahgunaan di jejaring sosial dan 57,1% responden tidak mampu melakukan sendiri pencadangan (*back up*) data di beberapa tempat penyimpanan.

Riset menunjukkan pemahaman dan kemampuan sebagian masyarakat terhadap sistem perlindungan data pribadi masih rendah. Kerentanan sistem keamanan memungkinkan peretas untuk mengakses data personal. Untuk menghindari kebocoran data, secara umum masyarakat perlu mengetahui pemanfaatan sistem keamanan digital secara lebih memadai.

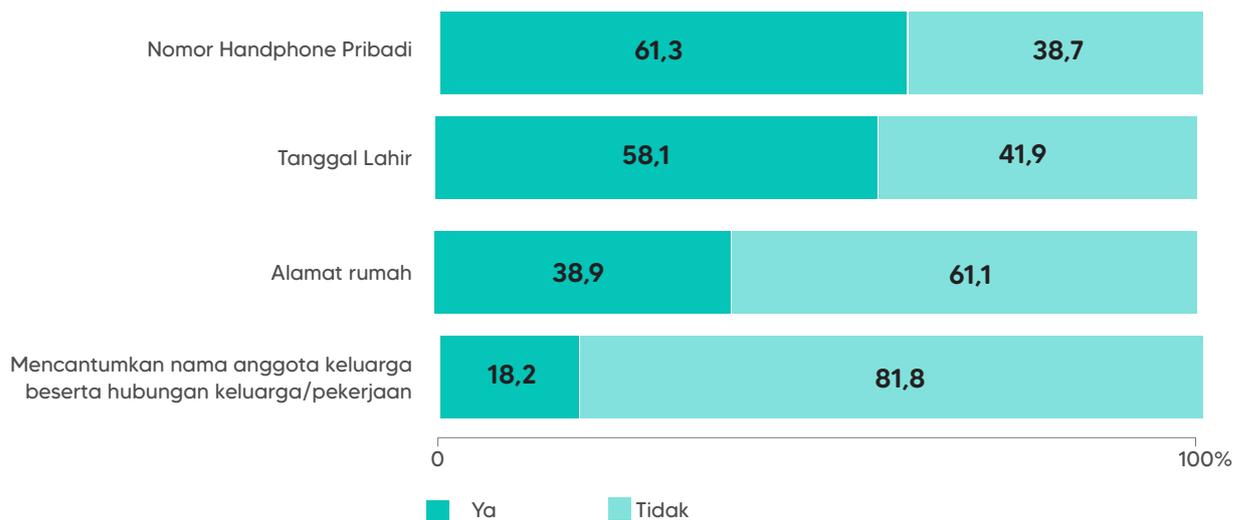
Berbagi informasi personal di platform digital juga menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi. Data-data yang merupakan identitas seseorang dan dibagikan di media sosial dapat dimanfaatkan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data.

Survei Status Literasi Digital 2022 menunjukkan masih relatif banyak responden yang mengunggah data pribadi di media sosial seperti alamat rumah, tanggal lahir, dan nomor *handphone* pribadi.

Sebanyak 61,3% responden mencantumkan nomor *handphone* pribadi di akun media sosialnya. Lebih dari separuh responden (58,1%) mencantumkan informasi tanggal lahir di media sosial. Di samping itu, terdapat 18,2% responden yang mencantumkan nama anggota keluarga beserta hubungan keluarga/pekerjaannya.

UU PDP telah menetapkan sanksi kepada individu yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karenanya, masyarakat perlu meningkatkan wawasan dan kehati-hatian terhadap risiko mencantumkan data personal di ranah publik karena dapat disalahgunakan oleh orang lain. Data pribadi bersifat spesifik yang dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak besar kepada seseorang.

Gambar 43. Informasi Pribadi dalam Media Sosial

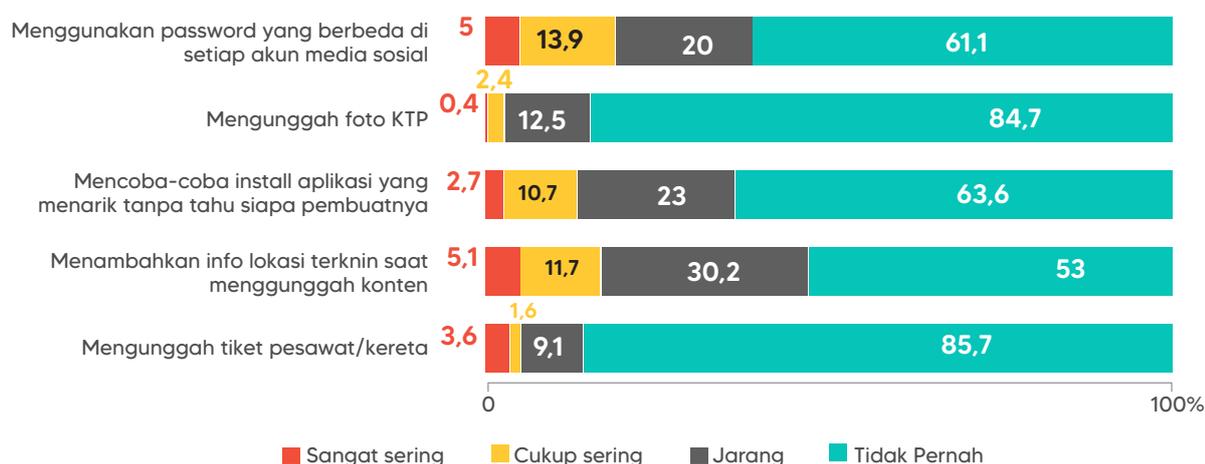


Lebih lanjut mengenai aktivitas membagikan informasi personal di media sosial, hasil survei menunjukkan mayoritas responden (84,7%) tidak pernah mengunggah foto KTP dan 85,7% tidak pernah mengunggah tiket pesawat/kereta. Namun demikian, meskipun frekuensinya jarang, sebanyak 30,2% responden menambahkan info lokasi terkini saat mengunggah konten, sedangkan 16,8% responden lainnya lebih sering melakukannya. Di sisi lain, sebanyak 61,1% responden tidak pernah menggunakan *password* yang berbeda di setiap akun media sosial.

Survei terhadap 10.000 responden secara nasional ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak mengunggah data pribadi ke media sosial sudah relatif baik. Namun masyarakat masih perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari berbagai kemungkinan serangan siber (*cyber attack*).

Pengguna media sosial perlu memastikan dan memahami kebijakan privasi yang telah ditetapkan setiap aplikasi media sosial. Ketika membagikan informasi kepada pihak lain—seperti perusahaan maupun lembaga layanan publik—masyarakat perlu mengetahui bahwa sesuai dengan UU PDP, masyarakat memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan sewaktu-waktu dapat meminta penghapusan data pribadi tersebut. Di tengah era digitalisasi, perlindungan terhadap data pribadi masyarakat juga perlu didukung dengan kecakapan digital terhadap faktor keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan perangkatnya. Survei Status Literasi Digital 2022 menunjukkan bahwa masih relatif sedikit masyarakat yang menggunakan fitur-fitur peningkatan keamanan digital, baik perangkat keras maupun lunak.

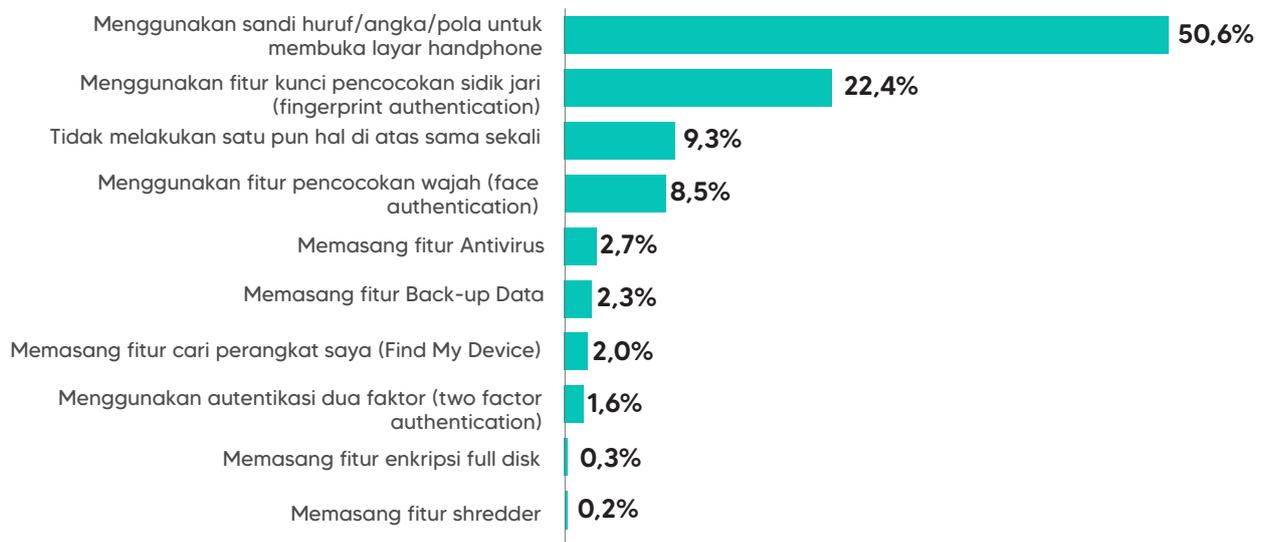
Gambar 44. Pengalaman di Sosial Media



Perangkat keras perlu dilindungi dengan menggunakan kata sandi yang kuat, kunci pencocokan sidik jari (*fingerprint authentication*), maupun fitur kunci dengan mencocokkan wajah pengguna (*face authentication*).

Sebagian besar responden menggunakan kata sandi untuk membuka layar *handphone*, tetapi 33% responden menggunakan fitur kunci pencocokan sidik jari (*fingerprint authentication*). Sementara 12,5% responden menggunakan fitur pencocokan wajah (*face authentication*).

Sementara dari sisi perangkat lunak, hanya 11,1% responden yang berupaya melindungi data pribadi. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan cara-cara perlindungan data pribadi secara keseluruhan, di antaranya memasang fitur cari perangkat saya (*find my device*), anti virus, *back up data*, enkripsi *full disk* atau penyandian, dan penghancuran data (*shredder*).

Gambar 45. Upaya Melindungi Data Pribadi

UU PDP telah mengatur keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Pasal 63 menyebutkan masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data pribadi.

Dapat disimpulkan, baru sebagian responden siap dengan implementasi UU PDP. Oleh karena itu masyarakat perlu secara aktif meningkatkan kesadaran, wawasan, yang diikuti kebiasaan positif untuk meningkatkan kemampuan perlindungan data pribadi. Secara khusus membatasi untuk membagikan data informasi personal ke media digital/ media sosial dan menggunakan sistem pengamanan perangkat digital secara optimal agar meminimalisir risiko kebocoran data.

Implementasi peraturan turunan dari UU PDP juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan berbagai cara untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Sebab masih sedikit responden yang menggunakan fitur-fitur pendukung keamanan digital.

Selain itu, setiap individu masyarakat perlu memahami pasal-pasal di dalam UUP PDP, karena dapat terkena sanksi kendati tidak sengaja atau tanpa sadar melanggar regulasi tersebut. Ketika membagikan informasi ke pihak yang memproses dan mengendalikan data pribadi, masyarakat juga perlu secara mendetail memahami hak dan kewajibannya. Misalnya meminta bukti persetujuan untuk memproses data pribadi dan juga hak mendapatkan pemberitahuan dari pengendali data ketika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi masyarakat.

5.2.

Status Literasi Digital Kalimantan Timur sebagai Lokasi Ibu Kota Baru

Pemerintah Indonesia akan memulai pembangunan fase pertama infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2022-2024 (Katadata, 2022b). Pada periode tersebut, pemindahan ibu kota baru, terutama kementerian esensial, telah dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045.

Berdasarkan Perpres No.115 Tahun 2021, salah satu proyek prioritas yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, interkoneksi, dan transmisi tegangan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang mendukung aksesibilitas teknologi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN.

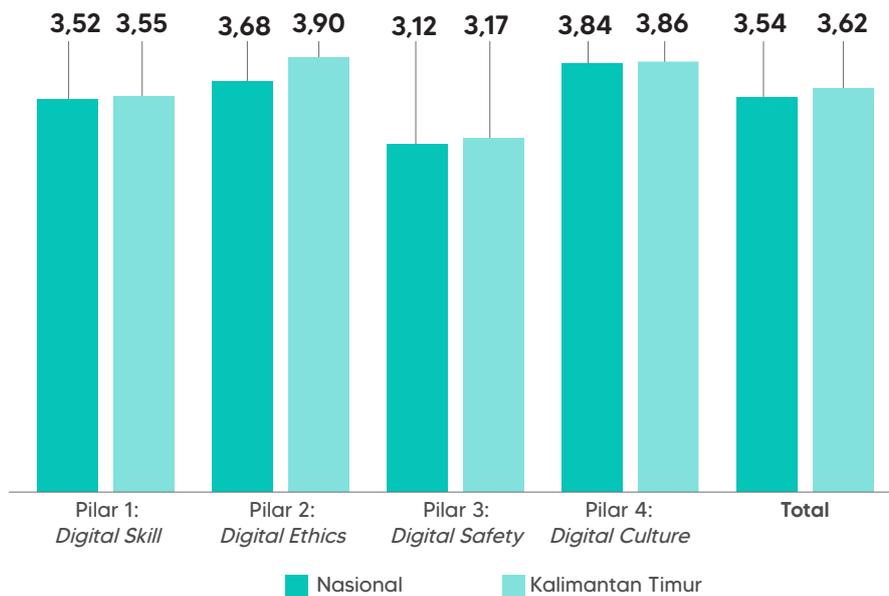
Selain kesediaan infrastruktur komunikasi yang memadai, salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu dalam memanfaatkan terbukanya akses digital dalam kehidupan sehari-hari. Terutama aktivitas yang dapat mendukung produktivitas, seperti dalam bekerja dan bersekolah.

IKN akan berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk 3,721 juta jiwa. Sebanyak 7,14% penduduknya memiliki Pendidikan hingga perguruan tinggi. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk nasional yang berpendidikan tinggi yakni sebesar 6% (Katadata, 2021, 2022a).

Hal serupa juga terlihat dari Indeks Literasi Digital Kalimantan Timur yang memiliki skor 3,62. Skor tersebut jauh lebih besar daripada skor nasional yang memiliki skor 3,54. Skor tersebut konsisten dari tahun sebelumnya, baik pada tahun 2021 dan 2021, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan indeks terbesar ketiga di Indonesia.

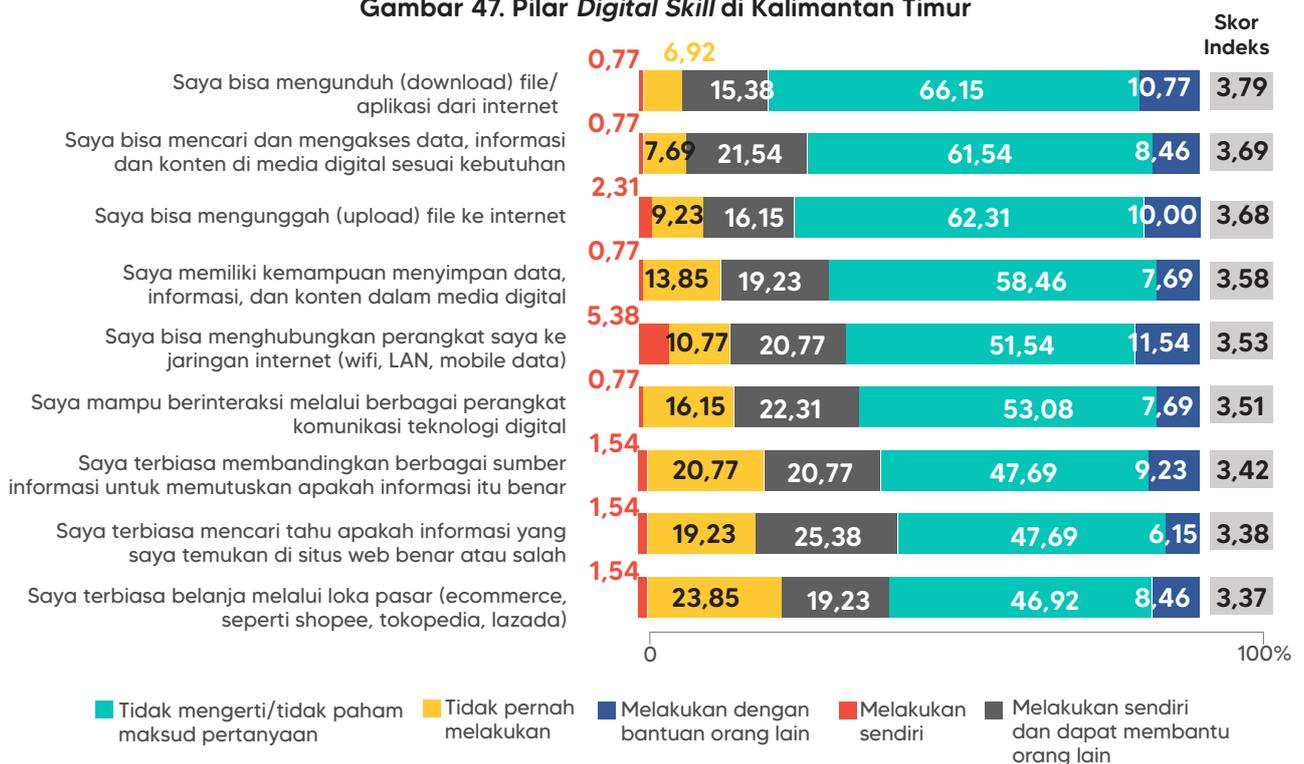
Secara umum, hampir semua pilar Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan pilar di level nasional. Perbedaan paling mencolok adalah *Digital Ethics* yang memiliki perbedaan terbesar pada 0,22.

Gambar 46. Indeks Literasi Digital di Kalimantan Timur



Pada pilar *Digital Skill*, skor tertinggi sama dengan skor tertinggi pada level nasional, yaitu kemampuan untuk mengunduh file. Perbedaan paling mencolok adalah skor pada keterbiasaan dalam berbelanja melalui loka pasar yang merupakan sub-pilar dengan skor terendah di Kalimantan Timur.

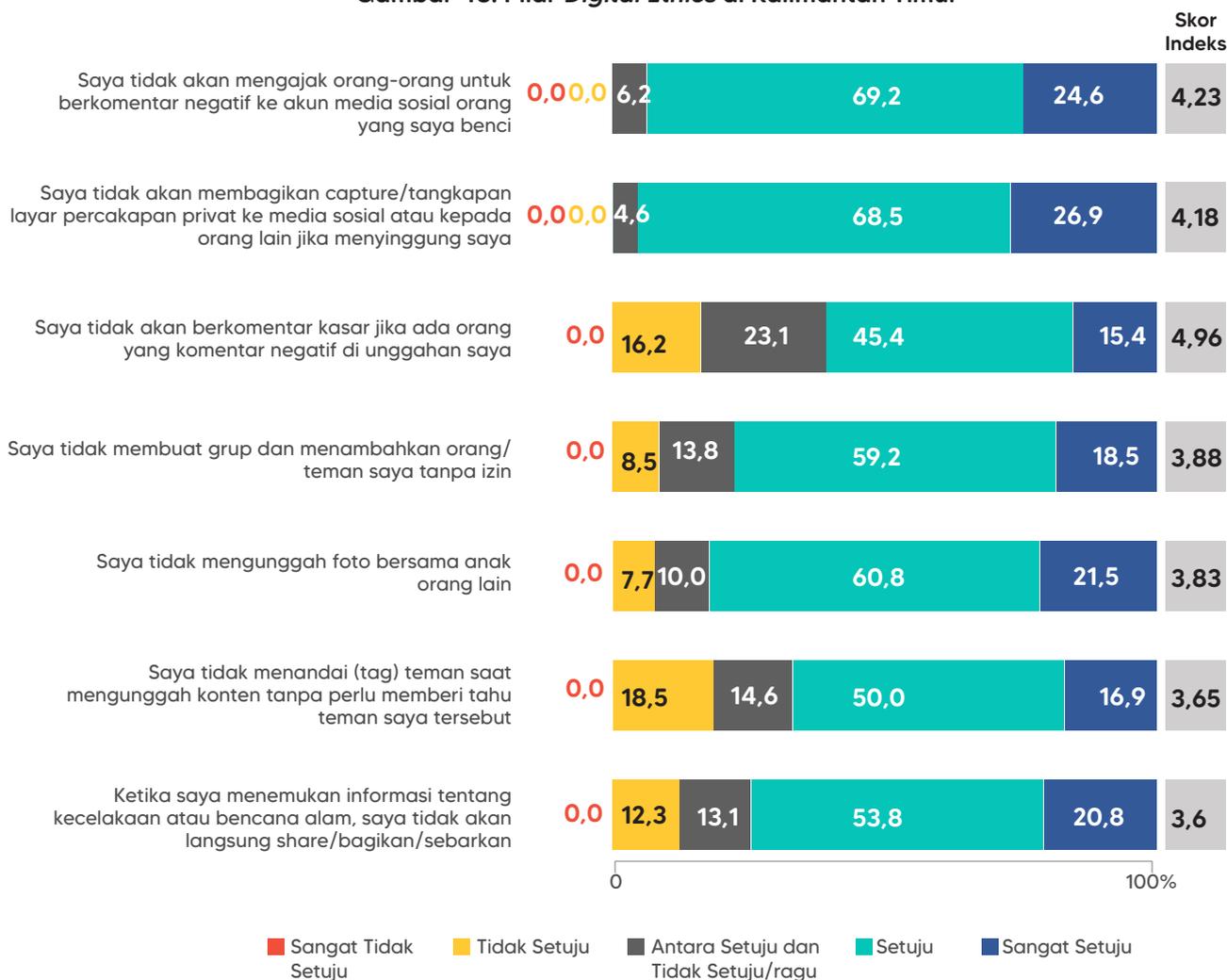
Di pilar *Digital Ethics* menunjukkan pola yang identik antara Kalimantan Timur dan Nasional. Skor terbesar pada upaya responden untuk tidak mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif. Di sisi lain, skor indeks terendah berada pada kebiasaan

Gambar 47. Pilar *Digital Skill* di Kalimantan Timur

responden dalam membagikan secara langsung informasi kecelakaan.

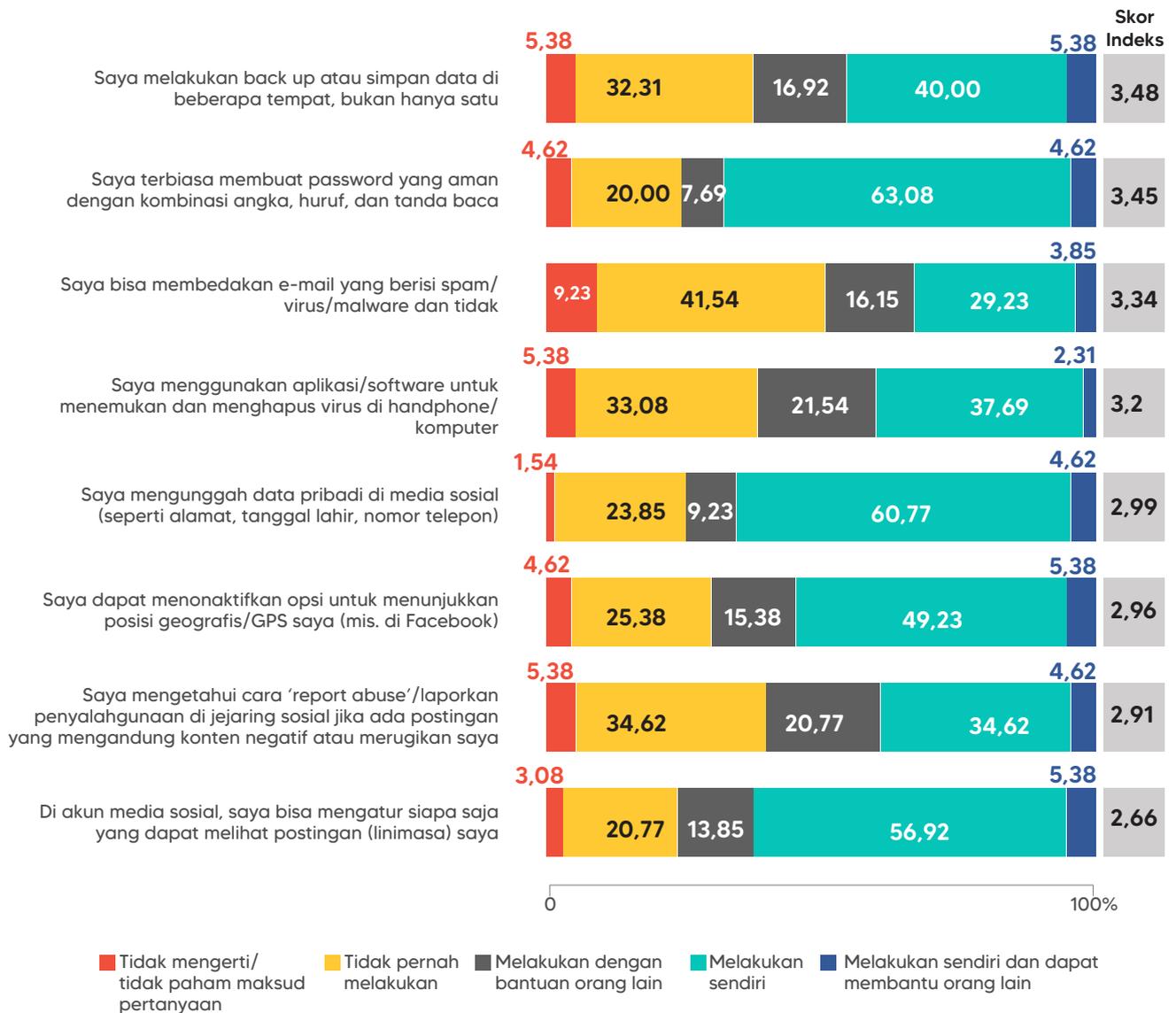
Pada pilar *Digital Safety*, skor tertinggi pada sub pilar menunjukkan kategori yang sama yaitu pada kebiasaan menggunakan *password* yang aman. Namun skor terendah

Gambar 48. Pilar *Digital Ethics* di Kalimantan Timur



memiliki perbedaan antara Kalimantan Timur dan Nasional. Pada Nasional, skor paling kecil pada kemampuan responden dalam membedakan email yang berisi spam/virus/*malware*. Sedangkan pada responden di Kalimantan Timur, skor terendah pada kebiasaan mengatur siapa saja yang dapat melihat linimasa di akun media sosial mereka.

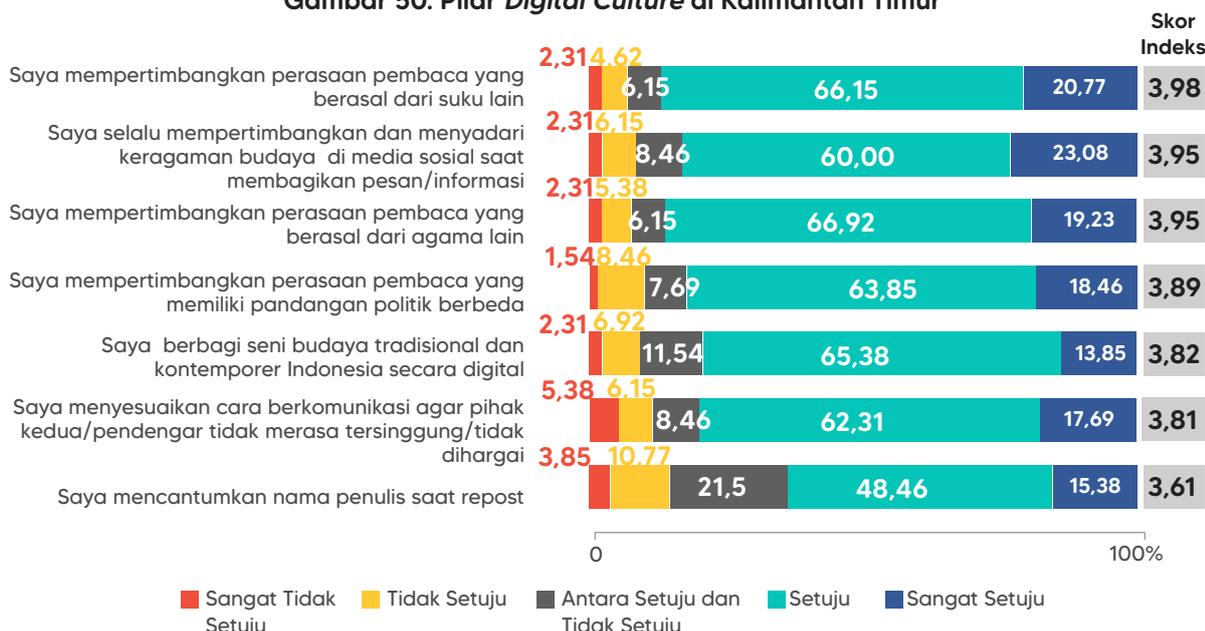
Pada pilar *Digital Culture*, perbedaan antara Kalimantan Timur dan Nasional berada

Gambar 49. Pilar *Digital Safety* di Kalimantan Timur

pada sub pilar terbesar. Pada Kalimantan Timur, skor terbesar berada pada kesadaran responden dalam mempertimbangkan perasaan pembaca yang berasal dari suku lain (Skor 3,98) dan keberagaman budaya (Skor 3,95). Sedangkan pada level nasional, sebagian besar merasa menyesuaikan cara berkomunikasi agar tidak tersinggung (Skor 3,94) adalah sub pilar yang tertinggi, disusul oleh mempertimbangkan pembaca yang berasal dari agama lain (Skor 3,94).

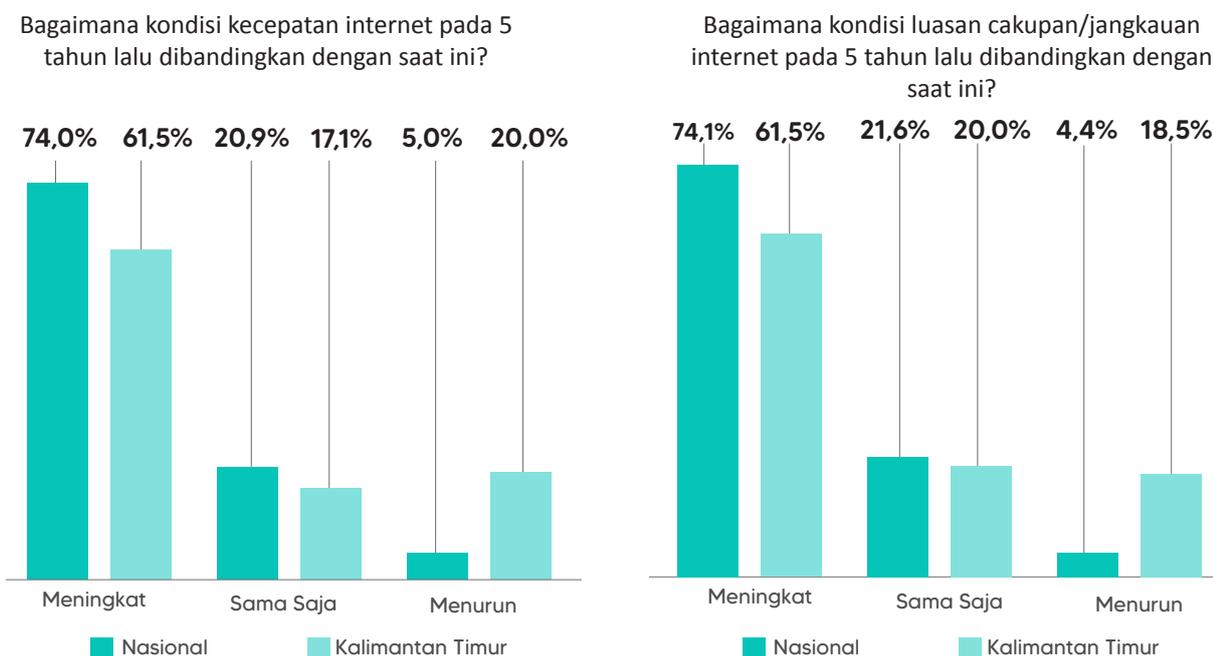
Hal ini berbeda dengan skor terkecil. Baik Nasional dan Kalimantan Timur merasa pencantuman nama penulis pada saat *report* merupakan sub pilar yang memiliki skor terendah.

Gambar 50. Pilar Digital Culture di Kalimantan Timur



Namun status Literasi Digital di Kalimantan Timur yang lebih besar dibandingkan pada level nasional, tidak sama pada status perkembangan infrastruktur. Walaupun di Kalimantan Timur sebagian besar menganggap terdapat peningkatan kecepatan internet pada lima tahun terakhir (61,5%), namun jumlah tersebut tidak sebesar rata-rata nasional (74%). Begitu juga dengan pandangan luasan cakupan internet. Jumlah proporsi peningkatan cakupan internet lebih rendah dibandingkan dengan level nasional, yakni 61,5% proporsi responden yang menganggap ada kenaikan jangkauan internet dibandingkan pada 74,1 % pada level nasional.

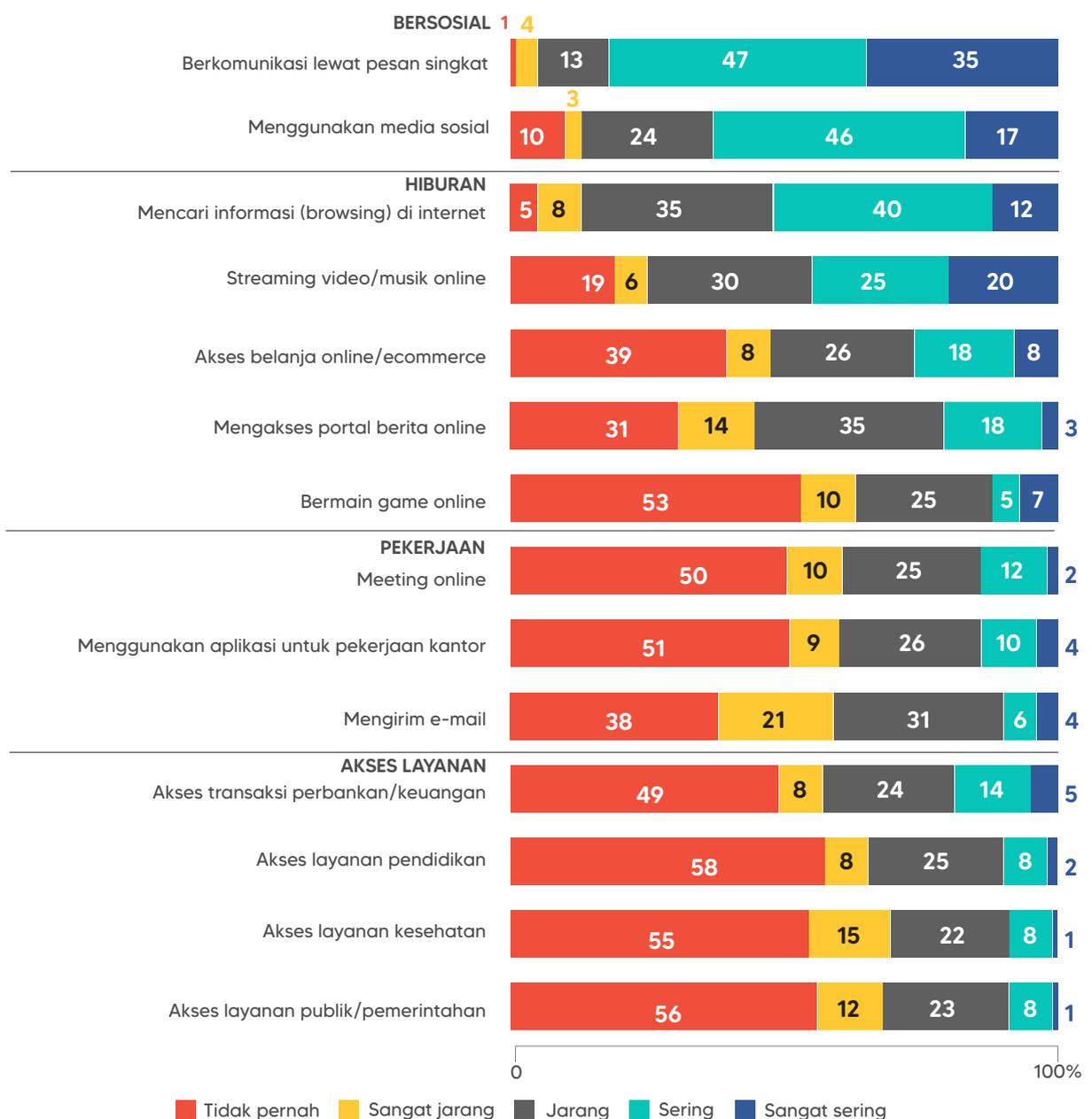
Gambar 51. Perkembangan Infrastruktur di Kalimantan Timur



Bagi mereka yang menilai bahwa ada kenaikan cakupan internet, sebagian besar menganggap bahwa sebagian besar cakupan berupa sinyal internet yang semakin membaik (39%), jumlah operator yang semakin banyak (35%), dan wilayah responden yang sudah dijangkau oleh jaringan wifi (25%).

Di sisi lain, kebiasaan berinternet di Kalimantan Timur hampir serupa pada kasus di Nasional. dan hiburan merupakan kelompok aktivitas yang paling sering dilakukan di Kalimantan Timur. Sedangkan Pekerjaan dan Akses Layanan Publik merupakan dua kelompok aktivitas yang paling jarang dilakukan.

Gambar 52. Kebiasaan Berinternet Masyarakat Kalimantan Timur



*Jarang merupakan akumulasi dari skala 'Sangat Jarang' dan 'Jarang'
Sering merupakan akumulasi dari skala 'Sering' dan 'Sangat sering'

Secara Umum, Status Literasi Digital di Kalimantan Timur lebih baik dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan level nasional, terdapat beberapa kesamaan pada karakteristik penyusun indikator dan kebiasaan dalam bersosial media.

Oleh karena itu, berdasarkan data-data tersebut dapat mendukung bahwa dalam survei Status Literasi Digital 2022 di Indonesia, masyarakat Kalimantan Timur telah siap menyambut IKN. Sedangkan perbaikan yang perlu ditingkatkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur internet yang masih dianggap kurang cepat apabila dibandingkan dengan rata-rata perubahan kecepatan internet di daerah lain.

5.3.

Kondisi Wilayah 3T

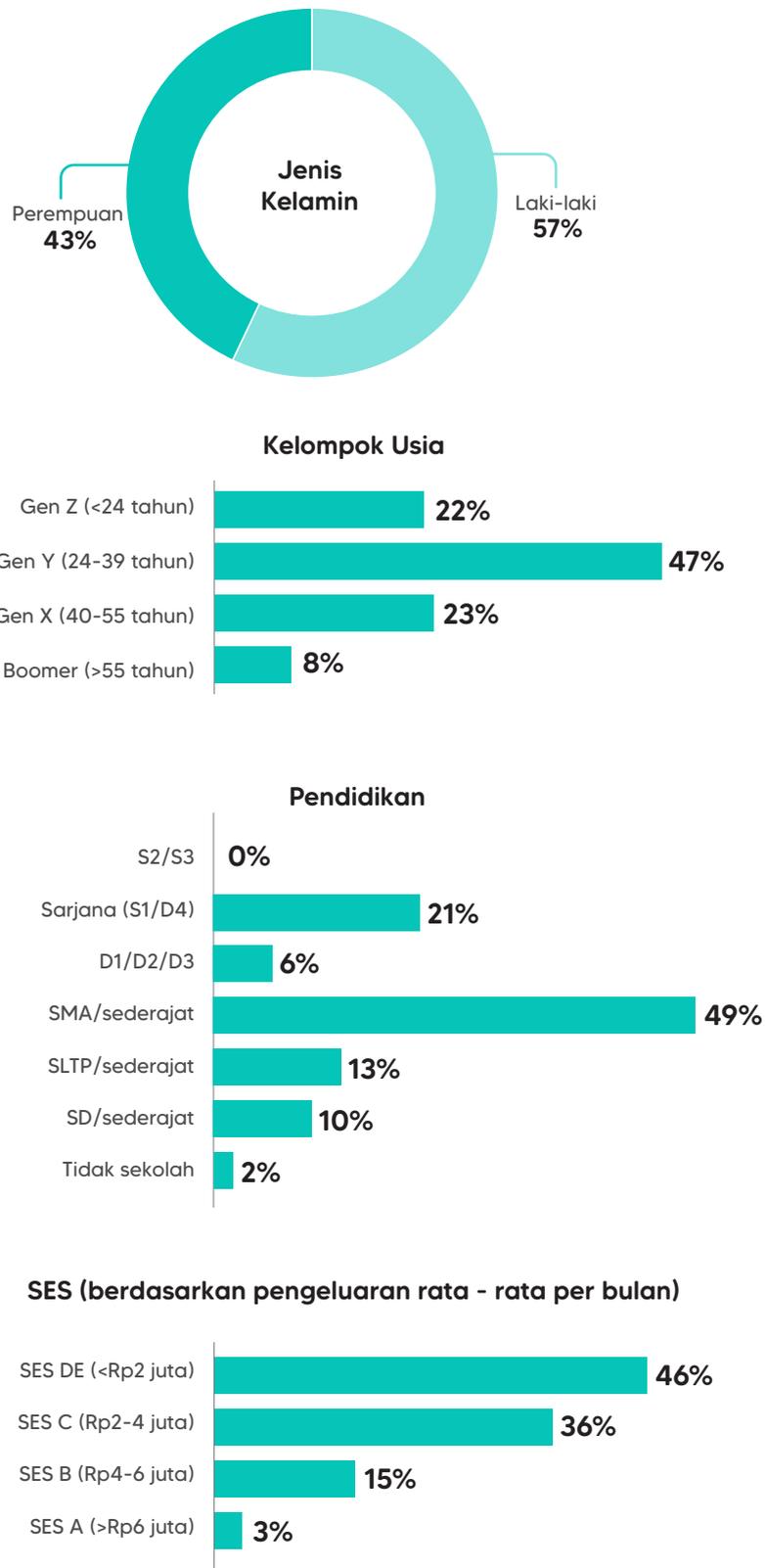
Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Kondisi ini menciptakan istilah dan kategori daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.

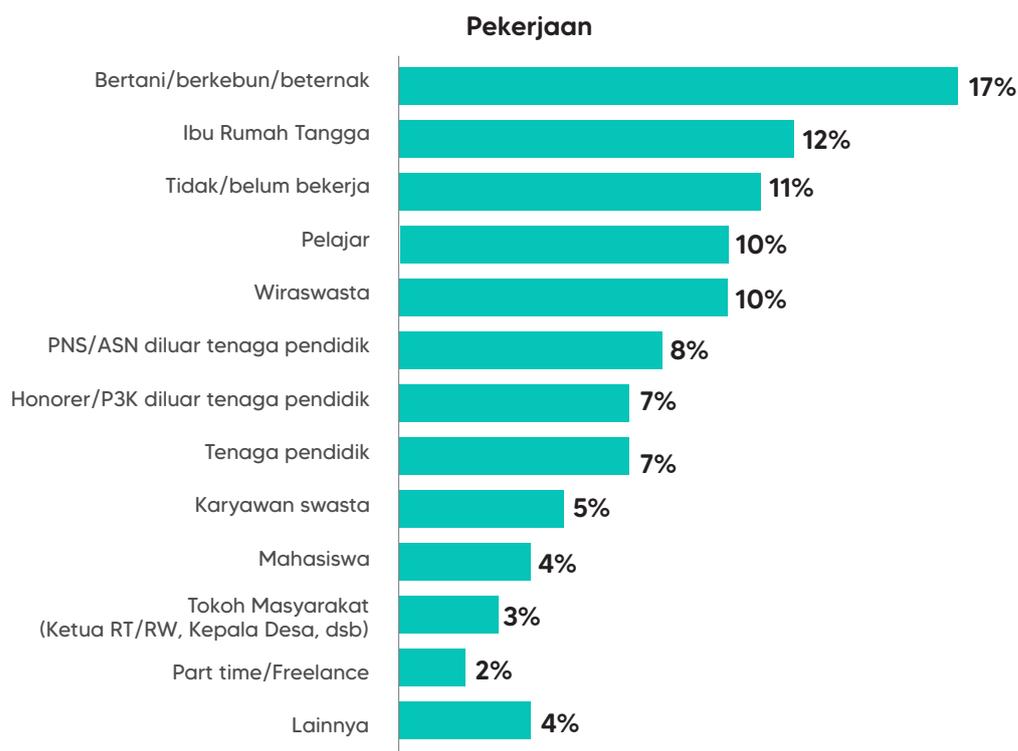
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dalam Perpres ini ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

Survei Status Literasi Digital 2022 mencakup ke 62 kabupaten ini untuk melihat kondisi digital wilayah secara terkini dengan total 455 responden. Berdasarkan demografinya, jika dilihat berdasarkan kelompok usia, 47% responden merupakan Generasi Y yang berada di rentang usia 24 hingga 39 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA sederajat.

Berbeda dengan kondisi secara nasional, berdasarkan status ekonomi sosialnya, mayoritas daerah 3T berasal dari SES D dengan pengeluaran rata-rata kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Sementara berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden berpenghasilan utama sebagai petani.

Gambar 53. Status Demografi di wilayah 3T

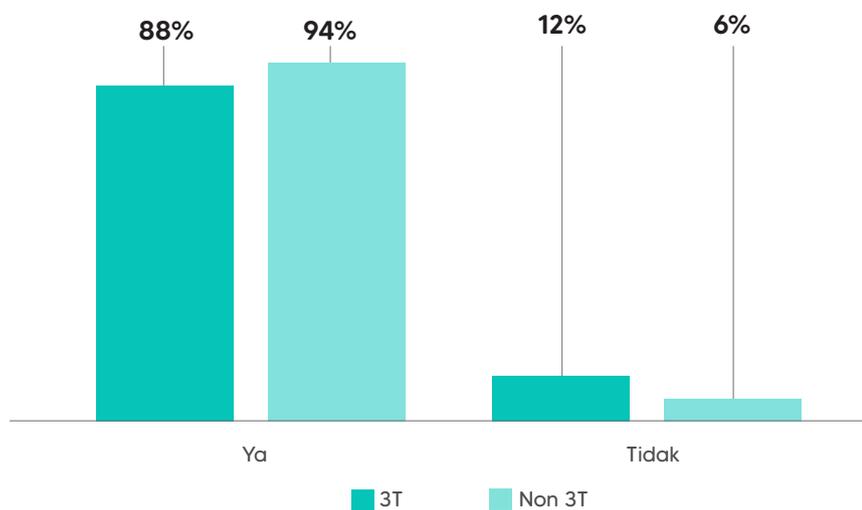




Terkait dengan akses sinyal telepon seluler, sama halnya dengan wilayah non 3T, mayoritas responden sudah mendapatkan sinyal telepon seluler di sekitar lokasi rumahnya. Sementara sekitar 12% responden mengaku belum mendapatkan sinyal telepon dengan sebagian besar responden berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.

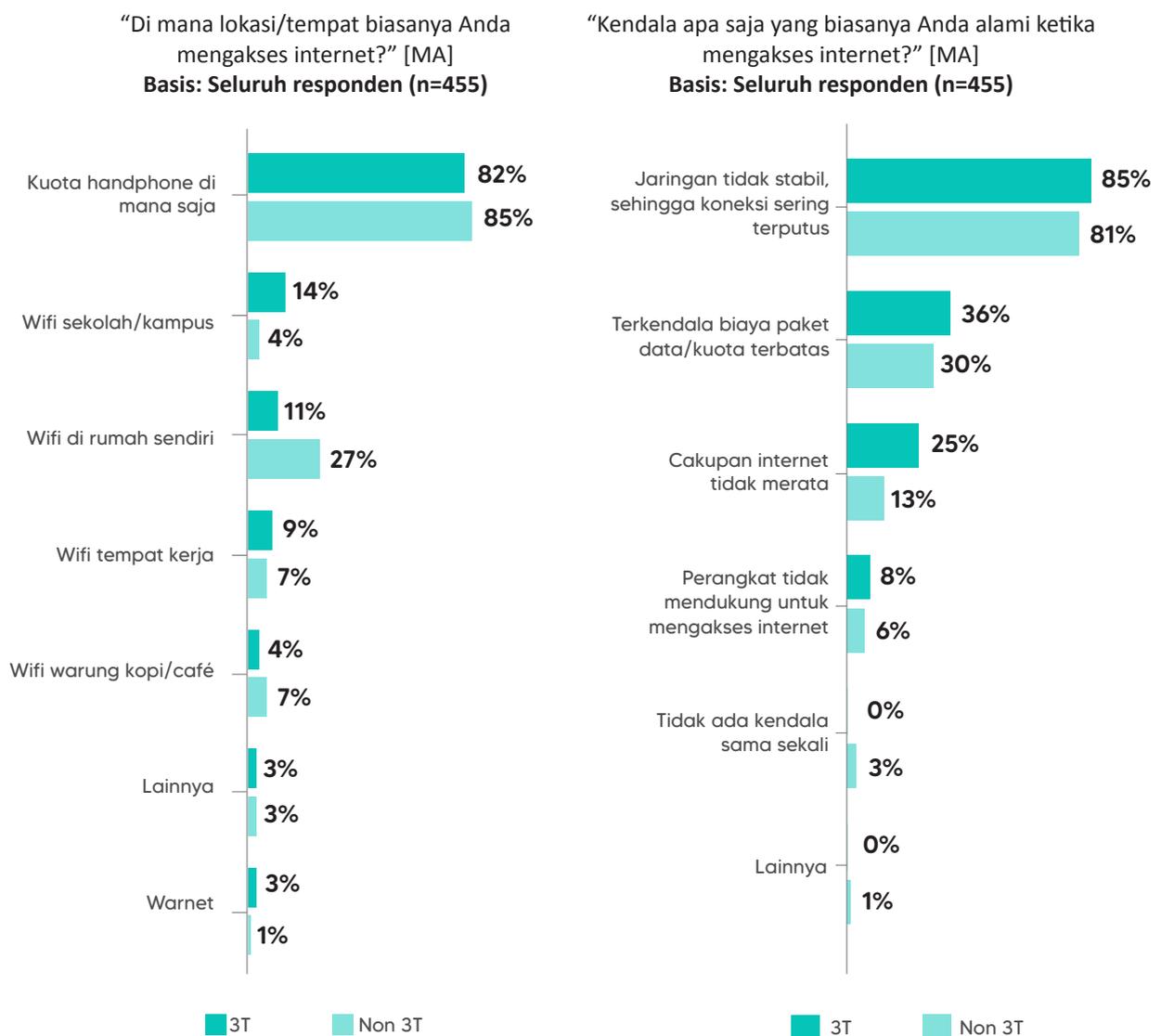
Gambar 54. Akses Internet di Wilayah 3T

“Apakah di sekitar lokasi rumah Bapak/Ibu/Saudara terdapat sinyal telepon seluler?” [SA]
 Basis: Seluruh responden (n=455)



Sama halnya dengan kondisi nasional maupun daerah non 3T, mengakses dengan menggunakan kuota *handphone* merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh responden wilayah 3T. Hal ini memungkinkan responden untuk mengakses internet di mana saja responden berada. Namun, kendala masih dirasakan oleh seluruh responden di wilayah 3T, terutama terkait jaringan yang tidak stabil.

Gambar 55. Lokasi Akses dan Kendala Internet di Wilayah 3T

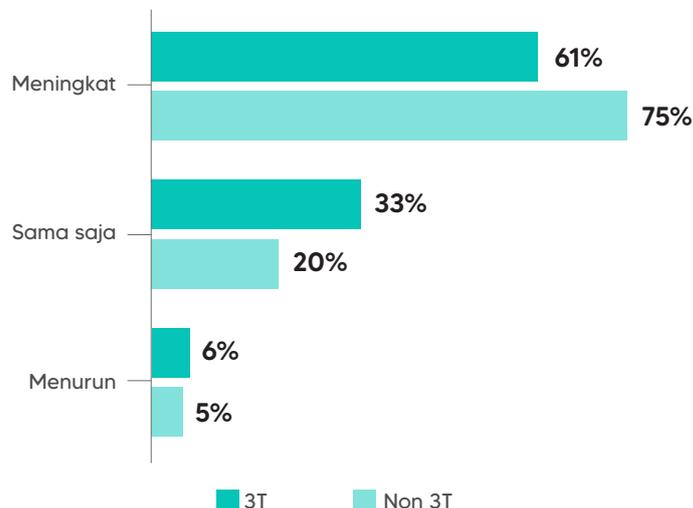


Meskipun kendala jaringan yang tidak stabil masih banyak dirasakan, namun kondisi ini sudah semakin membaik dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Sebanyak 63% responden merasakan sinyal internet yang semakin stabil. Selain itu, sebanyak 61% responden menganggap kecepatan dan jangkauan internet di wilayah mereka juga meningkat.

Gambar 56. Kondisi Infrastruktur di Wilayah 3T

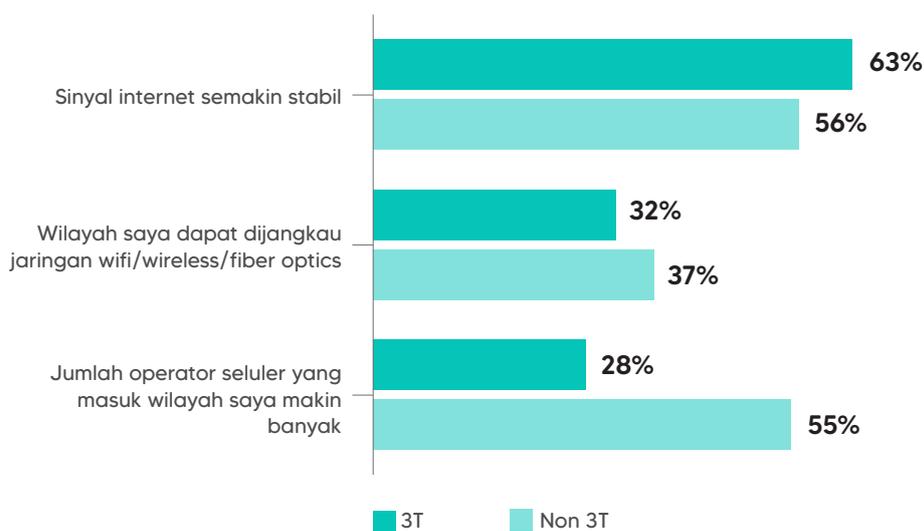
“Bagaimana kondisi kecepatan dan jangkauan internet pada 5 tahun lalu dibandingkan dengan saat ini?” [SA]

Basis: Seluruh responden (n=455)



“Cakupan jangkauan apa yang semakin membaik?” [MA]

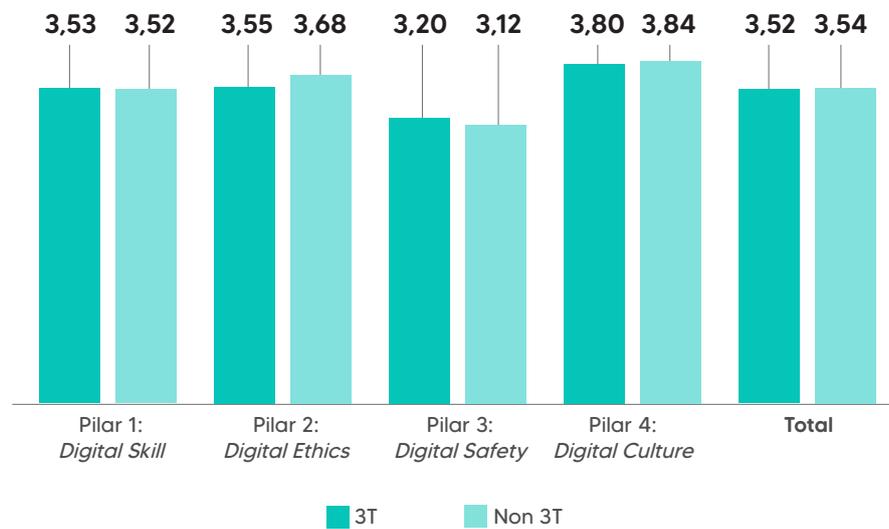
Basis: Responden yang menjawab kondisi internet meningkat (n=270)



Indeks Literasi Digital wilayah 3T tahun 2022 mendapatkan skor 3,52. Angka ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan skor indeks wilayah non 3T. Jika dilihat berdasarkan pilarnya, pilar *Digital Culture* mendapatkan skor paling tinggi dengan skor 3,80. Angka ini juga sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan pilar yang sama di wilayah non 3T.

Pilar *Digital Ethics* mendapatkan skor 3,55, lebih kecil 3,13 poin dengan wilayah non 3T. Kemudian pilar *Digital Skill* dengan skor 3,53. Sementara itu skor terendah diraih oleh pilar *Digital Safety* dengan skor 3,20 lebih tinggi 0,08 poin dibandingkan skor wilayah 3T.

Gambar 57. Perbandingan Indeks Literasi Digital di Wilayah 3T dan Selain 3T

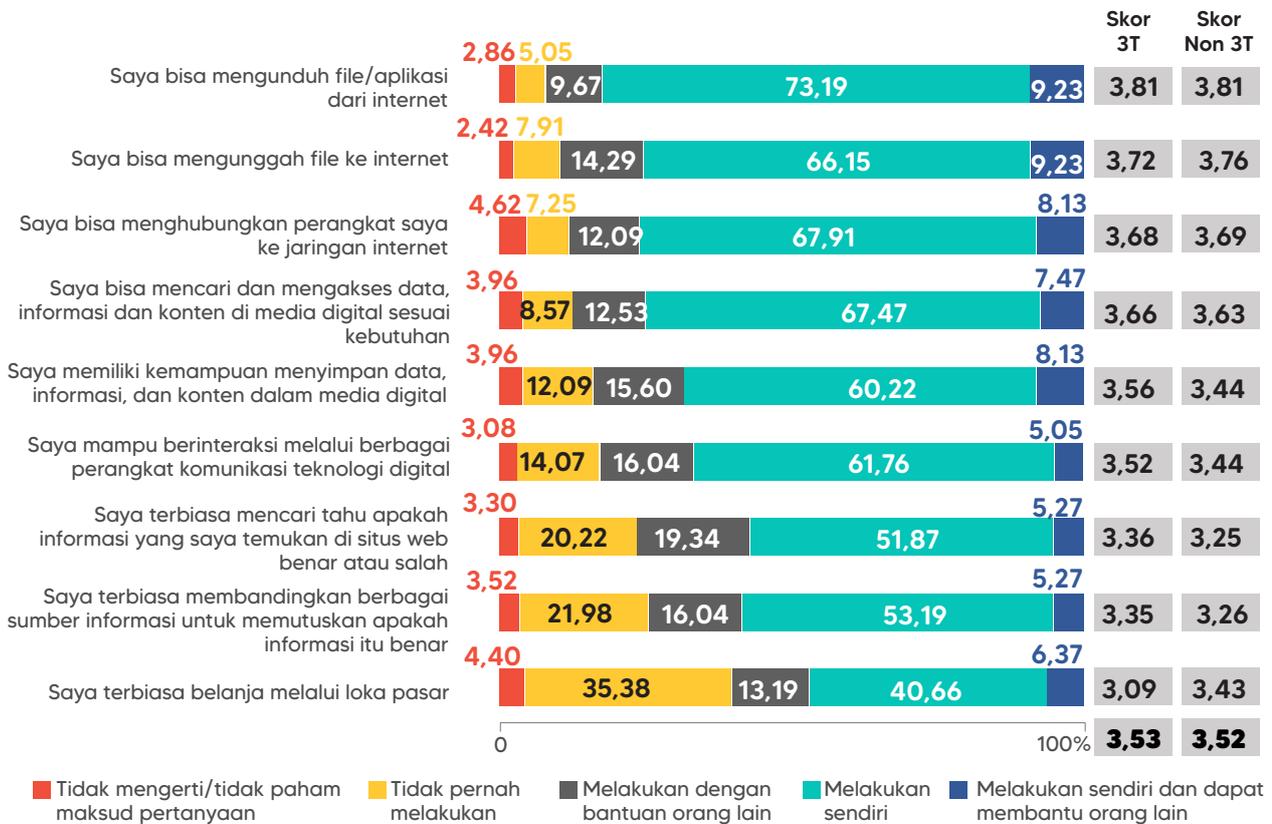


Pilar *Digital Skill* wilayah 3T memiliki skor yang hampir sama dengan skor pilar pada wilayah non 3T maupun nasional. Skor tiap indikatornya pun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan indikator tertinggi yaitu kemampuan dalam mengunduh file. Sementara itu, skor terendah adalah kebiasaan belanja melalui loka pasar.

Dibandingkan wilayah lainnya, wilayah 3T masih terkendala akses logistik akibat terpencilnya lokasi. Hal ini juga menyebabkan ongkos kirim yang dibutuhkan semakin besar, apalagi penjual di loka pasar lebih banyak berasal dari wilayah non 3T.

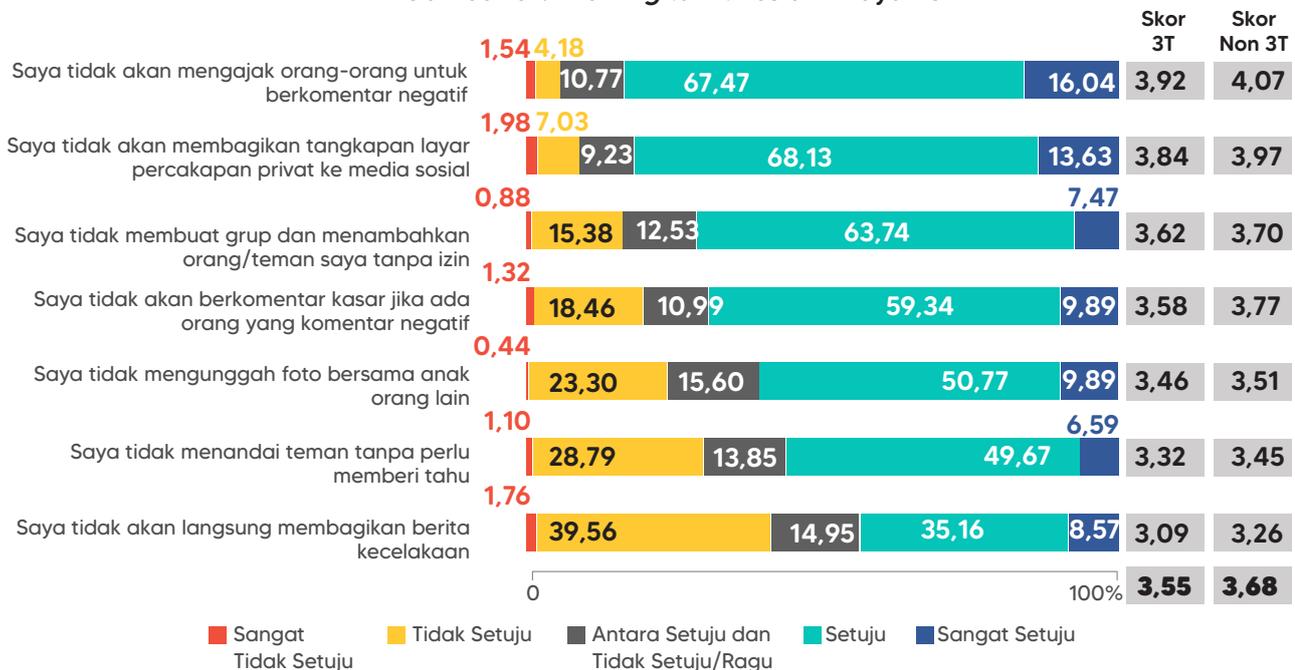


Gambar 58. Pilar Digital Skill di Wilayah 3T



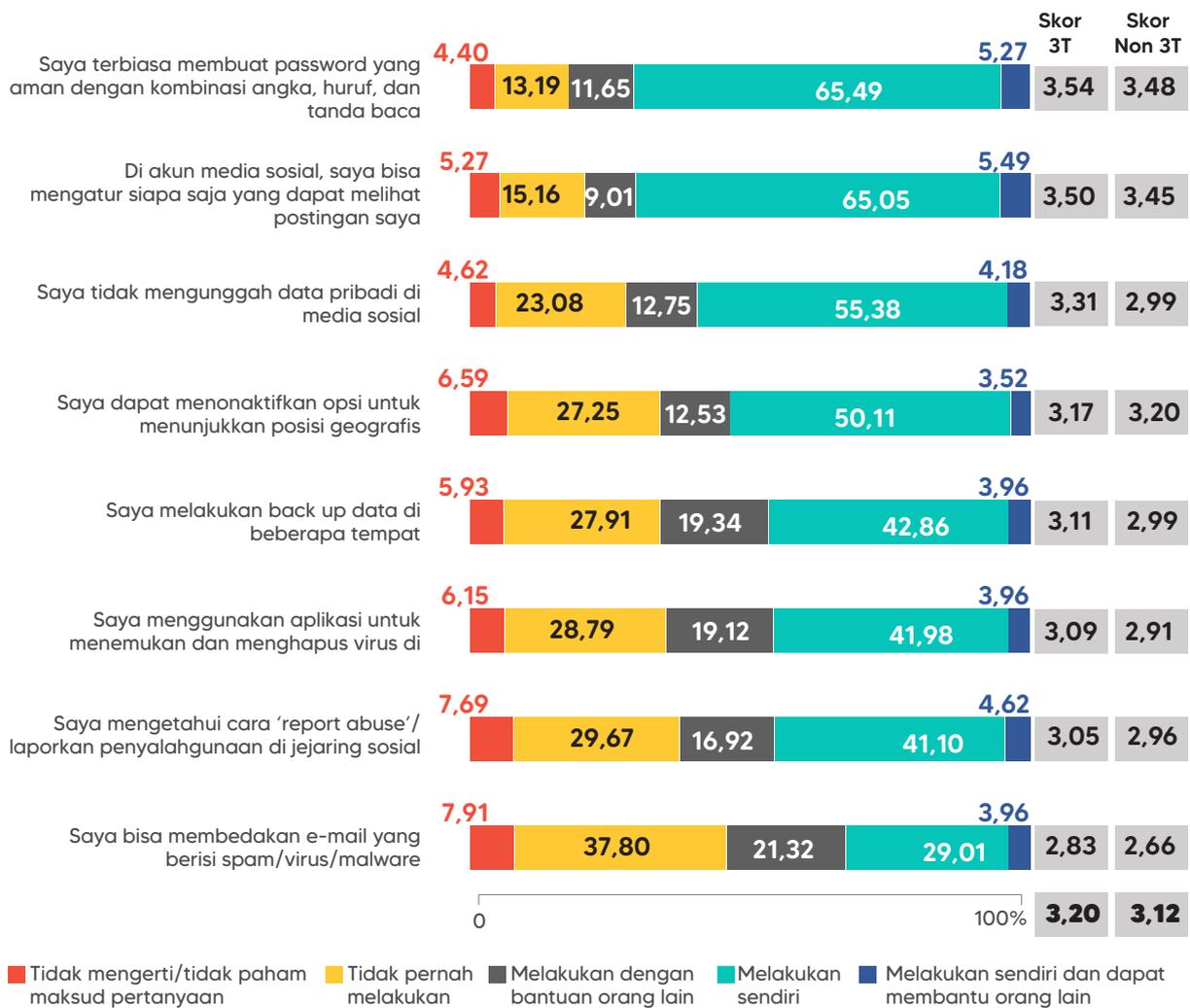
Pilar *Digital Ethics* wilayah 3T mendapatkan skor di atas rata-rata 3T dan non 3T dengan 3,55 poin. Indikator yang memiliki skor tertinggi di antaranya adalah mengajak orang untuk tidak berkomentar negatif (3,92) dan tidak membagikan tangkapan layar percakapan privat ke media sosial (3,84). Sementara itu, indikator dengan skor terendah adalah responden yang tidak membagikan langsung informasi kecelakaan (3,09).

Gambar 59. Pilar Digital Ethics di Wilayah 3T



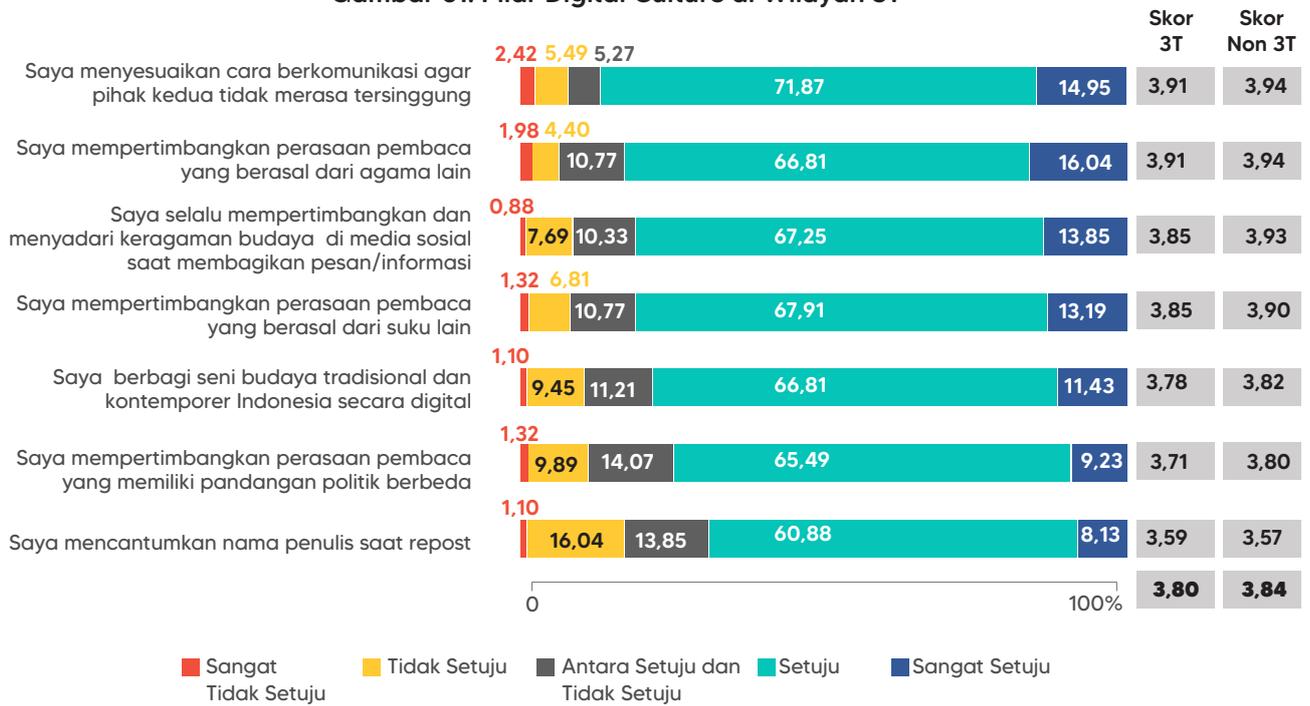
Pilar *Digital Safety* mendapatkan skor terendah dibandingkan pilar lainnya. Namun, unggul 0,08 poin jika dibandingkan dengan skor non 3T. Indikator dengan skor tertinggi yaitu terbiasa membuat password yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca (3,54). Sedangkan indikator kemampuan membedakan e-mail yang berisi spam/virus/malware memiliki skor terendah (2,83).

Gambar 60. Pilar *Digital Safety* di Wilayah 3T



Pilar *Digital Culture* mendapatkan skor tertinggi dibandingkan pilar lainnya, namun lebih rendah 0,04 poin dibandingkan skor pilar yang sama di wilayah non 3T. Secara umum, responden sudah baik dalam cara berkomunikasi serta dapat menghargai lawan bicara atau pendengar yang berasal dari agama, budaya, suku, maupun pandangan politik yang berbeda. Indikator-indikator ini memiliki skor di rentang 3,7-3,9, hanya satu indikator yang memiliki skor di bawah rentang tersebut, yaitu mencantumkan nama penulis saat repost (3,59).

Gambar 61. Pilar Digital Culture di Wilayah 3T

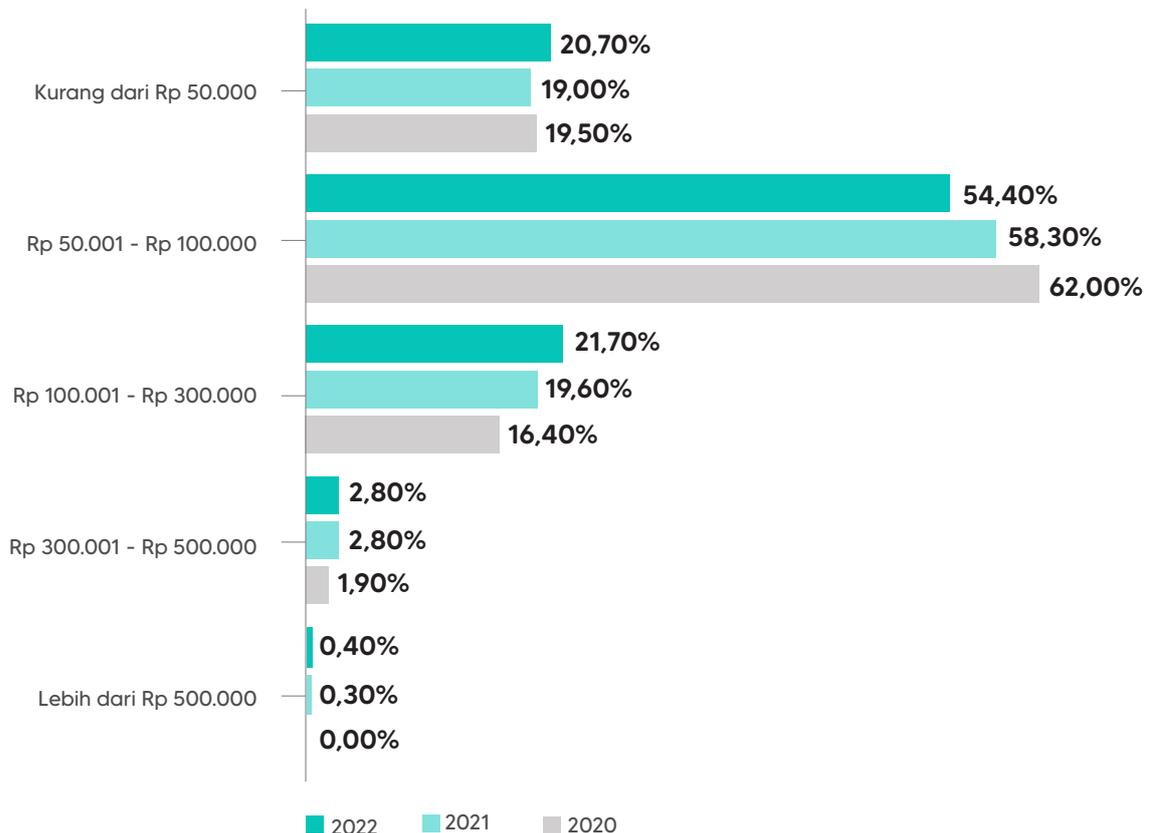


5.4.

Pengeluaran dalam Aktivitas Digital

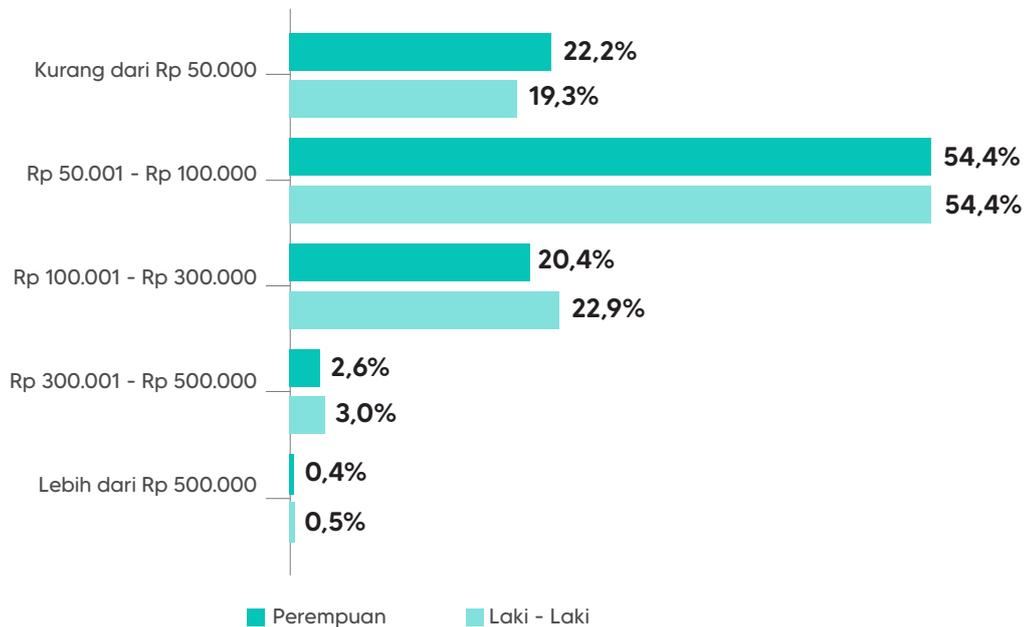
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas responden mengalokasikan Rp50-100 ribu per bulan untuk mengakses internet walaupun terjadi penurunan sekitar 3,9%. Sisanya, sekitar 20,7% responden mengalokasikan dana kurang dari Rp50 ribu dan 21,7% mengalokasikan Rp100-300 ribu per bulan.

Gambar 62. Pengeluaran Internet 2020-2022



Pada perbandingan pengeluaran akses internet berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan signifikan antara responden laki-laki dengan perempuan. Terdapat lebih banyak responden perempuan (22,2%) yang mengeluarkan biaya kurang dari Rp 50 ribu per bulan untuk mengakses internet dibandingkan dengan laki-laki (19,3%). Sebaliknya, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan (3,0%) mengalokasikan antara Rp 300-500 ribu per bulan.

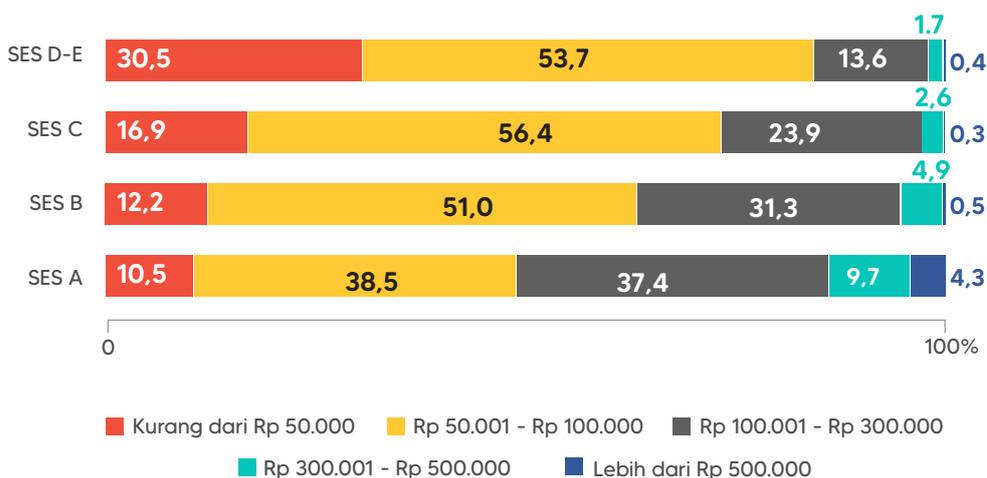
Gambar 63. Pengeluaran Z Jenis Kelamin



Pengeluaran untuk mengakses internet berbanding lurus dengan kelompok sosio ekonomi (SES) dari responden. Pada kelompok SES D-E (pengeluaran bulanan < Rp 2 juta), sebanyak 30,5% mengeluarkan biaya kurang dari Rp50 ribu. Sementara sebanyak 53,7% responden mengeluarkan biaya Rp50-100 ribu dan hanya 13,6% yang mengeluarkan biaya Rp100-300 ribu.

Adapun pada SES A (pengeluaran > Rp 6 juta), hanya 10,5% responden yang mengeluarkan kurang dari Rp 50 ribu. Banyak responden justru mengeluarkan biaya mengakses internet di atas Rp50 ribu per bulan. Perinciannya: sebanyak 38,1% responden mengeluarkan biaya Rp50-100 ribu dan 37,4% mengeluarkan biaya Rp300-500 ribu.

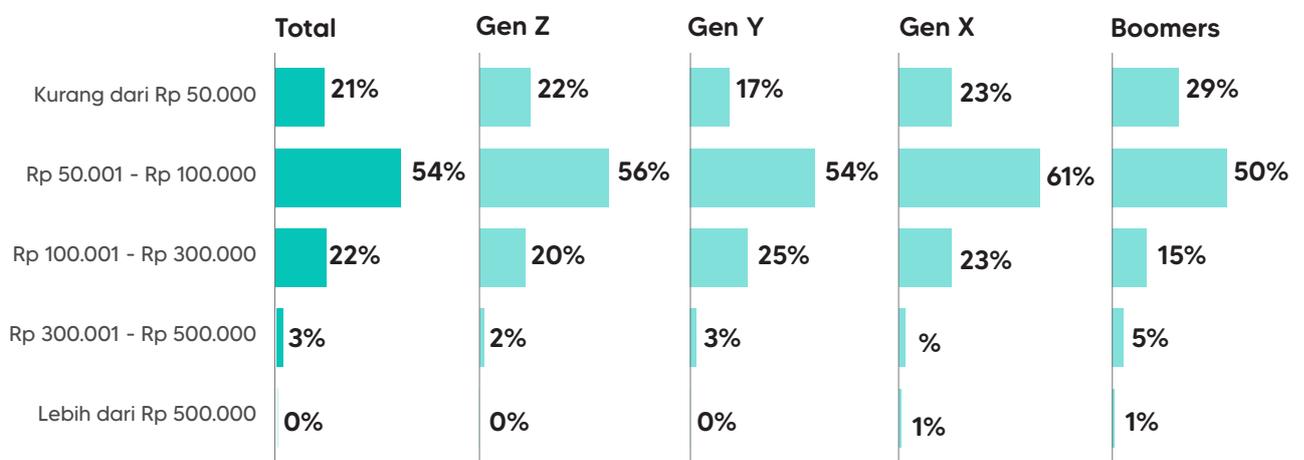
Gambar 64. Pengeluaran berdasarkan Status Ekonomi



Hanya ada sedikit perbedaan rata-rata biaya akses internet antargenerasi. Sebanyak 29% Generasi *baby boomers* hanya mengeluarkan kurang dari Rp50 ribu untuk mengakses internet, 50% mengeluarkan Rp50-100 ribu dan 15% mengeluarkan Rp100-300 ribu dan 6% lebih dari Rp300 ribu.

Adapun 22% Gen Z mengeluarkan kurang di 50 ribu untuk akses internet, 56% mengeluarkan Rp50-100 ribu, 20% Gen Z mengeluarkan biaya Rp100-300 ribu, dan 2% lebih dari Rp 300 ribu.

Gambar 65. Pengeluaran berdasarkan Generasi



Tingkat pendidikan memiliki korelasi positif terhadap pengeluaran mengakses internet. Responden dengan tingkat pendidikan minimal diploma memiliki proporsi terbanyak untuk pengeluaran akses internet lebih dari Rp100 ribu. Adapun responden dengan tingkat pendidikan terakhir tidak sekolah/SD memiliki proporsi terbesar untuk pengeluaran akses internet kurang dari Rp 50 ribu (sebesar 34,5%).

Gambar 66. Pengeluaran berdasarkan tingkat pendidikan



06 Penutup



Status Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun ini indeks naik dari 3,49 menjadi 3,54. Tiga pilar yang mengalami kenaikan adalah Digital Skill, Digital Ethics, dan Digital Safety. Sedangkan Digital Culture sedikit mengalami penurunan.

Pada umumnya masyarakat masih memiliki kebiasaan yang sama dalam mengakses internet. Sebagian besar masyarakat secara berturut-turut lebih banyak melakukan aktivitas untuk bersosial, hiburan, belajar/bekerja, dan mengakses layanan sosial. Namun perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya adalah durasi penggunaan internet yang semakin berkurang. Hal ini terjadi karena aktivitas sudah semakin terbuka sejak pandemi COVID-19, sehingga beberapa kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara penuh melalui daring, pada tahun ini sudah bisa *hybrid* ataupun luring sepenuhnya.

Selain itu, penggunaan sosial media berbasis video pendek mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2020. TikTok adalah satu-satunya sosial media yang mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat. Intensitas penggunaan aplikasi ini lebih banyak digunakan dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya

Program Literasi Digital yang diadakan oleh Kominfo mengalami dampak yang baik. Indeks Literasi Digital antara mereka yang mengikuti dan tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Sebagian besar yang mengikuti program, memiliki indeks lebih besar terutama pada pilar Digital Skill dan Digital Security. Namun, kegiatan yang berfokus pada peningkatan pilar Digital Ethics dan Digital Culture perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, isu-isu yang secara konsisten muncul seperti pada survei di tahun sebelumnya ada perlindungan data pribadi yang masih masalah esensial bagi sebagian besar responden. Selain itu, kemampuan masyarakat untuk dapat membedakan dan mengidentifikasi informasi hoaks masih menjadi masalah penting. Terutama dengan keterbatasan kemauan masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang diterima.

Pada tahun ini, beberapa isu khusus dibahas. Pertama-tama, Kalimantan Timur telah siap menjadi provinsi untuk wilayah IKN. Hal ini terlihat dari Status Literasi Digital IKN yang lebih besar dibandingkan sebagian provinsi lain di Indonesia.

Selain itu, terdapat kecenderungan pengeluaran untuk internet semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan harga dasar internet dan kebiasaan penggunaan sosial media berbasis video yang semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2021). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021.

CSIS. (2022). G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and digital Literacy: Framework and Approach.

Katadata. (2021, December 23). Sebanyak 7,14% Penduduk Kaltim Berpendidikan Hingga Perguruan Tinggi pada Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/sebanyak-714-penduduk-kaltim-berpendidikan-hingga-perguruan-tinggi-pada-juni-2021>

Katadata. (2022a, September 20). Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>

Katadata. (2022b, November 11). Kepala Otorita Beberkan 3 Fase Pembangunan IKN Nusantara hingga 2045 - Infrastruktur Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/636e2e1b77ef4/kepala-otorita-beberkan-3-fase-pembangunan-ikn-nusantara-hingga-2045>

Kish, L. (1949). A Procedure for Objective Respondent Selection within the Household. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 380–387. <https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483314>

Kominfo. (2020). Roadmap Literasi Digital 2020-2024.

Statista. (2022). Number of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Southeast Asia in 2020, by country. <https://www.statista.com/statistics/1317131/asean-number-of-micro-small-medium-sized-businesses-by-country/>

UN. (2022). UN Special Rapporteur on the Right to Education launches new report into the impact of digitalisation.

UNESCO. (2018). A Landscape Review: Digital Inclusion for Low-skilled and Low-literate People.

UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. <http://www.uis.unesco.org>

